



KEMENTERIAN PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

RENCANA STRATEGIS

**DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN
TAHUN 2025-2029**



**DIREKTORAN JENDERAL TANAMAN PANGAN
TAHUN ANGGARAN 2025**



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL TANAMAN PANGAN
NOMOR 15/KPTS/HK.310/C/1/2026

TENTANG

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL TANAMAN PANGAN,

Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti diterbitkannya Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 tahun 2025 tentang Rencana Strategis (*Renstra*) Kementerian Pertanian Tahun 2025-2029;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), maka perlu ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan tentang Rencana Strategis (*Renstra*) Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun 2025-2029.

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
12. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 250);
13. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 389);
14. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 141);
15. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pembahasan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 Tahun 2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;

17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja;
20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
22. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2012 Tahun 2012 tentang Pedoman Monitoring Dan Evaluasi Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Kementerian Pertanian;
23. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/11/2012 tentang Pedoman Nilai-Nilai dan Makna Bekerja Bagi Pegawai Kementerian Pertanian;
24. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/PW.310/12/2018 tentang Tata Kelola Pengawasan Intern Lingkup Kementerian Pertanian;

25. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30/Permentan/OT.080/8/2017 tentang Pedoman Penilaian Kesesuaian Penerapan Standar Pelayanan Publik Lingkup Kementerian Pertanian;
26. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
27. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 103/Kpts./OT.050/M/02/2025 tentang Kelompok Substansi dan Tim Kerja Pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Kementerian Pertanian;

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- KESATU : Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor 15/KPTS/HK.310/C/1/2026 tentang Rencana Strategis (*Renstra*) Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun 2025-2029.
- KEDUA : Rencana Strategis (*Renstra*) Direktorat Jenderal Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagai dasar penyusunan perencanaan kegiatan dan anggaran jangka menengah atau jangka pendek Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, dan sebagai acuan penyusunan rencana strategis unit organisasi Eselon II, serta Satuan Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan periode 5 (lima) tahunan terhitung 2025-2029.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 13 Januari 2026

DIREKTUR JENDERAL TANAMAN PANGAN,



YUDI SASTRO

NIP 197207021998031002

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Pertanian Republik Indonesia;
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Lingkup Kementerian Pertanian;
3. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama lingkup Direktorat Jenderal Tanaman
4. Gubernur seluruh Indonesia;
5. Bupati/Walikota seluruh Indonesia;
6. Kepala Dinas Provinsi yang melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang tanaman pangan seluruh Indonesia;
7. Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang tanaman pangan seluruh Indonesia;
8. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas rahmat dan hidayah-Nya, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dapat menyusun dan menerbitkan Buku Rencana Strategis Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun 2025-2029. Dokumen ini merupakan panduan strategis yang menjadi dasar dalam menjalankan seluruh program dan kegiatan di lingkungan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan selama 5 (*lima*) tahun mendatang.

Rencana Strategis ini disusun dengan mempertimbangkan berbagai tantangan dan peluang yang dihadapi sektor tanaman pangan dalam rangka mendukung ketahanan pangan nasional. Melalui pendekatan yang berbasis data dan analisis komprehensif, kami berkomitmen untuk meningkatkan produktivitas, kualitas, dan keberlanjutan produksi tanaman pangan guna menjawab kebutuhan pangan dan menjaga kestabilan pangan secara efektif dan efisien.

Rencana Strategis ini dalam penyusunannya melibatkan berbagai pemangku kepentingan, baik dari internal Direktorat Jenderal Tanaman Pangan maupun instansi terkait, sehingga dokumen ini mencerminkan keselarasan dan sinergi program kegiatan yang akan dilaksanakan. Rencana Strategis ini juga mengarah pada RPJMN 2025-2029 yang menjadi acuan dalam pencapaian sasaran program Pemerintah jangka menengah, baik itu Program Nasional, Program Strategis Nasional, Program Strategis lainnya maupun program kegiatan tematik. Disamping itu, dokumen ini juga turut menampilkan wujud penguatan peran serta Direktorat Jenderal Tanaman Pangan sebagai motor penggerak pembangunan pertanian sektor tanaman pangan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan dinamika pasar melalui program dan kegiatan di unit kerja Eselon II lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.

Rencana Strategis ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi seluruh unit kerja lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan maupun *stakeholder*/instansi terkait lainnya dalam melaksanakan tugas fungsi

dan kepentingannya. Selain itu, dokumen ini juga diharapkan mampu meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan program serta menjadi alat evaluasi capaian kinerja pembangunan pertanian sektor tanaman pangan secara berkala.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam proses penyusunan Rencana Strategis ini. Semoga kerja sama yang solid dan komitmen bersama dapat mewujudkan visi dan misi pembangunan pertanian sektor tanaman pangan yang maju dan berkelanjutan.

Jakarta, 13 Januari 2026
Direktur Jenderal,




DR. Yudi Sastro, S.P., M.P.
NIP 197207021998031002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. LATAR BELAKANG	1
1.2. STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN	2
1.3. POTENSI DAN PERMASALAHAN	5
1.3.1. <i>Potensi</i>	5
1.3.2. <i>Permasalahan</i>	18
1.3.3. <i>Analisa SWOT</i>	39
1.4. ANALISIS CAPAIAN KINERJA DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN 2020 – 2024	58
1.4.1. <i>IKP 1.1 JUMLAH PRODUKSI PADI</i>	59
1.4.2. <i>IKP 1.2 JUMLAH PRODUKSI JAGUNG</i>	62
1.4.3. <i>IKP 1.3 JUMLAH PRODUKSI KEDELAI</i>	64
1.4.4. <i>IKP 2.1 JUMLAH PRODUKSI ANEKA UMBI</i>	66
1.4.5. <i>IKP 2.2 JUMLAH PRODUKSI ANEKA KACANG</i>	68
1.4.6. <i>IKP 3.1 RASIO LUAS SERANGAN OPT YANG DAPAT DITANGANI TERHADAP LUAS SERANGAN OPT</i>	70
1.4.7. <i>IKP 3.2 RASIO LUAS TERKENA DPI YANG DAPAT DITANGANI TERHADAP LUAS TERKENA DPI</i>	73

1.4.8.	<i>IKP 4.1 TINGKAT KEMANFAATAN SARANA PASCAPANEN DAN PENGOLAHAN HASIL TANAMAN PANGAN</i>	75
1.4.9.	<i>IKP 4.2 PERTUMBUHAN NILAI EKSPOR UNTUK PRODUK PERTANIAN TANAMAN PANGAN</i>	77
1.4.10.	<i>IKP 5.1 PERSENTASE CAPAIAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN</i>	79
1.4.11.	<i>IKP 6.1 INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN (IKPA) DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN</i>	82
BAB II	VISI MISI TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM	85
2.1	VISI, MISI, TUJUAN KEMENTERIAN PERTANIAN 2025 – 2029	85
2.2	VISI DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN 2025 – 2029.....	91
2.3	MISI DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN 2025 – 2029.....	93
2.4	TUJUAN DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN 2025 – 2029	93
2.5	POHON KINERJA TERKAIT DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN 2025 – 2029	96
2.5.1	<i>FINAL OUTCOME 1</i>	97
2.5.2	<i>FINAL OUTCOME 2 - INTERMEDIATE OUTCOME 2.1.1</i>	99
2.5.3	<i>FINAL OUTCOME 2 – INTERMEDIATE OUTCOME 2.1.4</i>	106
2.5.4	<i>FINAL OUTCOME 2 – INTERMEDIATE OUTCOME 2.1.6</i>	107

2.5.5	<i>FINAL OUTCOME 3 – INTERMEDIATE OUTCOME</i>	
3.1.1 DAN 3.2.1		109
2.5.6	<i>FINAL OUTCOME 6</i>	112
2.6	SASARAN PROGRAM DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN 2025 – 2029	113
BAB III	ARAH KEBIJAKAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	117
3.1	ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEMENTERIAN PERTANIAN 2025 – 2029	117
3.2	ARAH KEBIJAKAN, PROGRAM DAN KEGIATAN DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN 2025 – 2029	125
BAB IV	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	129
4.1	TARGET KINERJA	129
4.2	KERANGKA PENDANAAN.....	136
BAB V	PENUTUP	137

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan	4
Gambar 2.	Penyebab Krisis Pangan Global (Sumber: GRFC, 2024)....	19
Gambar 3.	Krisis Pangan Dunia (Sumber: Diolah oleh Kementerian Pertanian)	19
Gambar 4.	Pangsa Pasar Beberapa Komoditas Rusia dan Ukraina Pada Pasar Perdagangan Pangan Global (Sumber: FAO XCBS system).....	22
Gambar 5.	Dampak Ekonomi dan Harga Pangan Perang Rusia.....	25
Gambar 6.	Tren El-Nino 2013, 2014 dan 2023 (Sumber: Kementerian Pertanian)	27
Gambar 7.	Inflasi Pangan Sejak Tahun 2020 (Sumber: FAO).....	29
Gambar 8.	Stunting di Indonesia Tahun 2024	31
Gambar 9.	Solusi Permasalahan Stunting (Sumber: https://dashboard.stunting.go.id)	32
Gambar 10.	Presiden Prabowo Memantau Makan Bergizi Gratis (Sumber: Pontianak Post).....	33
Gambar 11.	Luas Lahan Sawah (Sumber: Statistik Pertanian 2024) ...	35
Gambar 12.	Luas Panen Tanaman Pangan (Sumber: Data Olahan dari Statistik Pertanian 2024).....	36
Gambar 13.	Perbandingan Pertanian 4.0 dengan Pendekatan Konvensional.....	38
Gambar 14.	Target dan Realisasi Jumlah Produksi Padi (Juta Ton)....	60
Gambar 15.	Tren Capaian Kinerja Jumlah Produksi Padi (Juta Ton) ...	61
Gambar 16.	Target dan Realisasi Jumlah Produksi Jagung (Juta Ton)	62
Gambar 17.	Tren Capaian Kinerja Jumlah Produksi Jagung (Juta Ton)	63
Gambar 18.	Target dan Realisasi Jumlah Produksi Kedelai (Juta Ton)	64
Gambar 19.	Tren Capaian Kinerja Jumlah Produksi Kedelai (Juta Ton)	65

Gambar 20. Target dan Realisasi Jumlah Produksi Aneka Umbi (Juta Ton)	66
Gambar 21. Tren Capaian Kinerja Jumlah Produksi Aneka Umbi (Juta Ton)	67
Gambar 22. Target dan Realisasi Jumlah Produksi Aneka Kacang (Juta Ton)	68
Gambar 23. Tren Capaian Kinerja Jumlah Produksi Aneka Kacang (Juta Ton)	69
Gambar 24. Target dan Realisasi Rasio luas Serangan OPT yang Dapat Ditangani Terhadap Luas Serangan OPT.....	71
Gambar 25. Tren Capaian Kinerja Rasio luas Serangan OPT yang Dapat Ditangani Terhadap Luas Serangan OPT.....	72
Gambar 26. Target dan Realisasi Rasio Luas Terkena DPI yang Dapat Ditangani Terhadap Luas Terkena DPI	73
Gambar 27. Tren Capaian Kinerja Rasio Luas Terkena DPI yang Dapat Ditangani Terhadap Luas Terkena DPI	74
Gambar 28. Target dan Realisasi Tingkat Kemanfaatan Sarana Pascapanen dan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan.....	75
Gambar 29. Tren Capaian Kinerja Tingkat Kemanfaatan Sarana Pascapanen dan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan.....	76
Gambar 30. Target dan Realisasi Pertumbuhan Nilai Ekspor Untuk Produk Pertanian Tanaman Pangan	77
Gambar 31. Tren Capaian Kinerja Pertumbuhan Nilai Ekspor Untuk Produk Pertanian Tanaman Pangan	78
Gambar 32. Target dan Realisasi Persentase Capaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan	79
Gambar 33. Tren Capaian Kinerja Persentase Capaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan	81
Gambar 34. Target dan Realisasi Nilai IKPA Direktorat Jenderal Tanaman Pangan	82

Gambar 35. Tren Capaian Kinerja Nilai IKPA Direktorat Jenderal Tanaman Pangan	83
Gambar 36. Final Outcome 1	98
Gambar 37. FO.2 - Intermediate Outcome 2.1.1	100
Gambar 38. FO.2 - Intermediate Outcome 2.1.4.....	106
Gambar 39. FO.2 - Intermediate Outcome 2.1.6.....	108
Gambar 40. FO.3 - Intermediate Outcome 3.1.1 dan 3.2.1	110
Gambar 41. Kerangka Strategis Kementerian Pertanian 2025 - 2029.	117
Gambar 42. Rumah Strategi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan 2025 - 2029	125
Gambar 43. Target Kinerja Direktorat Jenderal Tanaman Pangan 2025 - 2029.....	129

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Luas Baku Sawah Tahun 2024	7
Tabel 2. Analisis Strategi SWOT Direktorat Jenderal Tanaman Pangan	56
Tabel 3. Penyesuaian IKP Direktorat Jenderal Tanaman Pangan 2020 - 2024.....	58
Tabel 4. Tujuan dan Indikator Tujuan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan 2025 - 2029	95
Tabel 5. Sasaran Program Direktorat Jenderal Tanaman Pangan 2025 - 2029.....	114

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1.	MATRIKS KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN.....	139
LAMPIRAN 2.	MATRIK PENDANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DAN SUMBER PENDANAAN LAINNYA YANG SAH TERHADAP KEGIATAN PRIORITAS/PROYEK PRIORITAS DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN	150
LAMPIRAN 3.	PENDELEGASIAN KINERJA DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN 2025 - 2029	153

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pangan merupakan salah satu faktor strategis yang menentukan kedaulatan sebuah negara karena pangan adalah kebutuhan primer masyarakat. Kendali atas pangan akan menentukan stabilitas sebuah negara. Tidak hanya berbicara mengenai pengaruh di dalam negeri, dalam konteks geopolitik, pangan dapat memengaruhi kekuatan dan daya tawar sebuah negara terhadap negara lain. Negara dengan ketergantungan impor pangan tinggi akan semakin rentan terhadap tekanan politik atau tekanan ekonomi negara pemasok.

Kedaulatan pangan berdasarkan Undang-undang 18 Tahun 2012 tentang Pangan merupakan hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan pangan, menjamin hak atas pangan bagi rakyatnya, serta memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem pangan sesuai potensi sumber daya lokal. Penafsiran tentang kedaulatan pangan berdasarkan regulasi tersebut dapat berarti 3 (tiga) hal. Pertama yaitu kendali penuh atas pangan meliputi produksi, distribusi dan konsumsi pangan. Kedua yaitu negara tidak bergantung pada impor dalam waktu tertentu untuk memenuhi kebutuhan pokok. Ketiga, pangan diproduksi berdasarkan potensi dan budaya lokal.

Pemerintah Indonesia menyadari pentingnya pangan untuk menjaga stabilitas dan kedaulatan negara. Oleh karena itu, swasembada pangan merupakan salah satu cita-cita nasional jangka menengah periode 2025 – 2029. Swasembada merupakan kondisi Indonesia diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pangannya melalui produksi lokal sehingga dapat mengurangi dan dalam jangka panjang dapat menghilangkan ketergantungan impor. Kebutuhan pangan yang erat kaitannya dengan populasi penduduk menjadi tantangan nasional yang

perlu dihadapi bersama. Produksi yang terus meningkat tidak akan berdampak signifikan jika tidak bisa mengimbangi laju pertumbuhan penduduk.

Pemanfaatan pangan saat ini tidak hanya sebatas konsumsi, pangan dapat menjadi bahan baku untuk energi alternatif dalam bentuk bio energi yang pada akhirnya berkontribusi terhadap ketahanan energi nasional. Kampanye global untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil dapat terjawab dengan pemanfaatan limbah pangan. Meskipun kontribusi tersebut belum signifikan, namun sebagai langkah awal transformasi energi, dalam jangka panjang, pemanfaatan limbah pangan untuk bahan baku bio energi diharapkan dapat menjadi solusi.

Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Tanaman Pangan merupakan *leading sector* yang berperan sebagai *key role* dalam mewujudkan swasembada pangan dan mendorong peningkatan kontribusi terhadap ketahanan energi. Kolaborasi, serta perencanaan yang selaras antar pemangku kepentingan merupakan fondasi yang dapat menjadi pijakan dalam mewujudkan swasembada pangan. Saat ini Kementerian Pertanian telah merumuskan Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2025 – 2029 (Renstra Kementerian Pertanian 2025 – 2029) yang menjadi rujukan dalam mewujudkan swasembada pangan.

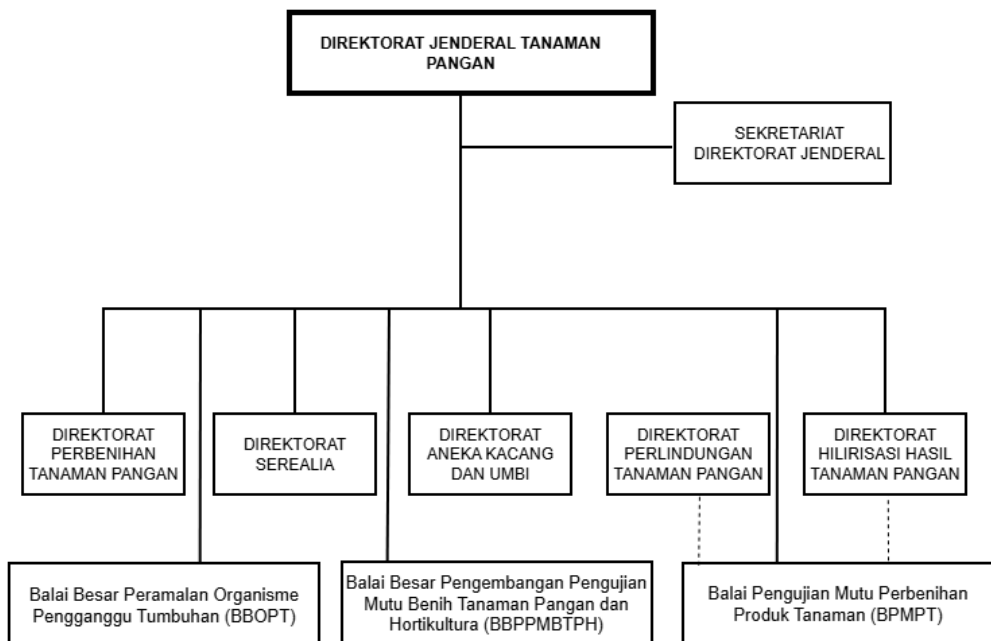
1.2. STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN

Tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian. Sebagaimana diatur dalam pasal 105, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan bertugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi komoditas tanaman pangan dan hilirisasi hasil

tanaman pangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang perbenihan, budi daya, perlindungan, keamanan pangan, pascapanen, serta hilirisasi dan pemasaran hasil tanaman pangan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang perbenihan, budi daya, perlindungan, keamanan pangan, pascapanen, serta hilirisasi dan pemasaran hasil tanaman pangan;
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perbenihan, budi daya, perlindungan, keamanan pangan, pascapanen, serta hilirisasi dan pemasaran hasil tanaman pangan;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perbenihan, budi daya, perlindungan, keamanan pangan, pascapanen, serta hilirisasi dan pemasaran hasil tanaman pangan;
- e. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang perbenihan, budi daya, perlindungan, keamanan pangan, pascapanen, serta hilirisasi dan pemasaran hasil tanaman pangan;
- f. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dibantu oleh 6 (enam) Unit Kerja Eselon II (UKE II). Sebanyak 5 (lima) UKE II menyelenggarakan tugas dan fungsi utama sementara 1 (satu) UKE II menyelenggarakan fungsi dukungan manajemen. Visualisasi dari struktur organisasi lingkup Direktorat Jenderal.



Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan

Berdasarkan gambar di atas, UKE II yang menyelenggarakan tugas dan fungsi dukungan manajemen dilakukan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal, sedangkan penyelenggaraan tugas dan fungsi teknis dilakukan oleh : Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan; Direktorat Serealia; Direktorat Aneka Kacang dan Umbi; Direktorat Pelindungan Tanaman Pangan; dan Direktorat Hilirisasi Hasil Tanaman Pangan.

Direktorat Jenderal Tanaman Pangan mempunyai tiga Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 7 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Tanaman Pangan. Berdasarkan Permentan tersebut, UPT lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan terdiri atas: (a) Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan (BBPOPT); (b) Balai Besar Pengembangan Pengujian Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (BBPPMBTPH); dan (c) Balai Pengujian Mutu Produk Tanaman (BPMPT).

Ketiga UPT tersebut berperan sebagai satuan kerja teknis yang bersifat mandiri dalam mendukung pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, khususnya dalam penyediaan layanan teknis, penjaminan mutu, pengendalian risiko produksi, serta penguatan sistem perlindungan dan perbenihan tanaman pangan dan hortikultura secara berkelanjutan.

1.3. POTENSI DAN PERMASALAHAN

Analisis potensi dan permasalahan bertujuan untuk mengetahui dinamika lingkungan strategis yang akan memengaruhi capaian visi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan 2025 - 2029. Analisis dilakukan untuk melihat tren dan fenomena lingkup global hingga nasional yang memengaruhi penyelenggaraan pembangunan pertanian, lebih spesifik pada sub sektor tanaman pangan.

1.3.1. Potensi

Indonesia mempunyai potensi sumberdaya yang sangat besar dan penting untuk dapat dikembangkan bagi Pembangunan pertanian sub sektor tanaman pangan, antara lain:

1. Keanekaragaman hayati dan agroekosistem
2. Lahan pertanian
3. Teknologi
 - a. Teknologi Perbenihan
 - b. Teknologi Pemupukan
 - c. Teknologi Pascapanen
 - d. Teknologi Pengendalian OPT dan DPI
4. Tenaga kerja pertanian
5. Pasar.

1.3.1.1. Keanekaragaman Hayati dan Agroekosistem

Indonesia dikenal sebagai pusat keanekaragaman hayati dunia dan dikenal sebagai salah satu negara yang memiliki keanekaragaman hayati tertinggi di dunia. Sepuluh persen dari spesies tumbuhan berbunga di dunia terdapat di Indonesia, meskipun luas daratan Indonesia hanya 13% dari total luas daratan di dunia. Selain itu di Indonesia hidup 12% spesies mamalia, 16% reptile dan amphi, dan 17% burung dari total spesies yang ada didunia. Potensi sumber hayati berasal dari tumbuhan ada sekitar 40 ribu yang terdiri dari 5000 jenis jamur, 400 jenis tanaman penghasil buah, 370 jenis tanaman penghasil sayuran, 70 jenis tanaman berumbi, 60 jenis tanaman penyegar dan 55 jenis tanaman rempah.

Keanekaragaman hayati Indonesia sebagian telah dimanfaatkan, sebagian baru diketahui potensinya, dan sebagian besar lagi bahkan namanya saja belum diketahui (diidentifikasi). Keanekaragaman hayati tersebut merupakan tumpuan hidup manusia, karena setiap orang membutuhkannya untuk menopang kehidupan, sebagai sumber pangan, pakan, bahan baku industri, farmasi dan obat-obatan. Salah satu pemanfaatan keanekaragaman hayati adalah melalui perdagangan tanaman obat dengan nilai perdagangan tanaman obat dan produk berasal dari tumbuhan termasuk suplemen. Selain berfungsi untuk menunjang kehidupan manusia, keanekaragaman hayati memiliki peranan dalam mempertahankan keberlanjutan ekosistem.

Indonesia juga memiliki potensi agroekosistem yang cukup untuk mendukung pengembangan pertanian diantaranya adalah ketersediaan tanah, hara, dataran rendah dan tinggi, curah hujan yang merata di sebagian wilayah, sinar matahari yang terus menyinari sepanjang tahun, kelembaban udara

dan organisme-organisme, setidaknya memiliki 47 ekosistem alami yang berbeda. Kita bisa menjumpai padang es dan padang rumput dataran tinggi di Papua. Beragam hutan basah dataran rendah di Kalimantan dan Sumatera. Adapula ekosistem danau yang dalam dan rawa dangkal. Untuk itu, agar keanekaragaman hayati dan agroekosistem tidak terancam kelestariannya, maka kita harus arif (bijaksana) dalam memanfaatkannya, dengan mempertimbangkan aspek manfaat dan aspek kelestariannya.

1.3.1.2. Lahan Pertanian

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan luas daratan mencapai 1.922.570 km² (192 juta ha) dan luas perairan mencapai 3.257.483 km². Luas kawasan budidaya yang berpotensi menjadi kawasan pertanian di Indonesia cukup besar. Dataran tinggi di Indonesia memiliki potensi lahan sekitar 6,8 juta hektar untuk pengembangan pertanian, sedangkan dataran rendah memiliki luas sekitar 87,2 juta hektar. Luas total lahan sawah di Indonesia adalah sekitar 7,3 juta hektar (tabel 1), dengan 87% di antaranya harus dipertahankan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan tidak boleh diubah fungsi untuk kepentingan lain.

Tabel 1. Luas Baku Sawah Tahun 2024

No	Provinsi	LBS 2024
1	Aceh	202.811
2	Sumatera Utara	311.834
3	Sumatera Barat	188.521
4	Riau	59.181
5	Kep. Riau	883
6	Kep. Babel	22.561

No	Provinsi	LBS 2024
7	Jambi	69.961
8	Bengkulu	43.547
9	Sumatera Selatan	519.484
10	Lampung	337.284
11	Banten	197.845
12	DKI Jakarta	360
13	Jawa Barat	916.798
14	Jawa Tengah	987.468
15	D.I.Y	67.027
16	Jawa Timur	1.207.977
17	Kalimantan Barat	200.499
18	Kalimantan Tengah	100.963
19	Kalimantan Selatan	343.373
20	Kalimantan Timur	46.640
21	Kalimantan Utara	12.148
22	Bali	64.474
23	Nusa Tenggara Barat	237.341
24	Nusa Tenggara Timur	176.693
25	Sulawesi Selatan	660.638
26	Sulawesi Tengah	126.985
27	Sulawesi Tenggara	89.744
28	Sulawesi Barat	42.906
29	Gorontalo	32.241
30	Sulawesi Utara	39.768
31	Maluku	17.960
32	Maluku Utara	7.187
33	Papua Barat (Terdahulu Prov. Papua Barat)	2.604
34	Papua Barat Daya (Terdahulu Prov. Papua Barat)	472

No	Provinsi	LBS 2024
35	Papua (Terdahulu Prov Papua)	1.807
36	Papua Tengah (Terdahulu Prov Papua)	2.370
37	Papua Pegunungan (Terdahulu Prov Papua)	949
38	Papua Selatan (Terdahulu Prov Papua)	43.037
Total (Ha)		7.384.341

Sumber : Pusat Data dan Informasi Kementerian Pertanian 2024

Selain jumlah lahan potensial tersebut, hal yang mendukung adalah jumlah luasan dan sebaran hutan, sungai, rawa dan danau serta curah hujan yang cukup tinggi dan merata sepanjang tahun, juga waduk, bendungan, embung, maupun air tanah serta air permukaan lainnya, yang sangat potensial untuk mendukung pengembangan usaha pertanian, khususnya tanaman pangan. Data bendungan dan waduk yang masih aktif di Indonesia cukup banyak dan tersebar di berbagai provinsi. Menurut data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), total bendungan di Indonesia sebanyak 292 bendungan, yang terdiri dari bendungan yang sudah beroperasi dan masih dalam tahap pembangunan. Berikut beberapa contoh bendungan dan waduk yang masih aktif di Indonesia:

- Jawa Barat: Ciawi, Cipanas, Cipancuh, Cirata, Darma, Jatigede, Jatiluhur, Kuningan, Leuwikeris, Sadawarna, Saguling, Sukamahi
- Jawa Tengah: Bener, Cacaban, Colo, Gajah Mungkur, Jatibarang, Kedungombo, Logung, Matenggeng, Pidekso, Randugunting, Sempor, Soedirman, Wadaslintang, Wilalung

- Jawa Timur: Karangates, Krangkengan, Lahikaninu, Laor, Ngeseng, Notopuro, Pacal, Palasari, Pengga, Pesayangan, Soka, Srinjing, Tegallinggah, Toraut, Wlingi
- Bali: Palasari, Soka, Tegallinggah
- Nusa Tenggara Barat: Aiputik, Aji, Gapit, Gebong, Gede, Ijura, Jangkok, Kalimantanong, Klesem, Koangbatu, Mahardo, Mama, Medani, Mejugong, Mengkoang, Moyo, Pungka, Pungkit, Rababoda, Rahalayu, Sarisakolo, Sepakat, Tiuwui, Usar, Waekor
- Nusa Tenggara Timur: Aelega, Deturia, Ilegatang, Lahikaninu, Nangagete, Waeces, Waeka, Waemese, Waeracang, Waerentang

Berdasarkan kondisi tersebut diatas pengembangan sub sektor tanaman pangan terkait program penambahan luas baku lahan sebaiknya diarahkan ke daerah-daerah di luar pulau Jawa. Potensi pengembangan untuk areal irigasi memungkinkan di pulau Sumatera dan Sulawesi. Selain itu untuk penumbuhan kantong-kantong produksi dapat juga dikembangkan pada lahan non irigasi (tadah hujan, pasang surut, lebak dan polder) yang banyak terdapat di pulau Sumatera dan Kalimantan. Sedangkan untuk lahan yang sementara tidak diusahakan masih banyak terdapat di Papua (sekitar 5,329 juta ha).

1.3.1.3. Teknologi

Teknologi untuk meningkatkan produksi tanaman pangan telah berkembang pesat. Berbagai inovasi teknologi spesifik lokasi telah dihasilkan oleh Badan Litbang Kementerian Pertanian (sekarang Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian/BRMP). Dalam hal ini Kementerian Pertanian telah menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/

Permentan/OT.140/10/2006 tentang Pedoman Budidaya Tanaman Pangan Yang Baik dan Benar (*Good Agriculture Practices*) yang bertujuan untuk:

1. Meningkatkan produksi dan produktifitas tanaman pangan.
2. Meningkatkan mutu hasil tanaman pangan termasuk keamanan konsumsi tanaman pangan.
3. Meningkatkan efisiensi produksi dan daya saing tanaman pangan.
4. Memperbaiki efisiensi penggunaan sumber daya alam.
5. Mempertahankan kesuburan lahan, kelestarian lingkungan dan sistem produksi yang berkelanjutan.
6. Mendorong petani dan kelompok tani untuk memiliki sikap mental yang bertanggung jawab terhadap produk yang dihasilkan, kesehatan dan keamanan diri dan lingkungan.
7. Meningkatkan peluang dan daya saing penerimaan oleh pasar internasional maupun domestik.
8. Memberi jaminan keamanan terhadap konsumen.

Peraturan Menteri Pertanian tersebut dapat dijadikan pedoman umum dalam melaksanakan budidaya tanaman pangan secara benar dan tepat, sehingga diperoleh produktivitas tinggi, mutu produk yang baik, keuntungan maksimal, ramah lingkungan dan memperhatikan aspek keamanan, kesehatan dan kesejahteraan petani, serta usaha produksi yang berkelanjutan. Berbagai macam paket teknologi tepat guna diharapkan dapat dimanfaatkan oleh petani untuk meningkatkan kuantitas, kualitas dan produktivitas aneka produk pertanian. Teknologi untuk meningkatkan produksi tanaman pangan sebagai berikut:

A. Teknologi Perbenihan

Penggunaan benih bermutu dari varietas unggul merupakan faktor penentu potensi hasil yang dapat dicapai dalam budidaya tanaman. Sampai saat ini sudah banyak penelitian yang dikembangkan untuk perbenihan. Sistem produksi benih yang meliputi penyediaan varietas unggul, produksi benih, pengendalian mutu dan distribusinya telah dikembangkan di Indonesia sejak tahun 1971.

Penggunaan benih bermutu dari varietas unggul dapat meningkatkan produksi pangan nasional, namun terkendala oleh jumlah produksi benih yang belum mencukupi kebutuhan. Pemerintah telah mendorong petani untuk memproduksi benih bermutu sendiri agar tercukupi kebutuhannya sehingga dapat mewujudkan kemandirian pangan. Untuk itu telah dicanangkan program Mandiri Benih. Dalam mendukung program tersebut, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan telah memfasilitasi kegiatan Pengembangan Produsen Benih Tanaman Pangan. Program tersebut diutamakan untuk daerah yang belum terpenuhi kebutuhan benihnya. Diharapkan dengan adanya program tersebut petani dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, dan apabila ada kelebihan produksi benih dapat digunakan oleh daerah sekitarnya.

B. Teknologi Pemupukan

Pengembangan teknologi pemupukan harus didorong dalam membangun keseimbangan pengembangan pupuk anorganik dan organik, serta jaminan akan ketersediaan sumber bahan baku yang menjadi persyaratan bagi pengembangan industri pupuk, sehingga dapat memenuhi kebutuhan, serta sumberdaya manusia yang terlibat langsung dalam proses pengolahan pupuk, terutama

pengolahan pupuk organik di daerah sentra produksi sub sektor tanaman pangan dengan memanfaatkan limbah pertanian yang tersedia.

C. Teknologi Pascapanen

Penanganan pasca panen yang baik dan benar memerlukan teknologi yang tepat. Teknologi pasca panen merupakan kunci untuk meningkatkan kualitas produk hasil panen produk pertanian dan memberikan nilai tambah produk pertanian.

Berbagai macam teknologi pascapanen dan pengolahan hasil pertanian sudah banyak dihasilkan para peneliti di lembaga penelitian, masyarakat petani dan swasta, semuanya itu dapat dimanfaatkan oleh petani untuk meningkatkan kuantitas, kualitas dan produktivitas aneka produk pertanian.

Untuk menerapkan penanganan pasca panen yang baik, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan telah memfasilitasi sarana pasca panen untuk menurunkan susut hasil (losses), meningkatkan nilai tambah produk olahan tanaman pangan serta meningkatkan mutu hasil produksi tanaman pangan.

D. Teknologi Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI)

Pengamanan produksi tanaman pangan dari gangguan OPT dan DPI merupakan bagian penting untuk menjaga kuantitas, kualitas dan kontinuitas hasil tanaman pangan. Pengamanan dilakukan secara efisien dan bijaksana, dengan memperhatikan kaidah pengendalian Hama Terpadu (PHT) sehingga tercipta pertanian ramah lingkungan. Program pengendalian hama terpadu menjadi bagian yang utama

dalam kegiatan usahatani dan dipayungi oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan, PP nomor 6 tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman, Peraturan Menteri Pertanian nomor 39/PERMENTAN/HM.130/8/2018 tentang Sistem Peringatan Dini dan Penanganan Dampak Perubahan Iklim pada Sektor Pertanian. Saat ini cukup banyak industri bahan pengendali OPT dengan kapasitas produksi yang cukup memadai dan jenis pestisida yang beragam sesuai dengan permintaan dan kebutuhan pestisida guna melindungi pertanaman dari gangguan OPT.

1.3.1.4. Tenaga Kerja Pertanian

Tenaga kerja pertanian (dalam arti sempit) merupakan tenaga kerja terbesar dengan jumlahnya mencapai 36,46 juta orang pada Agustus tahun 2023. Jumlah ini merupakan 26,07% dari jumlah tenaga kerja Indonesia seluruhnya yang berjumlah 139.85 juta orang. Jika dibandingkan dengan bulan Agustus Tahun 2022 sebesar 35,91 juta orang, maka angka tersebut mengalami peningkatan sebesar 1,53% atau sebanyak 548 ribu jiwa. Tenaga kerja tersebut tersebar ke dalam empat subsektor yaitu di subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan.

Jumlah tenaga kerja tersebut belum seluruhnya tersebar secara proporsional sesuai dengan sebaran luas potensi lahan serta belum memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup untuk pengembangan pertanian yang berdaya saing. Jika tenaga kerja tersebut dapat ditingkatkan pengetahuan dan keterampilannya di sektor produksi, pemasaran dan pemasaran hasil pertanian, maka dapat untuk meningkatkan kapasitas produksi aneka komoditas pertanian bagi pemenuhan kebutuhan pasar nasional dan internasional.

Peningkatan pengetahuan dan keterampilan pertanian juga dapat dilakukan melalui penempatan tenaga kerja pertanian terlatih di daerah yang masih kurang penduduknya dan penyediaan fasilitas pertanian lainnya berupa faktor produksi, bimbingan teknologi serta pemberian jaminan pasar yang baik.

Secara kuantitatif tenaga kerja untuk sub sektor tanaman pangan tersedia di perdesaan, namun ada kecenderungan terus menurun dengan indikasi semakin berkurangnya minat generasi muda di perdesaan untuk bekerja di sub sektor pertanian tanaman pangan. Demikian pula dari sisi kualitas Sumberdaya Manusia tenaga kerja ini masih sangat kurang, hal ini harus menjadi perhatian pemerintah untuk dapat mengupayakan secara berkelanjutan penyediaan SDM Pertanian tanaman pangan yang berkualitas. Jumlah tenaga kerja untuk sub sektor tanaman pangan lebih dari cukup, apalagi terdapat limpahan tenaga kerja ke sub sektor tanaman pangan akibat melambatnya pertumbuhan sektor industri. Dengan demikian pemanfaatan tenaga kerja yang tersedia secara optimal merupakan peluang untuk meningkatkan pembangunan tanaman pangan.

1.3.1.5. Pasar

Daya beli masyarakat yang terus meningkat serta jumlah penduduk Indonesia yang sangat besar merupakan pasar dalam negeri yang sangat potensial bagi produk-produk pertanian yang dihasilkan petani. Jumlah penduduk Indonesia pada semester I tahun 2025 mencapai sekitar 286,69 juta jiwa, dengan mayoritas (55,89%) terkonsentrasi di Pulau Jawa, dan jumlah laki-laki sedikit lebih banyak dari perempuan. Data yang dirilis oleh Ditjen Dukcapil ini menunjukkan pertumbuhan sekitar 1,7% dari akhir 2024, dan menjadi dasar perencanaan

pembangunan nasional termasuk sektor pertanian khususnya tanaman pangan.

Saat ini, tingkat konsumsi aneka produk hasil pertanian Indonesia, kecuali beras, gula dan minyak goreng, masih relatif rendah. Rendahnya tingkat konsumsi produk pertanian ini, terutama disebabkan masih rendahnya tingkat pendapatan per kapita penduduk Indonesia sehingga mempengaruhi daya beli. Seiring dengan keberhasilan pembangunan ekonomi yang saat ini tengah giat dijalankan, maka pendapatan per kapita penduduk juga akan meningkat. Peningkatan pendapatan di satu sisi, maka dapat terjadi peningkatan permintaan produk termasuk pertanian tanaman pangan di sisi lain. Permintaan pasar domestik, di samping jumlahnya yang semakin meningkat, juga membutuhkan keragaman produk yang bervariasi, sehingga akan membuka peluang yang lebih besar terhadap diversifikasi produk.

Subsektor tanaman pangan mencatatkan pertumbuhan yang sangat tinggi, tumbuh 42,62% pada kuartal I tahun 2025, didorong oleh peningkatan produksi beras dan jagung. Pangsa pasar komoditas tanaman pangan di Indonesia didominasi secara signifikan oleh beras (padi), diikuti oleh jagung dan komoditas palawija lainnya (kedelai, ubi kayu, ubi jalar, kacang-kacangan). Sektor ini merupakan pilar ketahanan pangan nasional dengan konsumsi beras mencapai 98,92% rumah tangga di Indonesia. Produksi beras nasional diproyeksikan meningkat signifikan, dengan estimasi mencapai 33,8 juta hingga 34,71 juta ton pada tahun 2025, yang mendorong target swasembada pangan, sementara total kebutuhan beras konsumsi rakyat Indonesia diperkirakan mencapai lebih dari 31 juta ton per tahun.

Jagung menempati posisi kedua terpenting setelah padi, terutama untuk kebutuhan pakan ternak (*feed mills*) dan industri makanan. Produksi jagung menunjukkan tren meningkat, dengan proyeksi mencapai 15,21 juta ton pada akhir 2024 (kadar air 14%), naik dari tahun sebelumnya. Jagung memiliki nilai Location Quotient (LQ) > 1, menunjukkan bahwa jagung adalah komoditas sektor basis (unggulan) yang memiliki konsentrasi tinggi, keunggulan komparatif, dan mampu memenuhi kebutuhan wilayah sendiri hingga mengekspor surplus ke luar. Sektor ini berperan lebih besar di daerah dibandingkan kontribusinya di tingkat nasional.

Pangsa pasar internasional untuk komoditas tanaman pangan pada 2024-2025 menunjukkan dinamika yang tinggi, didorong oleh peningkatan permintaan global, pemulihan pasca-pandemi, dan pergeseran fokus pada keamanan pangan. Sektor pertanian global, khususnya biji-bijian (*cereals*) dan produk nabati, tetap menjadi pilar penting perdagangan internasional. Perdagangan internasional beras diproyeksikan tumbuh 1,4% pada 2025, mencapai rekor tertinggi 60,5 juta ton, terutama didorong oleh permintaan kuat dari Afrika dan peningkatan ekspor dari India serta Amerika Selatan. India, Thailand, dan Vietnam tetap menjadi pemain dominan.

Secara keseluruhan, pasar internasional komoditas tanaman pangan di 2025 menunjukkan permintaan yang tinggi namun dengan standar kualitas dan keberlanjutan yang lebih ketat, menuntut negara berkembang seperti Indonesia untuk melakukan hilirisasi dan peningkatan kualitas produk. Ekspor pertanian Indonesia (termasuk tanaman pangan, perkebunan, dan hortikultura) menunjukkan tren positif. Pada Januari - Agustus 2025, nilai ekspor pertanian meningkat signifikan (38,25%) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Indonesia berfokus pada ekspor kopi, kakao, rempah-rempah

(cengkeh 60% dan pala 30% dunia), minyak kelapa sawit, dan karet.

Namun demikian, penurunan dan penghapusan tarif secara signifikan yang dilakukan oleh pemerintah akan mengakibatkan semakin banyaknya produk impor masuk ke Indonesia. Kondisi inilah yang cukup mengkhawatirkan karena berpengaruh pada eksistensi produk lokal, peningkatan daya saing produk lokal sangat diperlukan menghadapi pasar bebas, diantaranya:

- 1) Meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas produksi,
 - 2) Menciptakan iklim usaha yang kondusif dalam rangka meningkatkan daya saing,
 - 3) Memperluas jaringan pemasaran, serta
 - 4) Meningkatkan kemampuan dalam penguasaan teknologi informasi dan komunikasi termasuk promosi pemasaran.
- Selain itu, rasa nasionalisme bangsa Indonesia perlu ditingkatkan sehingga meningkatkan kecintaan terhadap produk dalam negeri. Bila perbaikan ini dilakukan oleh pemerintah dan pihak-pihak terkait lainnya, maka akan mampu memberikan peluang bagi industri manufaktur Indonesia untuk memasarkan produknya dan mampu bersaing dengan produk-produk impor baik didalam negeri maupun ekspor ke luar negeri.

1.3.2. Permasalahan

Fenomena global yang saat ini sedang terjadi adalah krisis pangan dunia. Berdasarkan data yang dirilis Global Report on Food Crises (GRFC) tahun 2024, secara garis besar terdapat 3 (tiga) faktor yang menyebabkan terjadinya krisis pangan.



Gambar 2. Penyebab Krisis Pangan Global (Sumber: GRFC, 2024)

Menurut GRFC 2024, cuaca ekstrem menjadi penyebab utama kerawanan pangan akut di Bangladesh, Pakistan dan Timor Leste yang dampaknya pada 35,8 juta orang. Di Myanmar, konflik dan instabilitas keamanan menjadi faktor penyebab kerawanan pangan. Sebanyak 14,4 juta orang atau seperempat populasi menghadapi kerawanan pangan akut sepanjang September hingga Oktober 2024. Bagi Afghanistan, guncangan ekonomi menjadi penyebab utama kerawanan pangan akut yang berdampak pada 15,8 juta orang.



Gambar 3. Krisis Pangan Dunia (Sumber: Diolah oleh Kementerian Pertanian)

Kelangkaan pangan mengakibatkan terbatasnya akses masyarakat terhadap pangan, dan berdampak signifikan terhadap kecukupan gizi masyarakat. Dampak langsung yang dimaksud seperti penurunan asupan energi dan nutrisi asal pangan yang mendorong peningkatan malnutrisi masyarakat. Berdasarkan data yang dirilis *Food and Agriculture Organization* (FAO) tahun 2023, sebanyak 757 juta penduduk dunia kekurangan gizi. Pada tahun 2024, menurut *The State of Food and Nutrition In The World 2025*, jumlah angka kekurangan gizi masyarakat dunia menurun sebesar 720 juta atau sekitar 8,2% sampai dengan 8,5% dibanding tahun sebelumnya. Regional Asia menjadi kontributor teratas diikuti oleh Regional Afrika dengan detail sebagai berikut.

1. Asia sebanyak 384 juta jiwa.
2. Afrika sebanyak 298.
3. Amerika Latin dan Karibia sebanyak 41 juta jiwa.
4. Oseania dan lainnya <10 juta jiwa.

Krisis pangan tersebut memicu terjadinya konflik sosial dan politik. Hal tersebut diperparah dengan kondisi geopolitik di berbagai belahan dunia yang belum kondusif, kondisi iklim global yang penuh ketidakpastian hingga kebijakan ekspor negara pengekspor pangan untuk proteksi lokal menjadi kombinasi yang menyebabkan tingginya inflasi pangan. Tingginya inflasi pangan menyebabkan terbatasnya akses masyarakat, baik secara kuantitas maupun akses terhadap pangan yang berkualitas. Hambatan terhadap akses pangan berkualitas meningkatkan risiko terjadinya malnutrisi bagi masyarakat.

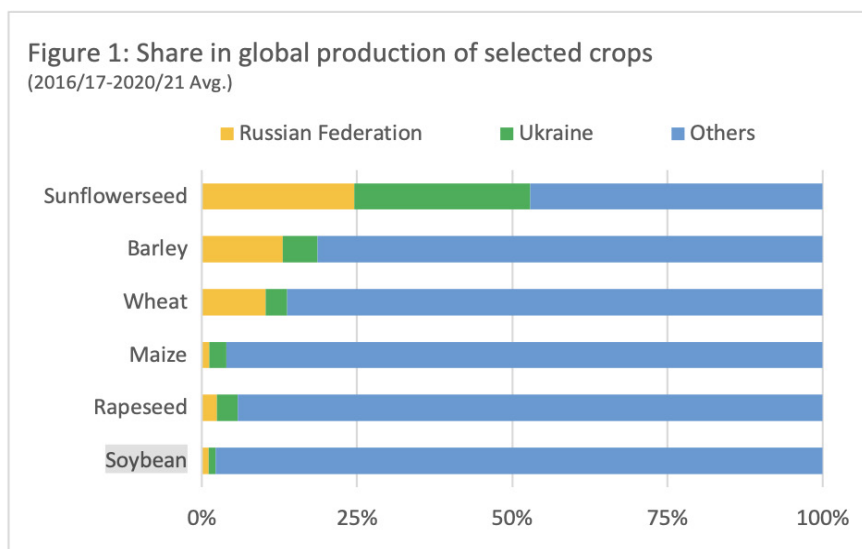
1.1.1.1. KONFLIK KAWASAN DAN KETIDAKPASTIAN GLOBAL

Pangan merupakan kebutuhan dasar bagi setiap negara yang wajib dipenuhi sesuai kondisi dan kebutuhan di negara

tersebut. Pemenuhan bukan hanya sekedar kuantitas namun juga mencakup kualitas pangan. Kuantitas yang berarti ketersediaan akan memberikan jaminan stabilitas sementara kualitas pangan berbicara mengenai peningkatan mutu pangan yang berdampak pada kesehatan masyarakat. Stabilitas pangan sebuah negara merupakan salah satu barometer kekuatan ekonomi sebuah negara. Stabilitas rantai pasok global dipengaruhi oleh banyak hal, salah satunya adalah kondisi politik global dimana saat ini, di beberapa wilayah, kondisi politik yang tidak kondusif menjadi tantangan dalam menjaga stabilitas rantai pasok global.

Menurut FAO, perang yang dimulai pada 24 Februari 2022 telah menyebabkan buruknya krisis pangan global. Sebelum perang Ukraina, harga pangan internasional telah mencapai titik tertinggi sepanjang masa karena kondisi pasar, tingginya harga energi dan jasa pertanian lainnya. Pada Februari 2022, indeks harga pangan FAO mencapai rekor terbaru dalam sejarah dengan 21% lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya. Hal tersebut dikarenakan keduanya merupakan salah satu pemain utama dalam perdagangan pangan global.

Rusia dan Ukraina berkontribusi terhadap 30% ekspor gandum dan 15% ekspor jagung global. Pada tahun 2020, Rusia menduduki peringkat teratas dalam eksportir pupuk nitrogen, pemasok kalium kedua dan eksportir pupuk fosfor terbesar ketiga. Pupuk sebagai prasarana pertanian atau faktor produksi pertanian berpengaruh langsung terhadap biaya produksi yang pada akhirnya membentuk harga jual pertanian. Peningkatan harga tanpa diimbangi peningkatan daya beli menghasilkan ketidakseimbangan antara pasokan dan permintaan. Secara akumulatif, konflik yang mengganggu rute internasional dan menghambat rantai pasok dan peningkatan harga pupuk mendorong peningkatan harga pangan dunia.



Gambar 4. Pangsa Pasar Beberapa Komoditas Rusia dan Ukraina
Pada Pasar Perdagangan Pangan Global
(Sumber: FAO XCBS system)

Hampir 50 negara di dunia bergantung pada Rusia dan Ukraina untuk setidaknya memenuhi 30% kebutuhan impor gandum. Dari jumlah tersebut, 26 negara diantaranya merupakan importir dengan persentase lebih dari 50% untuk memenuhi kebutuhan pangan di negaranya. Tercatat BBC Indonesia pada pertengahan Juli 2023, harga gandum di bursa saham Eropa melonjak sebesar 8,2% dibandingkan hari sebelumnya menjadi sekitar Rp4,2 juta (£219.78) per ton, sementara harga jagung naik 5,4%. Konflik tersebut memiliki implikasi terhadap pasar pangan global dan menjadi tantangan pangan bagi banyak negara.

Berdasarkan Global Report on Food Crises 2025 yang dirilis oleh Global Network Against Food Crises, beberapa jenis konflik yang terjadi di berbagai belahan dunia turut memicu terjadinya krisis pangan global. Berikut beberapa konflik yang dimaksud.

- **Konflik Afrika Timur (Sudan, Sudan Selatan, Ethiopia, Somalia dan Djibouti)**

Konflik bersenjata di Sudan merusak sistem produksi dan distribusi pangan yang mendorong peningkatan harga biji-bijian hingga 6 kali dibanding kondisi sebelum perang. Ketegangan yang terjadi di Laut Merah memperlambat aktivitas pelabuhan Djibouti sehingga menghambat impor pangan ke wilayah Afrika Timur sehingga inflasi tinggi. Konflik di wilayah Somalia dan Ethiopia mendorong kenaikan harga pangan hingga 50% di wilayah defisit pangan.

- **Konflik Afrika Barat (Mali, Niger, Burkina Faso, Nigeria dan Chad)**

Konflik dan kondisi yang tidak aman di wilayah perbatasan menghambat arus perdagangan komoditas, termasuk komoditas pangan. Dampaknya adalah gangguan distribusi antar negara yang menghambat pasokan jagung dan meningkatkan harga pangan secara signifikan di wilayah pedalaman karena akses pasar terputus.

- **Konflik Timur Tengah (Palestina, Yaman, Suriah)**

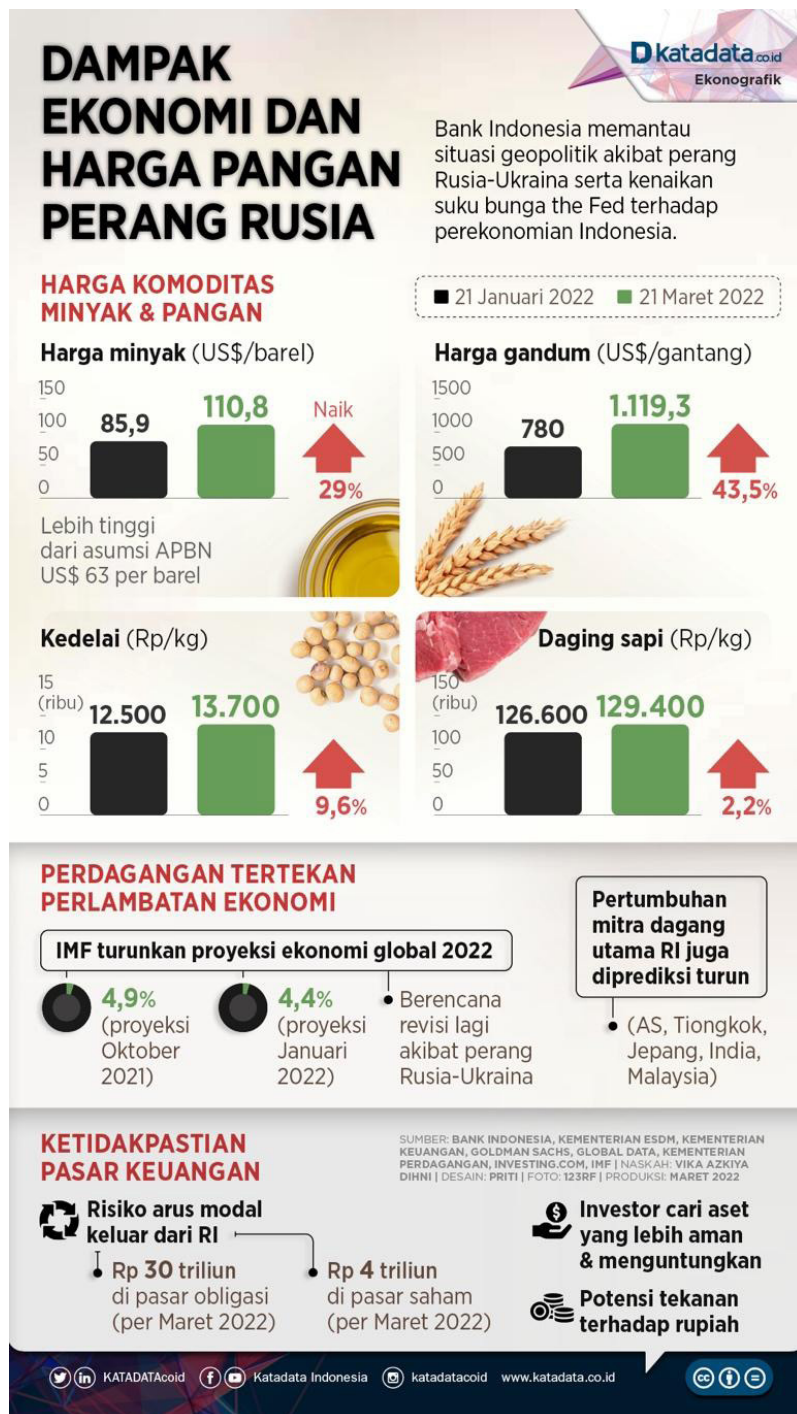
Konflik yang terjadi di Gaza, Palestina akibat blokade dan serangan udara menghancurkan infrastruktur logistik dan bantuan kemanusiaan. Akibatnya, 100% populasi di wilayah tersebut mengalami krisis pangan akut. Sementara konflik berkepanjangan yang terjadi di Yaman memutus jalur perdagangan dan memperburuk inflasi pangan.

- **Konflik Asia Tenggara (Myanmar)**

Gejolak politik di Asia Tenggara terjadi di Myanmar. Pada tahun 2021 terjadi kudeta militer yang memperburuk krisis pangan. Perdagangan dan rantai pasok pertanian

terhambat oleh pertempuran yang terjadi. Dampaknya yaitu terjadi penurunan produksi beras dan meningkatnya inflasi.

Secara umum, konflik yang terjadi di beberapa wilayah berdampak signifikan pada wilayah tersebut. Namun beberapa diantaranya turut mendorong ketidakpastian global karena beberapa wilayah merupakan eksportir gandum dan pupuk dunia. Selain itu, beberapa negara juga menjadi jalur transit utama perdagangan dunia sehingga gangguan di beberapa negara tersebut menghambat lalu lintas perdagangan, termasuk komoditas pangan.



Bagi Indonesia sendiri, konflik kedua negara memberikan dampak terhadap kondisi pangan nasional. Ukraina merupakan pengeksportir gandum terbesar pada tahun 2018/2019. Namun eskalasi konflik mendorong pemerintah Indonesia melakukan mitigasi dengan mencari sumber alternatif dengan pendekatan geografis. Per tahun 2021/2022 Indonesia berpaling kepada Australia sebagai pemasok gandum terbesar sementara pada tahun 2022/2023 Ukraina tidak lagi menjadi pemasok terbesar dan hanya menempati urutan ke 4 (empat) untuk eksportir gandum nasional. Disisi lain, Indonesia memiliki peluang untuk melakukan diversifikasi pangan untuk mengurangi ketergantungan pada beras sebagai pangan utama nasional. Peluang tersebut cukup realistis mengingat dorongan budaya dan sejarah di beberapa wilayah di Indonesia yang mengonsumsi produk non-beras sebagai pangan utama.

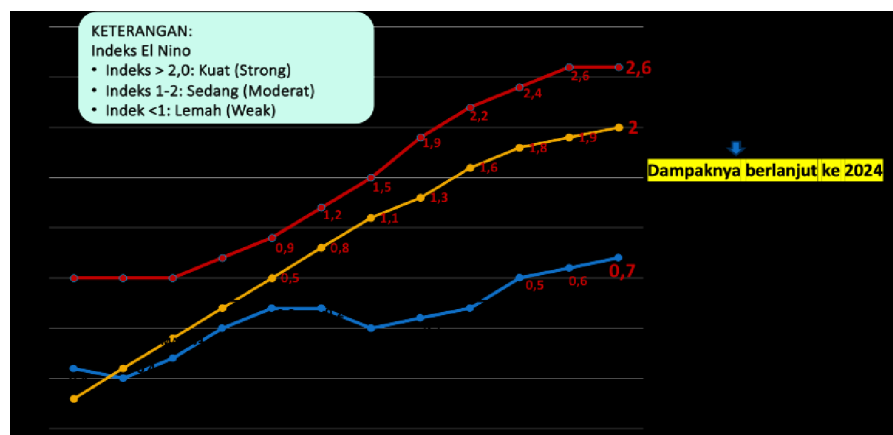
1.1.1.2. PERUBAHAN IKLIM GLOBAL

Berdasarkan *The State of Food Security and Nutrition in the World 2024* yang dirilis FAO, teridentifikasi 2 (dua) faktor yang mengganggu sistem pangan global, yaitu perubahan iklim dan cuaca ekstrem. Perubahan iklim berdampak pada produktivitas, pola tanam dan ekosistem pangan yang menyebabkan gangguan produksi dan distribusi. Pada akhirnya, harga pangan akan terkoreksi. Salah satu dampak perubahan iklim dan cuaca ekstrem adalah peristiwa La Niña dan El Niño.

Menurut FAO, dunia mengalami peristiwa La Niña yang ketiga berturut-turut pada tahun 2022 dan awal 2023. Sebuah kejadian langka yang hanya terjadi 2 (dua) kali sekali sejak 1950. Peristiwa tersebut dikaitkan dengan kondisi yang lebih basah di Australia dan lebih kering di USA, Amerika Selatan dan Afrika Timur. Australia mengalami banjir besar dimana

produksi gandum juga meningkat pada tahun 2021 dan 2022 sementara kekeringan terjadi di USA, negara Asia Timur. Di Afrika Timur, produksi sereal memburuk dan beberapa negara mengalami kegagalan panen pada kuartal pertama 2022.

Peristiwa La Niña resmi berakhir pada Maret 2023. Prakiraan cuaca menunjukkan adanya transisi kondisi ke El Niño pada kuartal kedua tahun 2023. Pola terbalik terjadi dengan El Niña dimana negara Afrika Timur dan Asia Timur lebih basah sementara Afrika Barat, Afrika Selatan, India, Asia Tenggara, Australia dan Wilayah utara Amerika Selatan dan Amerika Tengah lebih basah. Indonesia merupakan salah satu negara yang terkena dampak perubahan iklim yang mengganggu produksi pangan nasional.



Gambar 6. Tren El-Nino 2013, 2014 dan 2023 (Sumber: Kementerian Pertanian)

Kondisi Indonesia menurut Indonesia Country Report 2023 yang dirilis oleh World Food Program (WFP), pada pertengahan 2023, kondisi El Niño mengakibatkan kondisi kekeringan ekstrem. Berdasarkan data yang dirilis Kementerian Pertanian, El Niño yang terjadi pada tahun 2023 termasuk kategori “Moderat” namun sudah mendekati batas kategori “Kuat.” Curah hujan

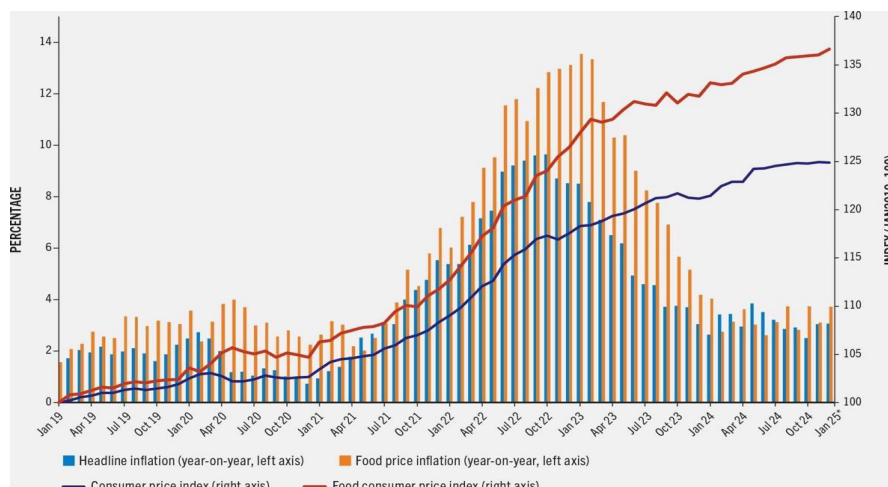
di bawah rata-rata dalam jangka panjang mengakibatkan gagal panen dan beberapa daerah mengalami kekeringan. Kondisi gagal panen yang mengganggu pasokan dapat memicu terjadinya inflasi pangan. Seperti diketahui bahwa inflasi pangan berpengaruh signifikan terhadap perekonomian nasional. Intervensi pemerintah diperlukan untuk menjaga stabilitas pasokan pangan dan menjaga daya beli masyarakat dengan program-program terukur.

1.1.1.3. INFLASI PANGAN

Berdasarkan The State of Food Security and Nutrition in the World 2024 (SOFI 2024), kenaikan harga pangan global meningkat tajam sejak tahun 2020 dan tetap tinggi hingga 2023 - 2024. Kombinasi faktor global seperti konflik kawasan, gangguan iklim, kenaikan biaya produksi, gangguan rantai pasok menjadi faktor yang memengaruhi meningkatnya laju inflasi pangan global. Konflik kawasan di beberapa wilayah seperti Sudan, Gaza, Yaman hingga Myanmar mengganggu produksi hingga jaringan pasokan. Konflik yang mendorong melonjaknya biaya transportasi dan pasokan pangan yang menurun mendorong peningkatan harga komoditas pangan strategis yang dampaknya dirasakan hingga negara importir.

Gangguan cuaca seperti fenomena El Niño periode 2023–2024 di Asia Tenggara dan Afrika Timur serta Banjir di Asia Selatan mengganggu produksi beras, jagung dan gandum. Harga meningkat lebih dari 20% di tahun 2023 diperparah dengan larangan ekspor beberapa negara produsen pangan global seperti India untuk melindungi dan memastikan ketersediaan pasokan pangan dalam negeri. Ketidakpastian iklim meningkatkan ketidakpastian hasil panen sehingga kontrol terhadap stabilitas harga pangan global sulit dilakukan.

Faktor-faktor tersebut mendorong terjadinya inflasi pangan yang membuat harga pangan bergejolak.



Gambar 7. Inflasi Pangan Sejak Tahun 2020 (Sumber: FAO)

Berdasarkan data yang dirilis oleh FAO, sejak akhir tahun 2020 harga pangan domestik telah meningkat signifikan di sebagian besar negara. Rata-rata lonjakan inflasi dari tahun ke tahun sebesar 5,8% pada Desember 2020 menjadi 23,3% pada Desember 2022. Angka tersebut dipengaruhi oleh beberapa negara yang mengalami hiperinflasi seperti Lebanon, Sudan Selatan, Bolivia, Venezuela, dan Zimbabwe. Akibatnya, rata-rata inflasi pangan global meningkat tajam dari 2,3% pada Desember 2020 menjadi 13,6% pada Januari 2023.

Inflasi pangan di Indonesia menurut Badan Pusat Statistik (BPS) di akhir tahun 2024 sebesar 0,12%. Jika dibandingkan dengan inflasi tahun 2023 sebesar 6,73% dan 5,61% pada tahun 2022. Namun jika dibandingkan dengan rata-rata kenaikan Upah Minimum tahun 2022 sebesar 1,09% membuat tantangan menjadi semakin berat karena kenaikan upah minimum tidak mengimbangi inflasi pangan sehingga

mengganggu akses masyarakat terhadap pangan pada tahun 2022. Kondisi membaik pada tahun 2023 dimana rata-rata kenaikan upah minimum sebesar 7,26% (2023 terhadap 2022) dan 3,6% (2024 terhadap 2023) merupakan sinyal positif bagi ketahanan pangan nasional.

Bagi Indonesia sendiri, tantangan ke depan tidak hanya dilihat dari sudut pandang pendapatan namun bagaimana mengendalikan harga pangan. Karakteristik Indonesia sebagai negara kepulauan menjadi tantangan dalam distribusi pangan. Hubungan dua arah antara distribusi dan inflasi dimana ketika terjadi kesulitan distribusi pangan ke pasar yang menyebabkan penurunan pasokan sementara permintaan tetap, maka harga akan meningkat karena adanya kesenjangan antara pasokan dan permintaan.

1.1.1.4. PENANGANAN STUNTING DI INDONESIA

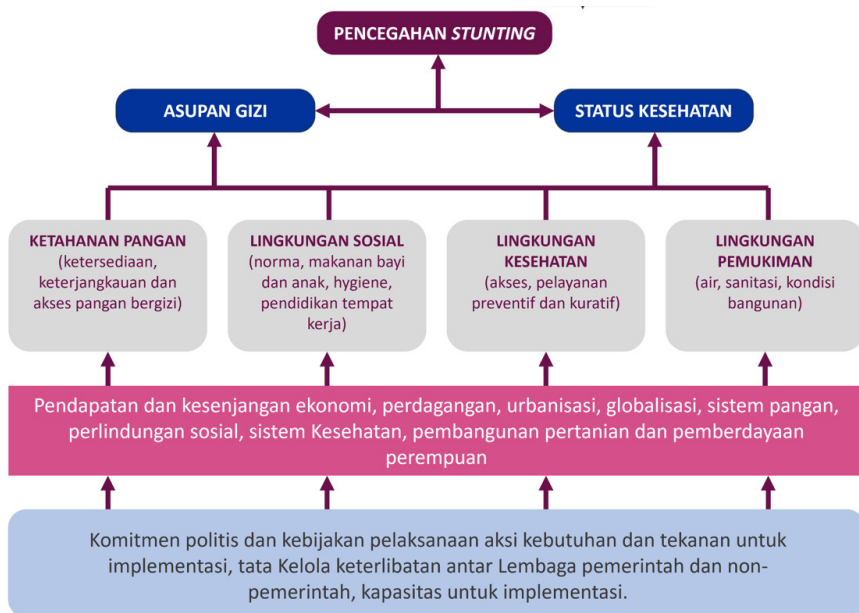
Dampak krisis pangan juga dirasakan di Indonesia. Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik sebanyak 6,5% masyarakat Indonesia masuk kategori kerawanan sedang atau berat. Dapat diartikan bahwa sebanyak 6,5% populasi masyarakat Indonesia berpotensi mengalami kekurangan gizi. Dalam rangka mewujudkan Indonesia Emas 2045, kualitas SDM merupakan salah satu faktor penting yang menjadi perhatian utama. Kekurangan gizi dapat mendorong terjadinya stunting.



Gambar 8. Stunting di Indonesia Tahun 2024

Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2024, angka stunting Indonesia berada di angka 19,8%. Tren dalam

5 (lima) tahun terakhir, kinerja stunting selalu membaik yang dibuktikan dengan penurunan persentase mendekati 10%. Pemerintah menyadari bahwa mutu pangan salah satu solusi terhadap permasalahan nasional yaitu pencegahan stunting. Menurut WHO (2015), stunting merupakan gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar. Dampak stunting sendiri terbagi menjadi 2 (dua) yaitu dampak kesehatan dan dampak ekonomi. Mencegah stunting berarti Indonesia menyiapkan generasi masa depan yang lebih berkualitas. Pangan bermutu tidak hanya perlu disediakan sesuai kebutuhan namun harus dapat diakses dengan efektif dan efisien oleh masyarakat yang membutuhkan.



Gambar 9. Solusi Permasalahan Stunting (Sumber: <https://dashboard.stunting.go.id>)

Saat ini Indonesia memiliki program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program MBG diselenggarakan di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil. Program yang bertujuan untuk menyediakan makan bergizi dan susu kepada anak-anak sekolah secara cuma-cuma. Berdasarkan RPJMN 2025 – 2029, Asupan gizi yang cukup merupakan aspek fundamental bagi pembentukan modal manusia. Namun demikian, keterbatasan akses kepada asupan gizi yang cukup dan keberagaman bahan pangan serta pemahaman masyarakat menyebabkan berbagai permasalahan gizi. Program hasil terbaik cepat memberikan makan bergizi gratis untuk siswa, santri, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita memiliki daya ungkit tinggi terhadap pembangunan modal manusia. Program ini memiliki tujuan utama untuk membangun generasi sehat, cerdas, dan produktif menuju Indonesia Emas tahun 2045.



Gambar 10. Presiden Prabowo Memantau Makan Bergizi Gratis
(Sumber: Pontianak Post)

Program tersebut akan mendorong lonjakan permintaan bahan pangan yang tinggi di setiap daerah yang berkorelasi dengan

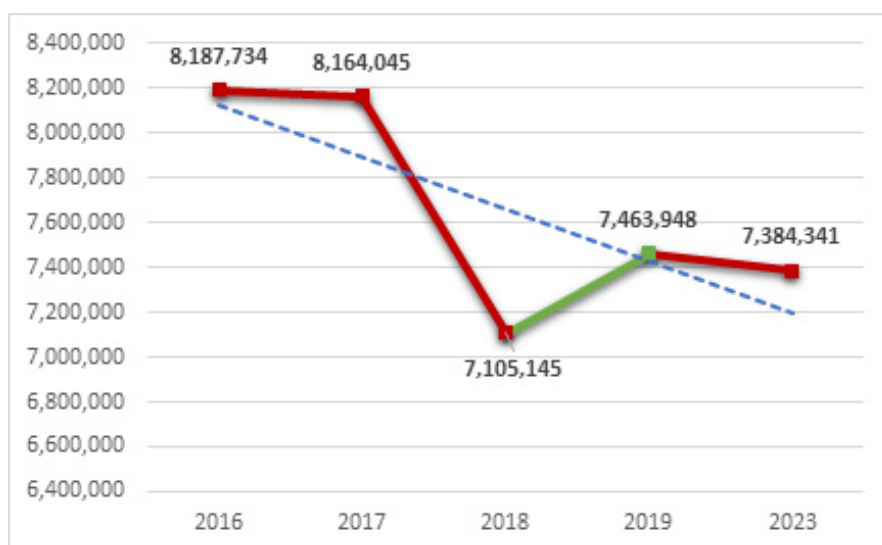
kebutuhan peningkatan produksi pangan asal pertanian bergizi seperti beras biofortifikasi. Tantangan terkait hal tersebut adalah peningkatan kapasitas produksi padi dalam negeri sehingga dapat memenuhi kebutuhan lonjakan. Disisi lain, terbukanya potensi untuk meningkatkan kualitas varietas tanaman pangan sehingga dapat menghasilkan komoditas yang lebih bermutu di masa mendatang.

Kementerian Pertanian sebagai leading sector penyediaan pangan nasional perlu menjawab kedua tantangan kuantitas dan kualitas. Dari sudut pandang kuantitas dimana peningkatan produksi perlu dilakukan menyesuaikan kebutuhan pangan nasional memiliki tantangan tersendiri. Faktor produksi yang kontraproduktif seperti alih fungsi lahan yang menyebabkan keterbatasan area tanam, akses pengairan untuk lahan tanaman pangan, perubahan iklim global yang memengaruhi metode tanam hingga terancamnya panen secara masif, serta regenerasi petani, khususnya petani tanaman pangan.

Penyediaan pangan berkualitas merupakan tantangan dengan tingkat kesulitan berbeda. Selain tantangan kuantitas, paradigma kualitas tanaman pangan mendorong Indonesia memasuki babak baru yang membutuhkan upaya yang tidak sedikit dan keberanian untuk berinvestasi. Peningkatan kualitas berarti penyesuaian metode, adaptasi teknologi dan inovasi dalam sistem penyelenggaraan pangan nasional. Untuk dapat mewujudkan hal tersebut, diperlukan upaya koordinatif antar pemangku kepentingan seperti Lembaga Negara baik di tingkat Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Penelitian dan Pengembangan hingga masyarakat. Sinergi antar pemangku kepentingan diharapkan dapat menciptakan solusi yang komprehensif, tidak hanya pada tataran kebijakan perencanaan namun implementasi di lapangan.

1.1.1.5. PENAMBAHAN LUAS PANEN TANAMAN PANGAN

Penambahan luas panen tanaman pangan merupakan salah satu prioritas nasional yang tertuang dalam RPJMN 2025 – 2029. Target penambahan luas panen tanaman pangan sebesar 4 juta hektar merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional. Untuk mewujudkan target tersebut, terdapat 2 (dua) upaya yang dapat dilakukan: 1). Upaya intensifikasi terutama diarahkan untuk meningkatkan indeks pertanaman (IP) dan produktivitas tanaman pangan; 2). Upaya ekstensifikasi diarahkan untuk penambahan lahan pangan baru, dengan memperhatikan kesesuaian sumber daya alam, ketersediaan sumber daya manusia, sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup setempat secara berkelanjutan.

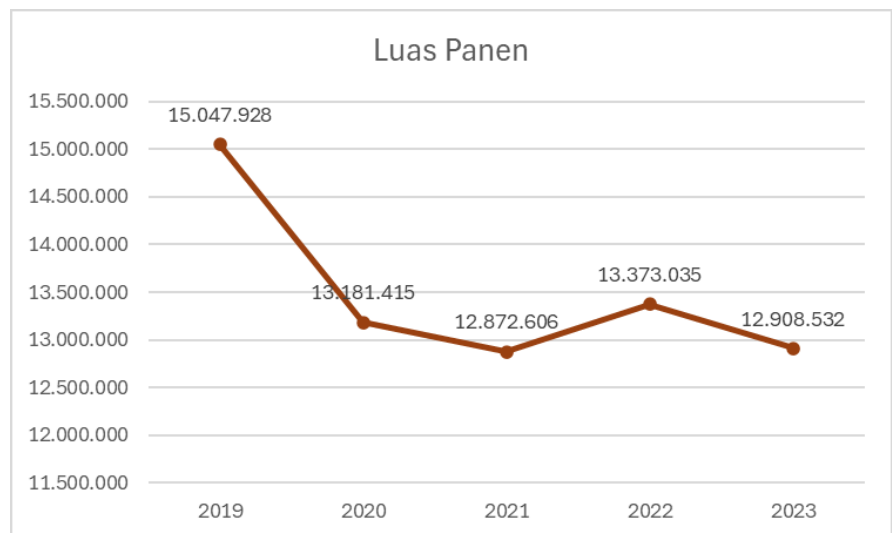


Gambar 11. Luas Lahan Sawah (Sumber: Statistik Pertanian 2024)

Berdasarkan gambar di atas, tren luas lahan sawah mengalami penurunan. Berdasarkan data Statistik Pertanian tahun 2024, luas lahan sawah periode 2016 – 2023 mengalami penurunan sebesar 1,07%. Luas baku sawah (LBS) merupakan infrastruktur

dasar yang wajib terpenuhi untuk mendorong peningkatan luas tanam. Tantangan bagi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan adalah menghentikan penurunan LBS tersebut.

Peningkatan alih fungsi lahan dan persaingan antar komoditas menjadi salah satu kendala dalam pencapaian target peningkatan luas panen tanaman pangan. Alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian perlu ditekan untuk menjamin ketersediaan lahan. Persaingan antar komoditas tanaman pangan yang mendorong peralihan jenis komoditas yang ditanam dapat mengganggu pemenuhan target produksi nasional, mengingat dalam satu lahan yang sama, dapat ditanam lebih dari satu jenis komoditas tanaman pangan.



Gambar 12. Luas Panen Tanaman Pangan
(Sumber: Data Olahan dari Statistik Pertanian 2024)

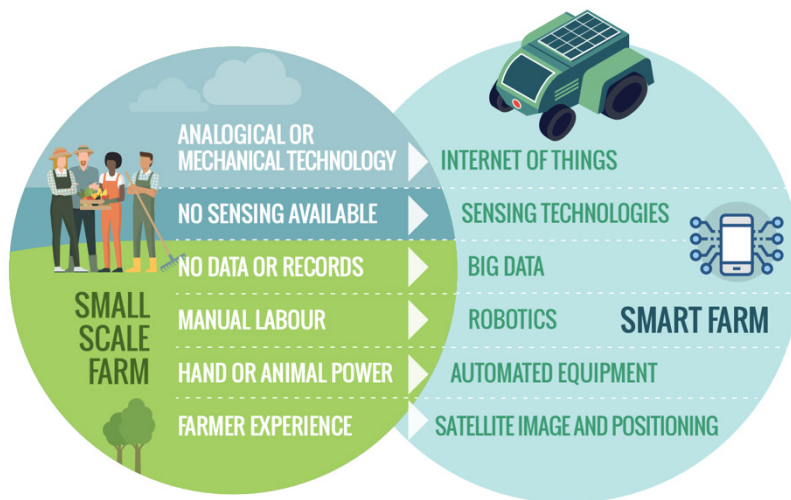
Data di atas adalah data olahan yang bersumber dari Statistik Pertanian tahun 2024. Data yang disajikan berupa agregat luas panen komoditas padi, jagung dan kedelai periode 2019 – 2023. Pertumbuhan negatif terjadi pada luas panen komoditas padi sebesar -2,29% dan jagung sebesar -10,43% sementara

pertumbuhan positif terjadi pada luas panen komoditas kedelai sebesar 40,22%. Meskipun luas panen kedelai tumbuh positif, namun kedelai merupakan kontributor terkecil dengan rata-rata komposisi luas panen sebesar 1,47% terhadap total luas panen tanaman pangan. Berbeda dengan padi dengan rata-rata kontribusi sebesar 81,14% dan jagung sebesar 17,39%.

Tantangan lain berupa gangguan cuaca ekstrem dan prioritas petani perlu menjadi perhatian serius. Terjadinya gangguan cuaca ekstrem di beberapa wilayah meningkatkan risiko gagal panen karena sifat gangguan cuaca yang sulit diprediksi sehingga menyebabkan antisipasi dan mitigasi tidak dapat dilakukan tepat waktu. Dampaknya, gagal panen terjadi dan produksi pangan nasional terganggu.

1.1.1.6. PERKEMBANGAN TEKNOLOGI PERTANIAN 4.0

Penyelenggaraan pertanian telah memasuki era Pertanian 4.0. Pemanfaatan teknologi digital, sensor, data otomatisasi meningkatkan efisiensi, produktivitas dan keberlanjutan. Menurut Food and Agriculture Organization (FAO), Pertanian 4.0 mengintegrasikan serangkaian inovasi untuk menghasilkan produk pertanian. Inovasi-inovasi ini mencakup pertanian presisi, Internet of Things (IoT), dan big data untuk mencapai efisiensi produksi yang lebih tinggi. Cepat atau lambat, adopsi penyelenggaraan pertanian 4.0 akan diadopsi dalam penyelenggaraan pertanian nasional.



Gambar 13. Perbandingan Pertanian 4.0 dengan Pendekatan Konvensional

Paradigma Pertanian 4.0 mendorong interaksi antara petani dan mesin sebagai pusat pengelolaan pertanian. Peran petani sebagai pengambil keputusan dan mengoperasikan alat yang saling terhubung dan beroperasi secara otonom berdasarkan informasi yang dimiliki. Perubahan pola pikir dan budaya untuk mengubah peran petani dari seorang operator mesin yang bekerja di lahan pertanian menjadi 'Manajer TIK' yang mengendalikan teknologi pertanian akan menjadi kebutuhan dimasa mendatang. Kebutuhan akan petani terampil tetap dibutuhkan di lahan pertanian namun peran strategis lebih kepada bagaimana dapat memanfaatkan TIK tersebut.

Pertanian dimasa mendatang seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi seharusnya memberikan dampak positif. Pertama, mengoptimalkan efisiensi produksi. Kedua, mengoptimalkan kualitas komoditas pertanian. Ketiga, mengurangi dampak lingkungan. Keempat, menekan risiko produksi. Potensi bagi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ke depan adalah bagaimana mengembangkan praktik pertanian

4.0 karena tuntutan untuk meningkatkan kemampuan produksi terus mengalami lonjakan.

1.3.3. Analisa SWOT

Analisa SWOT dibagi ke dalam dua kategori, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal tersebut meliputi *Strength* (Kekuatan) dan *Weakness* (Kelemahan), sedangkan faktor eksternal meliputi *Opportunities* (Peluang) dan *Threats* (Ancaman). Analisa SWOT Direktorat Jenderal Tanaman Pangan periode tahun 2025 - 2029 adalah sebagai berikut:

1.3.3.1. *Strength* (Kekuatan)

Strength merupakan faktor internal yang menjadi modal dasar dan keunggulan kompetitif dalam pengembangan pertanian tanaman pangan, baik pada kondisi saat ini maupun di masa mendatang. Kekuatan tersebut meliputi aspek sumber daya alam, sumber daya genetik, infrastruktur, kelembagaan, serta dukungan kebijakan.

a. Keanekaragaman Hayati dan Varietas Unggul

Ketersediaan plasma nutfah yang melimpah menjadi kekuatan utama sektor tanaman pangan. Hal ini diperkuat dengan keberhasilan balai-balai penelitian dalam menghasilkan dan merilis varietas unggul berdaya hasil tinggi, adaptif terhadap berbagai kondisi agroekosistem, serta lebih tahan terhadap cekaman iklim dan organisme pengganggu tanaman (misalnya varietas padi Inpari, jagung hibrida, dan kedelai bios)

b. Dukungan Infrastruktur Pertanian yang Memadai

Pembangunan infrastruktur pertanian, khususnya jaringan irigasi seperti bendungan, embung, dan saluran irigasi tersier yang dilakukan secara masif pada periode sebelumnya (2019–2024), telah menjadi aset penting.

Infrastruktur ini siap dioptimalkan untuk meningkatkan indeks pertanaman, produktivitas, dan stabilitas produksi tanaman pangan

c. Potensi Lahan dan Perluasan Areal Tanam

Masih tersedianya Luas Lahan Baku Sawah (LBS) yang signifikan di sentra-sentra produksi utama seperti Jawa, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Selatan menjadi penyangga utama stok pangan nasional. Selain itu, adanya kebijakan Perluasan Areal Tanam Baru (PATB) melalui pemanfaatan lahan tegalan, lahan tidur, lahan perhutani, dan kawasan perhutanan sosial membuka peluang peningkatan produksi secara ekstensif .

d. Kelembagaan Petani

Keberadaan Kelompok Tani (Poktan) dan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) yang sudah terbentuk dan mengakar di tingkat lapangan menjadi kekuatan strategis. Kelembagaan ini mempermudah pelaksanaan program pemerintah, penyaluran bantuan, pendampingan penyuluhan, serta adopsi inovasi teknologi pertanian oleh petani.

e. Kondisi Agroklimat yang Mendukung

Indonesia memiliki kondisi tanah yang subur serta iklim tropis dengan curah hujan yang relatif cukup dan merata sepanjang tahun. Kondisi ini sangat mendukung pertumbuhan tanaman pangan utama seperti padi, jagung, dan kedelai, sehingga memungkinkan kegiatan budidaya dilakukan secara berkelanjutan dan berulang dalam satu tahun tanam.

f. Dukungan Kebijakan dan Regulasi yang Kuat

Pengembangan pertanian tanaman pangan didukung oleh kebijakan nasional yang tertuang dalam RPJMN 2025-2029 serta Renstra Kementerian Pertanian 2025-2029. Dokumen perencanaan ini menjadi dasar hukum yang kuat dan berkelanjutan dalam pelaksanaan program, sehingga memberikan kepastian arah pembangunan sektor tanaman pangan.

g. Dukungan Fiskal Pemerintah

Komitmen pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang konsisten, terutama dalam bentuk subsidi input (pupuk), bantuan benih, bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan), serta program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) menjadi kekuatan penting dalam menjaga keberlanjutan usaha tani dan mengurangi risiko yang dihadapi petani.

1.3.3.2. *Weakness (Kelemahan)* :

Faktor internal yang menghambat kinerja dan perlu intervensi perbaikan.

a. Struktur Demografi Petani dan Regenerasi Tenaga Kerja

Dominasi petani berusia lanjut (> 50 tahun) serta rendahnya minat generasi muda (milenial dan Gen Z) untuk terjun ke sektor pertanian menyebabkan terjadinya krisis regenerasi tenaga kerja. Kondisi ini berpotensi menurunkan keberlanjutan usaha tani dan memperlambat inovasi di sektor pertanian

b. Skala Usaha Gurem dan Keterbatasan Kepemilikan Lahan

Sebagian besar petani memiliki lahan yang sangat sempit (<0,3 hektar) sehingga sulit mencapai skala ekonomi yang

efisien. Fragmentasi lahan ini juga menghambat penerapan mekanisasi modern dan meningkatkan biaya produksi per satuan hasil

c. Kondisi Topografi dan Keterbatasan Mekanisasi

Sebagian lahan pertanian berada di wilayah berbukit atau memiliki kontur yang tidak memungkinkan penggunaan alat dan mesin pertanian (alsintan). Hal ini menyebabkan ketergantungan pada tenaga kerja manual, meningkatkan biaya produksi, dan menurunkan efisiensi usaha tani

d. Rendahnya Penguasaan dan Adopsi Teknologi

Penguasaan teknologi budidaya, panen, pasca panen, pengolahan hasil, serta teknologi informasi masih rendah, terutama di kalangan petani kecil dan wilayah luar Jawa. Kesenjangan digital ini menghambat penerapan smart farming dan inovasi pertanian berbasis teknologi

e. Inefisiensi Rantai Pasok dan Tingginya Kehilangan Hasil

Rantai tata niaga yang panjang, minimnya fasilitas pasca panen (pengeringan dan penyimpanan), serta lemahnya sistem logistik menyebabkan tingginya losses hasil pertanian. Akibatnya, terjadi disparitas harga yang besar antara tingkat produsen dan konsumen

f. Keterbatasan Modal dan Lemahnya Manajemen Usaha

Sebagian besar petani menghadapi keterbatasan akses permodalan serta lemahnya manajemen usaha tani. Kondisi ini menghambat peningkatan skala usaha, investasi teknologi, dan efisiensi produksi secara berkelanjutan

g. Keterbatasan Informasi Pasar

Petani masih memiliki akses yang terbatas terhadap informasi harga, permintaan pasar, dan preferensi

konsumen. Hal ini menyebabkan posisi tawar petani lemah dan menyulitkan penyesuaian pola produksi dengan kebutuhan pasar

- h. Ketergantungan terhadap Bahan Baku Impor
Ketergantungan pada impor pupuk (N, P, K) dan benih tanaman tertentu membuat biaya produksi sangat rentan terhadap fluktuasi harga global dan kebijakan perdagangan internasional
- h. Lemahnya Keterkaitan antara Sektor Pertanian dan Industri
Belum terbangunnya linkage yang kuat antara sektor pertanian dengan industri pengolahan menyebabkan nilai tambah produk pertanian rendah dan investor kurang tertarik menanamkan modal di subsektor tanaman pangan
- i. Dampak Perubahan Iklim dan Ketidakberlanjutan Produksi
Perubahan iklim menyebabkan ketidakpastian musim tanam dan panen, sehingga ketersediaan produk pertanian tidak dapat berlangsung sepanjang tahun dan berisiko menurunkan stabilitas produksi serta pendapatan petani

1.3.3.3. *Opportunities* (Peluang)

Faktor eksternal yang dapat dimanfaatkan untuk pertumbuhan sektor.

- a. Peningkatan Permintaan Produk Tanaman Pangan Domestik dan Global
Kebutuhan produk tanaman pangan terus meningkat, baik untuk konsumsi pangan, pakan ternak, maupun bahan bakar (bioenergi). Pertumbuhan penduduk, perubahan pola konsumsi, serta kebutuhan energi terbarukan membuka peluang pasar yang luas bagi sektor tanaman pangan, baik di dalam negeri maupun luar negeri.

b. Tren Pangan Fungsional, Organik, dan Bernilai Tambah Tinggi

Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap gaya hidup sehat mendorong permintaan terhadap pangan organik, beras khusus (beras merah, hitam), dan tanaman pangan fungsional. Tren ini memberikan peluang bagi petani dan pelaku usaha untuk mengembangkan produk bernilai ekonomi tinggi dengan margin keuntungan yang lebih baik

c. Dukungan Kebijakan Pemerintah dan Pengembangan Kawasan Berbasis Korporasi

Adanya komitmen pemerintah dan masyarakat dalam pengembangan kawasan tanaman pangan berbasis korporasi membuka peluang peningkatan skala usaha, efisiensi produksi, serta penguatan kelembagaan petani. Model korporasi petani juga memperkuat daya saing dan akses pasar

d. Pemanfaatan Revolusi Pertanian 4.0 dan Digitalisasi

Perkembangan teknologi seperti IoT, drone sprayer, big data, blockchain, dan precision farming menjadi peluang besar untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi penggunaan input, serta transparansi rantai pasok. Digitalisasi pertanian juga mendukung pengambilan keputusan berbasis data dan modernisasi sektor pertanian

e. Peluang Hilirisasi dan Pengembangan Bioenergi

Pengembangan industri pengolahan hasil pertanian (tepung, pakan, produk turunan) serta pemanfaatan tanaman pangan sebagai sumber bioenergi (misalnya bioetanol dari jagung atau singkong) memberikan nilai tambah ekonomi dan memperluas diversifikasi usaha pertanian

f. Potensi Pasar Ekspor Komoditas Spesifik

Masih terbukanya peluang ekspor untuk komoditas tertentu seperti porang, ubi jalar, dan jagung ke pasar Asia Timur dan Eropa menjadi kesempatan strategis untuk meningkatkan pendapatan petani dan devisa negara, terutama jika didukung oleh peningkatan kualitas dan standar produk

g. Kerja Sama dengan Perguruan Tinggi dan Stakeholders

Kolaborasi dengan perguruan tinggi, lembaga penelitian, dan stakeholder terkait membuka peluang pengembangan inovasi teknologi, peningkatan kapasitas SDM, serta riset dan pengembangan usaha pertanian yang berkelanjutan dan berbasis ilmu pengetahuan

h. Akses Pembiayaan dan Perlindungan Usaha Pertanian

Tersedianya Kredit Usaha Rakyat (KUR), asuransi pertanian, serta skema pembiayaan hijau (*green financing*) memberikan peluang bagi pelaku usaha tani untuk memperoleh modal, mengurangi risiko gagal panen, dan menerapkan praktik pertanian rendah karbon yang berkelanjutan

1.3.3.4. *Threats* (Ancaman)

a. Perubahan Iklim Ekstrem

Perubahan iklim global meningkatkan frekuensi dan intensitas fenomena cuaca ekstrem seperti El Nino (kekeringan) dan La Nina (banjir). Kondisi ini berdampak langsung pada ketidakpastian musim tanam, penurunan produktivitas, hingga gagal panen. Selain itu, kenaikan muka air laut menyebabkan intrusi air asin (salinitas) pada lahan pertanian pesisir yang menurunkan kesuburan tanah dan hasil produksi

b. Alih Fungsi / Konversi Lahan Pertanian

Laju konversi lahan pertanian produktif menjadi kawasan industri, perumahan, dan infrastruktur non-pertanian terus meningkat. Kondisi ini mengurangi luas lahan tanam secara signifikan dan terjadi lebih cepat dibandingkan upaya pencetakan sawah baru, sehingga mengancam keberlanjutan produksi pangan nasional .

c. Berkurangnya Minat dan Tenaga Kerja Pertanian

Tingginya urbanisasi dan migrasi tenaga kerja usia produktif dari desa ke kota menyebabkan sektor pertanian kekurangan tenaga kerja. Rendahnya minat generasi muda terhadap pertanian memperparah kondisi ini dan berpotensi menghambat regenerasi petani serta keberlanjutan sektor pertanian dalam jangka panjang

d. Ancaman Hama dan Penyakit Tanaman Baru

Perubahan iklim memicu mutasi Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) yang semakin adaptif dan resisten terhadap pestisida konvensional. Hal ini meningkatkan risiko serangan hama dan penyakit tanaman yang sulit dikendalikan, sehingga dapat menurunkan hasil produksi dan meningkatkan biaya pengendalian

e. Ketidakstabilan Geopolitik Global

Konflik geopolitik internasional, perang, serta kebijakan proteksionisme perdagangan dapat mengganggu rantai pasok global, khususnya pupuk dan energi. Dampaknya adalah meningkatnya harga input produksi pertanian dan inflasi biaya usaha tani yang menekan keuntungan petani

f. Perdagangan Bebas dan Produk Impor

Era perdagangan bebas membuka masuknya produk pertanian impor dengan harga lebih murah dan kualitas

bersaing. Kondisi ini menekan daya saing produk pertanian lokal, berpotensi menurunkan harga jual hasil panen petani, dan mengancam keberlanjutan usaha pertanian dalam negeri.

1.3.3.5. Analisis Strategi SWOT

1.3.3.5.1. Strength – Opportunities (SO)

(Strategi Agresif: Memaksimalkan Kekuatan untuk Menangkap Peluang)

a. Optimalisasi Varietas Unggul untuk Memenuhi Peningkatan Permintaan Pangan Domestik dan Global

Ketersediaan plasma nutfah yang beragam serta varietas unggul adaptif dan berdaya hasil tinggi menjadi modal utama untuk menjawab meningkatnya permintaan pangan, baik untuk konsumsi, pakan ternak, maupun bioenergi. Dengan dukungan penelitian dan pelepasan varietas oleh balai penelitian, produksi padi, jagung, dan kedelai dapat ditingkatkan secara berkelanjutan guna menjaga ketahanan pangan nasional sekaligus membuka peluang ekspor komoditas spesifik.

b. Pemanfaatan Infrastruktur Irigasi dan Potensi Lahan untuk Pengembangan Kawasan Tanaman Pangan Berbasis Korporasi

Infrastruktur irigasi yang telah terbangun secara masif serta ketersediaan Lahan Baku Sawah dan peluang Perluasan Areal Tanam Baru dapat dioptimalkan untuk mendukung pengembangan kawasan tanaman pangan berbasis korporasi. Strategi ini memungkinkan peningkatan indeks pertanaman, efisiensi produksi, serta skala usaha yang lebih besar, sehingga daya saing produk tanaman pangan di pasar nasional dan global semakin kuat.

c. Penguatan Kelembagaan Petani dalam Menangkap Tren Pangan Bernilai Tambah Tinggi

Keberadaan Kelompok Tani dan Gapoktan yang telah mengakar menjadi kekuatan strategis untuk mengembangkan pangan fungsional, organik, dan produk khusus seperti beras merah dan beras hitam. Dengan pendampingan dan dukungan kebijakan, kelembagaan petani dapat diarahkan menjadi pelaku usaha yang mampu menghasilkan produk bernilai tambah tinggi, meningkatkan pendapatan petani, serta menjawab perubahan preferensi konsumen terhadap pangan sehat.

d. Penerapan Pertanian Modern Berbasis Digital untuk Meningkatkan Produktivitas dan Efisiensi

Kondisi agroklimat yang mendukung dan dukungan kebijakan pemerintah dapat dipadukan dengan peluang Revolusi Pertanian 4.0 melalui pemanfaatan teknologi digital seperti IoT, drone, dan precision farming. Strategi ini bertujuan meningkatkan efisiensi penggunaan input, produktivitas lahan, serta ketepatan pengambilan keputusan berbasis data, sekaligus mendorong modernisasi sektor tanaman pangan.

e. Pengembangan Hilirisasi dan Bioenergi Berbasis Komoditas Unggulan

Ketersediaan bahan baku tanaman pangan yang berkelanjutan, didukung oleh kebijakan dan anggaran pemerintah, menjadi landasan kuat untuk pengembangan hilirisasi dan industri bioenergi. Jagung, singkong, dan komoditas pangan lainnya dapat dikembangkan sebagai bahan baku industri pengolahan dan bioetanol, sehingga menciptakan nilai tambah ekonomi, diversifikasi usaha, dan lapangan kerja di perdesaan.

f. Peningkatan Ekspor Komoditas Spesifik melalui Standarisasi dan Inovasi Teknologi

Potensi ekspor komoditas seperti jagung, ubi jalar, dan porang dapat dimanfaatkan dengan mengoptimalkan kekuatan sumber daya genetik, lahan, serta dukungan riset. Kolaborasi dengan perguruan tinggi dan stakeholder memungkinkan peningkatan kualitas, pemenuhan standar internasional, dan inovasi pascapanen, sehingga produk tanaman pangan Indonesia mampu bersaing di pasar global.

g. Pemanfaatan Dukungan Fiskal dan Akses Pembiayaan untuk Perluasan dan Keberlanjutan Usaha Tani

Komitmen pemerintah melalui subsidi, bantuan alsintan, AUTP, serta akses KUR dan pembiayaan hijau dapat dimanfaatkan untuk memperkuat permodalan dan mitigasi risiko usaha tani. Strategi ini mendorong petani meningkatkan skala usaha, mengadopsi teknologi ramah lingkungan, serta menjaga keberlanjutan produksi tanaman pangan dalam jangka panjang.

1.3.3.5.2. Strategi *Weakness-Opportunity* (WO) (Turnaround)

- Meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang

Strategi WO diarahkan untuk meminimalkan berbagai kelemahan internal sektor tanaman pangan dengan memanfaatkan peluang eksternal yang tersedia, sehingga kinerja pembangunan tanaman pangan dapat ditingkatkan secara berkelanjutan pada periode Renstra 2025–2029.

a. Transformasi SDM dan Regenerasi Petani Berbasis Teknologi dan Pasar

Digitalisasi pertanian, pemanfaatan smart farming, serta pengembangan usaha tani modern dan berorientasi pasar dapat meningkatkan daya tarik sektor tanaman pangan bagi generasi muda. Program inkubasi agribisnis, startup pertanian, dan petani milenial berbasis teknologi menjadi sarana regenerasi petani sekaligus mendorong inovasi.

b. **Konsolidasi dan Korporatisasi Petani untuk Mengatasi Skala Usaha Gurem**

Penguatan kelembagaan petani melalui korporasi petani, koperasi modern, dan pengelolaan kawasan tanaman pangan terpadu memungkinkan konsolidasi lahan secara manajerial. Strategi ini meningkatkan skala ekonomi, efisiensi produksi, akses pembiayaan, serta daya tawar petani di pasar.

c. **Peningkatan Adopsi Mekanisasi dan Teknologi Tepat Guna**
Pengembangan alsintan spesifik lokasi, teknologi mekanisasi skala kecil, serta precision farming berbasis kondisi lahan menjadi solusi atas kendala topografi. Pendampingan teknologi dan pelatihan petani mempercepat adopsi inovasi dan meningkatkan produktivitas.

d. **Penguatan Rantai Pasok dan Hilirisasi untuk Mengurangi Losses**

Pengembangan infrastruktur pasca panen, sistem logistik terpadu, serta kemitraan dengan industri pengolahan mampu menekan losses dan meningkatkan nilai tambah produk tanaman pangan. Strategi ini juga memperpendek rantai distribusi dan meningkatkan pendapatan petani.

e. **Diversifikasi Produk dan Pengembangan Pangan Bernilai Tinggi**

Diversifikasi produksi ke arah pangan fungsional, organik, dan beras khusus memungkinkan petani memperoleh margin keuntungan yang lebih baik. Dukungan standarisasi mutu, sertifikasi, dan promosi pasar menjadi kunci keberhasilan strategi ini.

f. Digitalisasi Informasi Pasar dan Tata Niaga

Pengembangan sistem informasi pasar berbasis digital memungkinkan petani mengakses data harga, permintaan, dan preferensi konsumen secara real time. Transparansi tata niaga memperkuat posisi tawar petani dan meningkatkan efisiensi distribusi.

g. Optimalisasi Akses Pembiayaan dan Perlindungan Usaha Tani

Integrasi pembiayaan dengan kelembagaan petani dan korporasi tani memperluas akses modal dan investasi teknologi. Asuransi pertanian dan pembiayaan hijau mengurangi risiko gagal panen akibat perubahan iklim dan mendorong praktik pertanian berkelanjutan.

h. Substitusi Impor Input dan Adaptasi Perubahan Iklim

Pengembangan pupuk organik, pupuk hayati, dan benih unggul adaptif iklim mengurangi ketergantungan impor sekaligus meningkatkan ketahanan produksi. Integrasi dengan sistem pertanian rendah karbon dan bioenergi memperkuat keberlanjutan sektor tanaman pangan.

1.3.3.5.3. Strategi *Strength – Threats* (ST) (Diversifikasi)

- Menggunakan Kekuatan untuk Menghindari Ancaman

a. Pengembangan Varietas Unggul Adaptif Iklim untuk Menghadapi Perubahan Iklim Ekstrem

Ketersediaan plasma nutfah dan varietas unggul adaptif (tahan kekeringan, genangan, dan OPT) menjadi instrumen utama untuk mengurangi risiko gagal panen akibat El Nino, La Nina, dan intrusi air laut. Diversifikasi varietas spesifik lokasi memungkinkan produksi tetap stabil meskipun terjadi anomali iklim.

b. Optimalisasi Infrastruktur Irigasi untuk Menekan Risiko Kekeringan dan Banjir

Jaringan bendungan, embung, dan irigasi tersier yang memadai dapat digunakan untuk pengelolaan air secara adaptif, baik pada kondisi kekeringan maupun kelebihan air. Optimalisasi ini mendukung peningkatan indeks pertanaman sekaligus menjaga stabilitas produksi di tengah perubahan iklim ekstrem.

c. Perlindungan dan Optimalisasi Lahan Pertanian untuk Menghadapi Alih Fungsi Lahan

Dengan memperkuat perlindungan LBS di sentra produksi serta mengoptimalkan lahan non-sawah melalui program Perluasan Areal Tanam Baru (PATB), ancaman penyusutan lahan akibat industrialisasi dan urbanisasi dapat ditekan, sehingga keberlanjutan produksi pangan nasional tetap terjaga.

d. Penguatan Kelembagaan Petani untuk Mengatasi Kekurangan Tenaga Kerja Pertanian

Kelembagaan petani yang telah mengakar dapat menjadi sarana pengorganisasian tenaga kerja, peningkatan kapasitas petani, serta adopsi mekanisasi pertanian. Hal ini mampu mengurangi dampak berkurangnya tenaga kerja dan rendahnya minat generasi muda terhadap sektor pertanian.

e. Penerapan Inovasi Teknologi dan Pengendalian OPT Terpadu

Penggunaan varietas tahan OPT, penerapan Pengendalian Hama Terpadu (PHT), serta dukungan kelembagaan dan penyuluhan memungkinkan pengendalian hama yang lebih efektif dan ramah lingkungan, sehingga risiko penurunan produksi akibat OPT dapat diminimalkan.

f. Pemanfaatan Dukungan Kebijakan dan Fiskal untuk Meredam Dampak Geopolitik Global

Subsidi pupuk, bantuan alsintan, serta program asuransi pertanian (AOTP) berperan penting dalam menekan dampak kenaikan harga input akibat gangguan rantai pasok global, sehingga risiko inflasi biaya produksi terhadap petani dapat dikendalikan.

g. Peningkatan Daya Saing Produk Lokal untuk Menghadapi Produk Impor

Produktivitas yang tinggi dan biaya produksi yang lebih efisien akan meningkatkan daya saing produk tanaman pangan lokal di tengah tekanan perdagangan bebas dan produk impor murah, sehingga pendapatan petani dan ketahanan pangan nasional tetap terjaga.

1.3.3.5.4. Strategi Weakness – Threats (WT)

Strategi Bertahan (Defensive): Meminimalkan Kelemahan dan Menghindari Ancaman

a. Penguatan Ketahanan Produksi Tanaman Pangan terhadap Perubahan Iklim

Mengembangkan dan memperluas penerapan teknologi adaptif perubahan iklim, seperti varietas tahan kekeringan/banjir/salinitas, kalender tanam adaptif, sistem peringatan dini iklim, serta pengendalian hama terpadu (PHT). Strategi

ini bertujuan mengurangi kerentanan petani kecil terhadap gagal panen dan fluktuasi produksi akibat cuaca ekstrem.

b. **Konsolidasi dan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan**

Mendorong konsolidasi lahan melalui korporasi petani, kerja sama usaha tani, dan penguatan kelembagaan petani, serta memperkuat perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Upaya ini dilakukan untuk menahan laju konversi lahan sekaligus meningkatkan efisiensi usaha tani pada lahan yang semakin terbatas.

c. **Penguatan Regenerasi Petani untuk Mengantisipasi Krisis Tenaga Kerja Pertanian**

Mendorong program regenerasi petani melalui peningkatan daya tarik pertanian berbasis teknologi, kewirausahaan, dan modernisasi usaha tani. Strategi ini bertujuan menekan dampak kekurangan tenaga kerja pertanian dan menjaga keberlanjutan produksi tanaman pangan dalam jangka panjang.

d. **Penguatan Mekanisasi Selektif untuk Mengatasi Keterbatasan Topografi dan Tenaga Kerja**

Mekanisasi pertanian yang sesuai dengan kondisi lahan sempit dan wilayah berbukit, seperti alsintan skala kecil dan multifungsi. Pendekatan ini bertujuan mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja manual serta menekan biaya produksi di tengah kelangkaan tenaga kerja.

e. **Penguatan Sistem Pasca Panen dan Rantai Pasok untuk Menjaga Daya Saing Produk Lokal**

Meningkatkan kapasitas pasca panen (pengeringan, penyimpanan, pengolahan) dan memperpendek rantai distribusi melalui penguatan kelembagaan ekonomi petani.

Strategi ini bertujuan menekan losses hasil, meningkatkan kualitas produk, dan memperkuat daya saing produk tanaman pangan domestik terhadap produk impor.

f. Pengurangan Ketergantungan Input Impor untuk Mengantisipasi Ketidakstabilan Global

Mendorong pengembangan pupuk dan benih dalam negeri, optimalisasi pemanfaatan pupuk organik dan hayati, serta efisiensi penggunaan input produksi. Strategi ini ditujukan untuk mengurangi risiko lonjakan biaya produksi akibat gangguan pasokan global.

g. Penguatan Akses Permodalan dan Manajemen Risiko Usaha Tani

Mengembangkan skema pembiayaan inklusif, asuransi usaha tani, dan peningkatan literasi manajemen risiko bagi petani. Pendekatan ini bertujuan menjaga keberlanjutan usaha tani dan melindungi pendapatan petani dari tekanan risiko eksternal.

h. Penguatan Integrasi Hulu - Hilir untuk Menekan Dampak Persaingan Global

Mendorong integrasi sektor tanaman pangan dengan industri pengolahan untuk meningkatkan nilai tambah, efisiensi, dan daya saing produk. Strategi ini berfungsi sebagai langkah defensif untuk melindungi petani dari tekanan harga dan persaingan global.

Strategi SWOT diatas dapat dilihat secara ringkas dalam tabel berikut:

Tabel 2. Analisis Strategi SWOT Direktorat Jenderal Tanaman Pangan

	Strengths (Kekuatan)	Weaknesses (Kelemahan)
	1. Keanekaragaman Hayati dan Varietas Unggul 2. Dukungan Infrastruktur Pertanian yang Memadai 3. Potensi Lahan dan Perluasan Areal Tanam 4. Kelembagaan Petani 5. Kondisi Agroklimat yang Mendukung 6. Dukungan Kebijakan dan Regulasi yang Kuat 7. Dukungan Fiskal Pemerintah	1. Struktur Demografi Petani dan Regenerasi Tenaga Kerja 2. Skala Usaha Gurem dan Keterbatasan Kepemilikan Lahan 3. Kondisi Topografi dan Keterbatasan Mekanisasi 4. Rendahnya Penguasaan dan Adopsi Teknologi 5. Inefisiensi Rantai Pasok dan Tingginya Kehilangan Hasil 6. Keterbatasan Modal dan Lemahnya Manajemen Usaha 7. Keterbatasan Informasi Pasar 8. Ketergantungan terhadap Bahan Baku Impor 9. Lemahnya Keterkaitan antara Sektor Pertanian dan Industri 10. Dampak Perubahan Iklim dan Ketidakberlanjutan Produksi
Opportunities (Peluang)	Strategi S-O (Aggressive) Menggunakan kekuatan untuk menangkap peluang	Strategi W-O (Turnaround) Meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang
1. Peningkatan Permintaan Produk Tanaman Pangan Domestik dan Global 2. Tren Pangan Fungsional, Organik, dan Bernilai Tambah Tinggi 3. Dukungan Kebijakan Pemerintah dan Pengembangan Kawasan Berbasis Korporasi	1. Optimalisasi Varietas Unggul untuk Memenuhi Peningkatan Permintaan Pangan 2. Pemanfaatan Infrastruktur Irigasi dan Potensi Lahan untuk Pengembangan 3. Penguatan Kelembagaan Petani dalam Menangkap Tren Pangan Bernilai Tambah Tinggi	1. Transformasi SDM dan Regenerasi Petani Berbasis Teknologi dan Pasar 2. Konsolidasi dan Korporatisasi Petani untuk Mengatasi Skala Usaha Gurem 3. Peningkatan Adopsi Mekanisasi dan Teknologi Tepat Guna

4. Pemanfaatan Revolusi Pertanian 4.0 dan Digitalisasi 5. Peluang Hilirisasi dan Pengembangan Bioenergi 6. Potensi Pasar Ekspor Komoditas Spesifik 7. Kerja Sama dengan Perguruan Tinggi dan Stakeholders 8. Akses Pembiayaan dan Perlindungan Usaha Pertanian	4. Penerapan Pertanian Modern Berbasis Digital untuk Meningkatkan Produktivitas dan Efisiensi 5. Pengembangan Hilirisasi dan Bioenergi Berbasis Komoditas Unggulan 6. Peningkatan Ekspor Komoditas Spesifik melalui Standarisasi dan Inovasi Teknologi 7. Pemanfaatan Dukungan Fiskal dan Akses Pembiayaan untuk Perluasan dan Keberlanjutan Usaha Tani	4. Penguatan Rantai Pasok dan Hilirisasi untuk Mengurangi Losses 5. Diversifikasi Produk dan Pengembangan Pangan Bernilai Tinggi 6. Digitalisasi Informasi Pasar dan Tata Niaga 7. Optimalisasi Akses Pembiayaan dan Perlindungan Usaha Tani 8. Substitusi Impor Input dan Adaptasi Perubahan Iklim
Threats (Ancaman)	Strategi S-T (Diversification) Menggunakan kekuatan untuk menghindari ancaman	Strategi W-T (Defensive) Meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman
1. Perubahan Iklim Ekstrem (<i>Climate Change</i>) 2. Alih Fungsi / Konversi Lahan Pertanian 3. Berkurangnya Minat dan Tenaga Kerja Pertanian 4. Ancaman Hama dan Penyakit Tanaman Baru 5. Ketidakstabilan Geopolitik Global 6. Perdagangan Bebas dan Produk Impor	1. Pengembangan Varietas Unggul Adaptif Iklim untuk Menghadapi Perubahan Iklim Ekstrem 2. Optimalisasi Infrastruktur Irigasi untuk Menekan Risiko Kekeringan dan Banjir 3. Perlindungan dan Optimalisasi Lahan Pertanian untuk Menghadapi Alih Fungsi Lahan 4. Penguatan Kelembagaan Petani untuk Mengatasi Kekurangan Tenaga Kerja Pertanian 5. Penerapan Inovasi Teknologi dan Pengendalian OPT Terpadu 6. Pemanfaatan Dukungan Kebijakan dan Fiskal untuk Meredam Dampak Geopolitik Global 7. Peningkatan Daya Saing Produk Lokal untuk Menghadapi Produk Impor	1. Penguatan Ketahanan Produksi Tanaman Pangan terhadap Perubahan Iklim 2. Konsolidasi dan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan 3. Penguatan Regenerasi Petani untuk Mengantisipasi Krisis Tenaga Kerja Pertanian 4. Penguatan Mekanisasi Selektif untuk Mengatasi Keterbatasan Topografi dan Tenaga Kerja 5. Penguatan Sistem Pasca Panen dan Rantai Pasok untuk Menjaga Daya Saing Produk Lokal 6. P e n g u r a n g a n Ketergantungan Input Impor untuk Mengantisipasi Ketidakstabilan Global 7. Penguatan Akses Permodalan dan Manajemen Risiko Usaha Tani 8. Penguatan Integrasi Hulu - Hilir untuk Menekan Dampak Persaingan Global

1.1. ANALISIS CAPAIAN KINERJA DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN 2020 – 2024

Analisis capaian kinerja Direktorat Jenderal Tanaman Pangan mengacu pada Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Tanaman Pangan (LAKIN Direktorat Tanaman Pangan) periode 2020 – 2024. Selama periode tersebut, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan melakukan beberapa penyesuaian kinerja. Beberapa penyesuaian tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. Penyesuaian IKP Direktorat Jenderal Tanaman Pangan 2020 - 2024

TAHUN 2020	PERIODE 2021 - 2022	PERIODE 2023 – 2024
Peningkatan produksi padi (%)		Jumlah produksi padi (Juta Ton)
Peningkatan produksi jagung (%)		Jumlah produksi jagung (Juta Ton)
Peningkatan produksi kedelai (%)		Jumlah produksi kedelai (Juta Ton)
Tidak ada	Peningkatan produksi aneka umbi (%)	Jumlah produksi aneka umbi (Juta Ton)
Tidak ada	Peningkatan produksi aneka kacang (%)	Jumlah produksi aneka kacang (Juta Ton)

Berdasarkan tabel di atas, secara garis besar terdapat 2 (dua) penyesuaian dan penambahan. Penyesuaian pertama terkait Indikator Kinerja Program (IKP) produksi padi, jagung kedelai yang sebelumnya menghitung persentase peningkatan produksi (Persentase) disesuaikan menjadi jumlah produksi (Juta Ton). Penyesuaian kedua terkait IKP produksi aneka umbi dan aneka kacang yang pada awalnya menghitung persentase peningkatan produksi (Persentase) menjadi jumlah produksi (Juta Ton). Penambahan IKP yang dimaksud

terkait produksi aneka umbi dan aneka kacang. Analisis capaian yang digunakan pada Renstra ini mengikuti IKP yang digunakan pada periode 2023 – 2024. Adanya penyesuaian IKP berdampak pada perbedaan satuan target terkait produksi padi, jagung, kedelai, aneka umbi dan aneka kacang sehingga penentuan target produksi periode 2020 – 2022.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2024 Tentang Penilaian Kinerja Organisasi, normalisasi capaian indikator dilakukan jika capaian berada >110%. Mengacu pada peraturan tersebut, jika terdapat IKP Direktorat Jenderal Tanaman Pangan yang >110% maka dilakukan normalisasi. Berdasarkan penyesuaian dan ilustrasi di atas, perhitungan dari masing-masing IKP Direktorat Jenderal akan dijabarkan lebih rinci sebagai berikut.

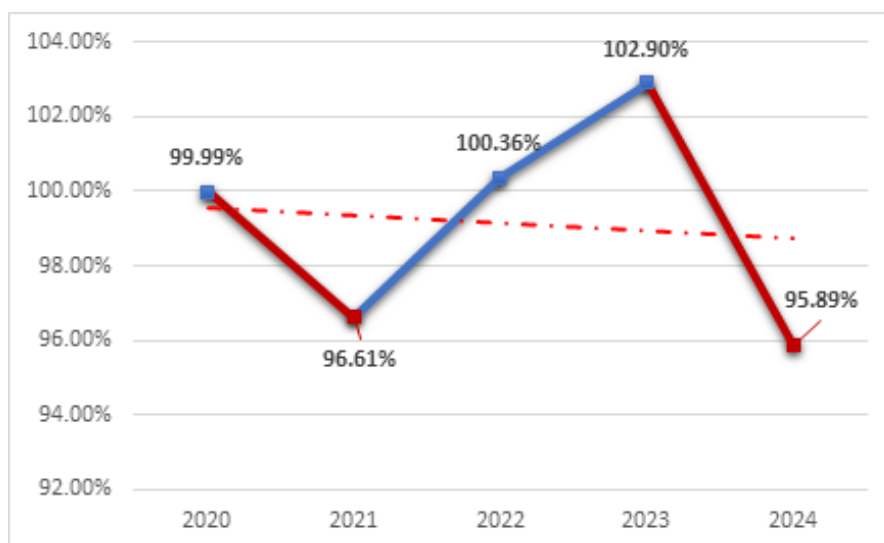
1.1.1. IKP 1.1 JUMLAH PRODUKSI PADI

Indikator jumlah produksi padi merepresentasikan kemampuan produksi dalam negeri gabah kering giling (GKG) padi dalam satuan juta ton. Padi merupakan salah satu komoditas strategis pertanian dalam rangka mewujudkan swasembada pangan. Hal tersebut berarti semakin tinggi angka produksi padi nasional diharapkan dapat mendekati bahkan mencukupi kebutuhan padi dalam negeri. Perbandingan antara target dan realisasi jumlah produksi padi dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 14. Target dan Realisasi Jumlah Produksi Padi (Juta Ton)

Berdasarkan gambar di atas, realisasi produksi padi sangat fluktuatif, tingginya fluktuasi target dan realisasi disebabkan oleh banyak faktor, diantaranya: 1). Ketersediaan lahan; 2). Ketersediaan sarana dan prasarana produksi; 3). Kondisi iklim dan cuaca; 4). Keterbatasan SDM pertanian; dan 5). Penguasaan pengetahuan dan teknologi budidaya pertanian. Selanjutnya adalah analisis tren capaian kinerja yang bertujuan untuk melihat peningkatan/penurunan capaian kinerja dalam 5 (lima) tahun terakhir sebagai berikut.



Gambar 15. Tren Capaian Kinerja Jumlah Produksi Padi (Juta Ton)

Berdasarkan gambar di atas, tren capaian kinerja produksi cenderung mengalami penurunan. Capaian kinerja tertinggi terjadi pada tahun 2023 sebesar 102,90% sementara capaian terendah pada tahun 2021 sebesar 96,61%. Namun Penurunan yang signifikan pada tahun 2024 perlu dicermati sehingga dapat menjadi pertimbangan dalam menentukan target periode berikutnya. Dalam mewujudkan kinerja produksi padi, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan melakukan beberapa upaya sebagai berikut.

1. Kegiatan Kawasan padi yang berupa bantuan sarana produksi
2. Sertifikasi benih bertujuan untuk mendapatkan benih yang bermutu sesuai standar mutu, serta untuk mengantisipasi penyimpangan dalam perbanyakan benih.
3. Kegiatan penyediaan benih in-situ melalui kegiatan Mandiri Benih

4. Kegiatan perlindungan terhadap hama dan penyakit serta dampak perubahan iklim untuk menekan tingkat kehilangan hasil

1.1.2. IKP 1.2 JUMLAH PRODUKSI JAGUNG

Indikator jumlah produksi jagung merepresentasikan kemampuan produksi dalam negeri komoditas jagung dalam satuan juta ton. Jagung merupakan salah satu komoditas strategis pertanian dalam rangka mewujudkan swasembada pangan. Hal tersebut berarti semakin tinggi angka produksi jagung nasional diharapkan dapat mendekati bahkan mencukupi kebutuhan jagung dalam negeri. Perbandingan antara target dan realisasi jumlah produksi jagung dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 16. Target dan Realisasi Jumlah Produksi Jagung (Juta Ton)

Berdasarkan gambar di atas, realisasi produksi jagung sangat fluktuatif, tingginya fluktuasi target dan realisasi disebabkan oleh banyak faktor, diantaranya: 1). Ketersediaan lahan; 2). Ketersediaan sarana dan prasarana produksi; 3). Kondisi

iklim dan cuaca; 4). Keterbatasan SDM pertanian; dan 5). Penguasaan pengetahuan dan teknologi budidaya pertanian. Selanjutnya adalah analisis tren capaian kinerja yang bertujuan untuk melihat peningkatan/penurunan capaian kinerja dalam 5 (lima) tahun terakhir sebagai berikut.



Gambar 17. Tren Capaian Kinerja Jumlah Produksi Jagung (Juta Ton)

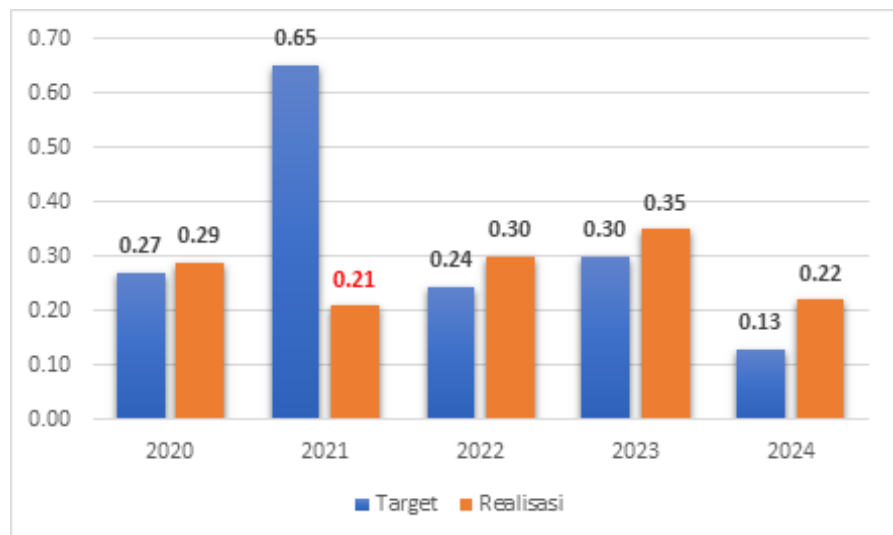
Berdasarkan gambar di atas, tren capaian kinerja produksi jagung mengalami peningkatan. Capaian kinerja tertinggi terjadi pada tahun 2022 sebesar 109% dan terendah pada tahun 2020 sebesar 91%. Dalam mewujudkan kinerja produksi jagung, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan melakukan beberapa upaya sebagai berikut.

1. Kegiatan Kawasan Jagung yang berupa bantuan sarana produksi
2. Sertifikasi benih bertujuan untuk mendapatkan benih yang bermutu sesuai standar mutu, serta untuk mengantisipasi penyimpangan dalam perbanyakan benih.

3. Kegiatan perlindungan terhadap hama dan penyakit serta dampak perubahan iklim untuk menekan tingkat kehilangan hasil

1.1.3. IKP 1.3 JUMLAH PRODUKSI KEDELAI

Indikator jumlah kedelai jagung merepresentasikan kemampuan produksi dalam negeri komoditas kedelai dalam satuan juta ton. Kedelai merupakan salah satu komoditas strategis pertanian dalam rangka mewujudkan swasembada pangan. Hal tersebut berarti semakin tinggi angka produksi kedelai nasional diharapkan dapat mendekati bahkan mencukupi kebutuhan kedelai dalam negeri. Perbandingan antara target dan realisasi jumlah produksi kedelai dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 18. Target dan Realisasi Jumlah Produksi Kedelai (Juta Ton)

Berdasarkan gambar di atas, realisasi produksi kedelai sangat fluktuatif, tingginya fluktuasi target dan realisasi disebabkan oleh banyak faktor, diantaranya: 1). Persaingan antar komoditas; 2). Ketersediaan benih bermutu terbatas;

3). Kondisi iklim dan cuaca; 4). Harga tidak kompetitif; dan 5). Kebijakan impor yang tidak terbatas. Selanjutnya adalah analisis tren capaian kinerja yang bertujuan untuk melihat peningkatan/penurunan capaian kinerja dalam 5 (lima) tahun terakhir sebagai berikut.



Gambar 19. Tren Capaian Kinerja Jumlah Produksi Kedelai (Juta Ton)

Berdasarkan gambar di atas, tren capaian kinerja produksi kedelai mengalami peningkatan meskipun peningkatan secara signifikan terutama pada 3 (tiga) tahun terakhir. Capaian kinerja tertinggi terjadi pada tahun rentang tahun 2022 – 2024 dengan angka normalisasi sebesar 110%. Tantangan berikutnya adalah bagaimana menjaga konsistensi capaian di angka maksimum dengan target produksi yang terus meningkat. Dalam mewujudkan kinerja produksi kedelai, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan melakukan beberapa upaya sebagai berikut.

1. Kegiatan Kawasan kedelai yang berupa bantuan sarana produksi

2. Sertifikasi benih bertujuan untuk mendapatkan benih yang bermutu sesuai standar mutu, serta untuk mengantisipasi penyimpangan dalam perbanyakan benih.
3. Kegiatan penyediaan benih in-situ melalui kegiatan Mandiri Benih
4. Kegiatan perlindungan terhadap hama dan penyakit serta dampak perubahan iklim untuk menekan tingkat kehilangan hasil

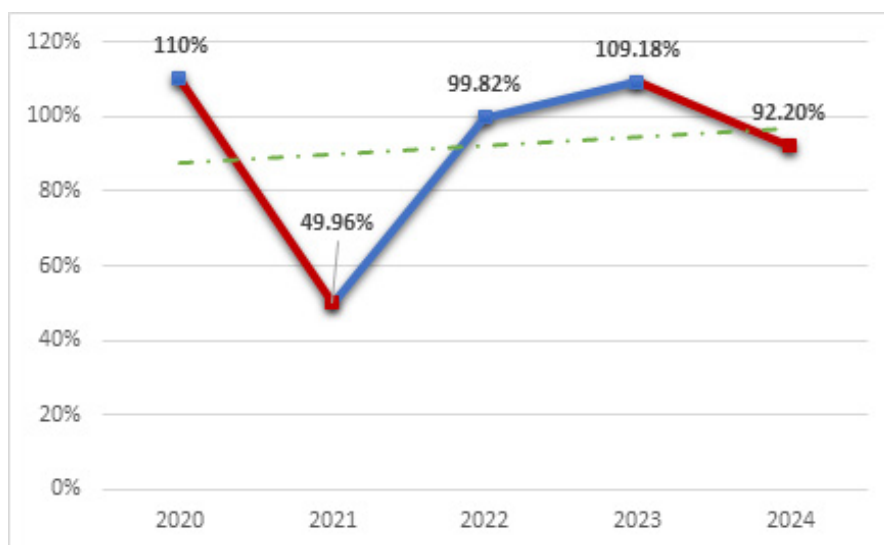
1.1.4. IKP 2.1 JUMLAH PRODUKSI ANEKA UMBI

Indikator jumlah produksi aneka umbi merepresentasikan kemampuan produksi dalam negeri komoditas ubi kayu dan ubi jalar dalam satuan juta ton. Keduanya merupakan produk substitusi pangan dan merupakan komoditas strategis yang termasuk dalam RPJMN 2025 – 2029. Konsumsi umbi diharapkan dapat mengurangi ketergantungan tinggi terhadap beras. Perbandingan antara target dan realisasi jumlah produksi aneka umbi dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 20. Target dan Realisasi Jumlah Produksi Aneka Umbi (Juta Ton)

Berdasarkan gambar di atas, realisasi produksi aneka umbi pada tahun 2020 dan 2023 melampaui target, selebihnya tidak mencapai target yang ditetapkan. Berdasarkan LAKIN Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, beberapa faktor yang mempengaruhi produksi aneka umbi seperti: anomali cuaca dan iklim, penurunan luas panen karena konversi lahan, hingga jaminan harga pasar dan harga komoditas yang belum stabil menyebabkan realisasi yang rendah. Selanjutnya adalah analisis tren capaian kinerja yang bertujuan untuk melihat peningkatan/penurunan capaian kinerja dalam 5 (lima) tahun terakhir sebagai berikut.



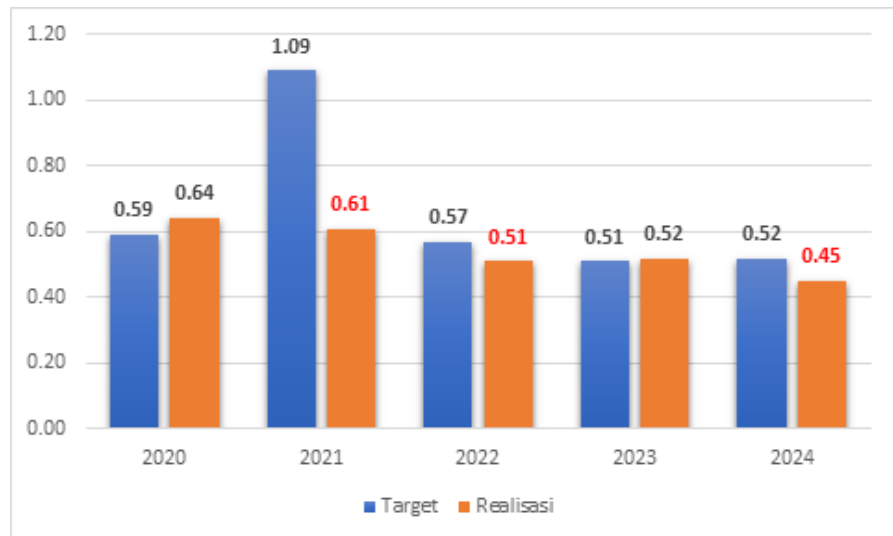
Gambar 21. Tren Capaian Kinerja Jumlah Produksi Aneka Umbi (Juta Ton)

Berdasarkan gambar di atas, tren capaian kinerja produksi aneka umbi mengalami peningkatan meskipun peningkatan secara signifikan terutama pada periode 2021 – 2024. Capaian kinerja tertinggi terjadi pada tahun 2020 dengan angka normalisasi sebesar 110%. Dalam mewujudkan kinerja produksi aneka umbi, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan melakukan beberapa upaya sebagai berikut.

1. Kegiatan Kawasan Ubi Kayu dan Ubi jalar yang berupa bantuan sarana produksi
2. Sertifikasi benih bertujuan untuk mendapatkan benih yang bermutu sesuai standar mutu, serta untuk mengantisipasi penyimpangan dalam perbanyakan benih.
3. Kegiatan penyediaan benih in-situ melalui kegiatan Mandiri Benih
4. Kegiatan perlindungan terhadap hama dan penyakit serta dampak perubahan iklim untuk menekan tingkat kehilangan hasil

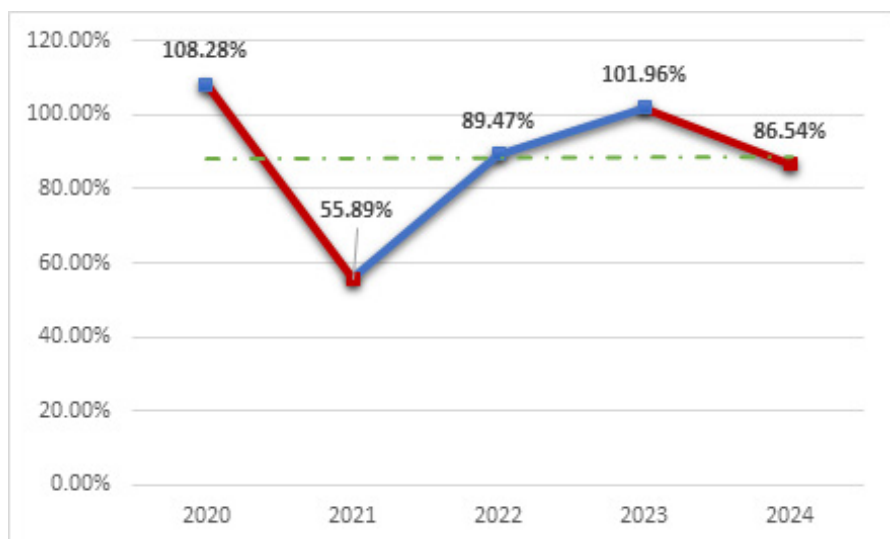
1.1.5. IKP 2.2 JUMLAH PRODUKSI ANEKA KACANG

Indikator jumlah produksi aneka kacang merepresentasikan kemampuan produksi dalam negeri komoditas kacang tanah dan kacang hijau dalam satuan juta ton. Aneka kacang termasuk komoditas strategis yang tercantum dalam RPJMN 2025 – 2029. Perbandingan antara target dan realisasi jumlah produksi aneka kacang dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 22. Target dan Realisasi Jumlah Produksi Aneka Kacang (Juta Ton)

Berdasarkan gambar di atas, realisasi produksi aneka kacang juga fluktuatif, tahun 2020 dan 2023 melampaui target, selebihnya tidak mencapai target yang ditetapkan. Berdasarkan LAKIN Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, beberapa faktor yang mempengaruhi produksi aneka kacang seperti: anomali iklim dan cuaca, persaingan lahan dengan komoditas lain menyebabkan realisasi yang rendah. Selanjutnya adalah analisis tren capaian kinerja yang bertujuan untuk melihat peningkatan/penurunan capaian kinerja dalam 5 (lima) tahun terakhir sebagai berikut.



Gambar 23. Tren Capaian Kinerja Jumlah Produksi Aneka Kacang (Juta Ton)

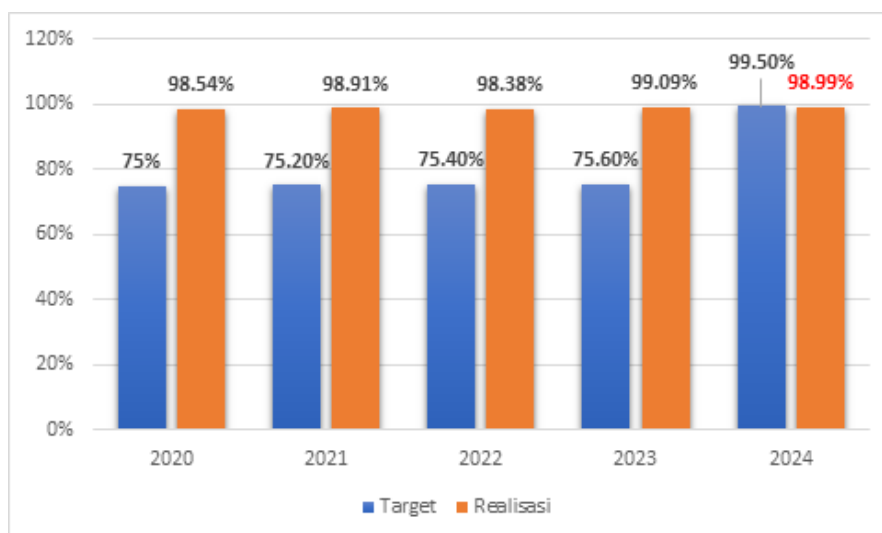
Berdasarkan gambar di atas, tren capaian kinerja produksi aneka kacang cenderung stagnan. Meski mengalami penurunan signifikan dalam rentang tahun 2020 – 2021, peningkatan kembali terjadi dalam rentang tahun 2021 – 2023 sebelum kembali menurun di akhir periode 2024. Capaian kinerja tertinggi terjadi pada tahun 2020 dengan angka normalisasi sebesar 108,28%. Dalam mewujudkan kinerja

produksi aneka umbi, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan melakukan beberapa upaya sebagai berikut.

1. Kegiatan Kawasan Kacang Tanah dan Kacang Hijau yang berupa bantuan sarana produksi
2. Sertifikasi benih bertujuan untuk mendapatkan benih yang bermutu sesuai standar mutu, serta untuk mengantisipasi penyimpangan dalam perbanyakan benih.
3. Kegiatan penyediaan benih in-situ melalui kegiatan Mandiri Benih.
4. Kegiatan perlindungan terhadap hama dan penyakit serta dampak perubahan iklim untuk menekan tingkat kehilangan hasil.

1.1.6. IKP 3.1 RASIO LUAS SERANGAN OPT YANG DAPAT DITANGANI TERHADAP LUAS SERANGAN OPT

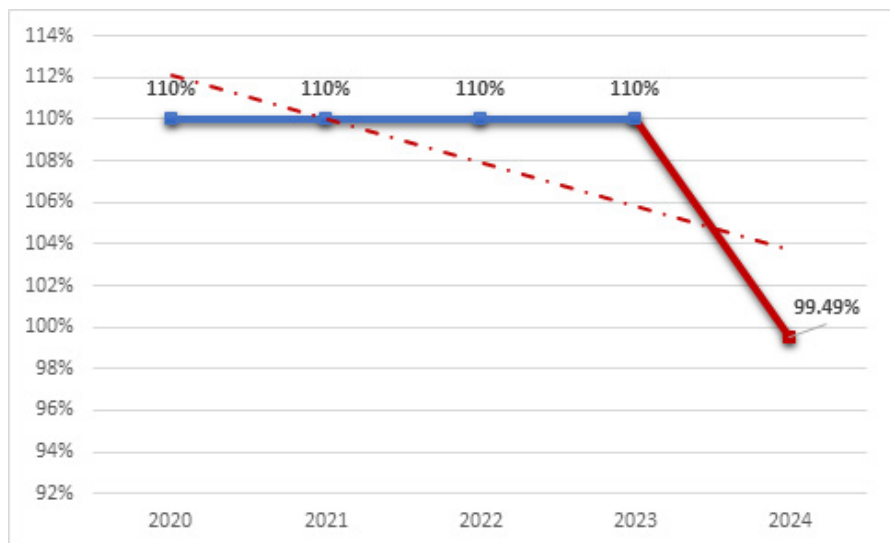
Indikator ini merepresentasikan kemampuan dan keberhasilan perlindungan tanaman pangan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995, perlindungan tanaman adalah segala upaya untuk mencegah kerugian pada budidaya tanaman yang diakibatkan oleh organisme pengganggu tumbuhan (OPT). OPT didefinisikan sebagai semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau menyebabkan kematian tumbuhan. Serangan OPT yang tidak terkendali berpengaruh langsung terhadap produktivitas yang berdampak pada gagal panen dan tidak terpenuhinya target produksi, khususnya komoditas strategis nasional. Perbandingan antara target dan realisasi penanganan serangan OPT dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 24. Target dan Realisasi Rasio luas Serangan OPT yang Dapat Ditangani Terhadap Luas Serangan OPT

Berdasarkan gambar di atas, realisasi pengendalian serangan OPT hampir selalu melampaui target kecuali pada tahun 2024. Berdasarkan LAKIN Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, beberapa hambatan yang menyebabkan realisasi tahun 2024 tidak tercapai, beberapa di antaranya menurunnya dukungan anggaran untuk pengamanan OPT dan faktor alam yang tidak bisa diprediksi sehingga target/realisasi kegiatan seperti gerakan pengendalian OPT tidak dapat dilaksanakan sesuai jadwal pelaksanaan kegiatan, serta petani yang belum memahami pentingnya pengelolaan OPT secara berkelanjutan.

Analisis tren capaian kinerja dalam 5 (lima) tahun terakhir sebagai berikut.



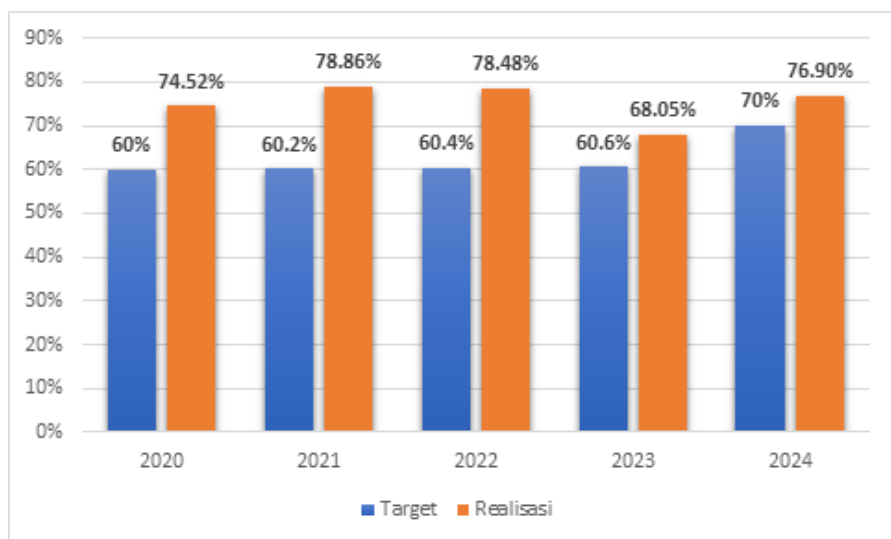
Gambar 25. Tren Capaian Kinerja Rasio luas Serangan OPT yang Dapat Ditangani Terhadap Luas Serangan OPT

Berdasarkan gambar di atas, tren capaian kinerja penanganan serangan OPT tahun 2020-2023 konsisten di 110%. Dalam mewujudkan kinerja pengendalian serangan OPT, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan melakukan beberapa upaya sebagai berikut.

1. Penerapan Pengendalian Hama Terpadu (PPHT)
2. Gerakan Pengendalian OPT
3. Pemberdayaan Petani dalam Pemasyarakatan PHT (P4)
4. Rumah Burung Hantu
5. Dem Area Budidaya Tanaman Sehat
6. Bantuan Pestisida sebagai *buffer stock*
7. Perbanyak agen hayati
8. Penguatan SDM dan kelembagaan perlindungan tanaman

1.1.7. IKP 3.2 RASIO LUAS TERKENA DPI YANG DAPAT DITANGANI TERHADAP LUAS TERKENA DPI

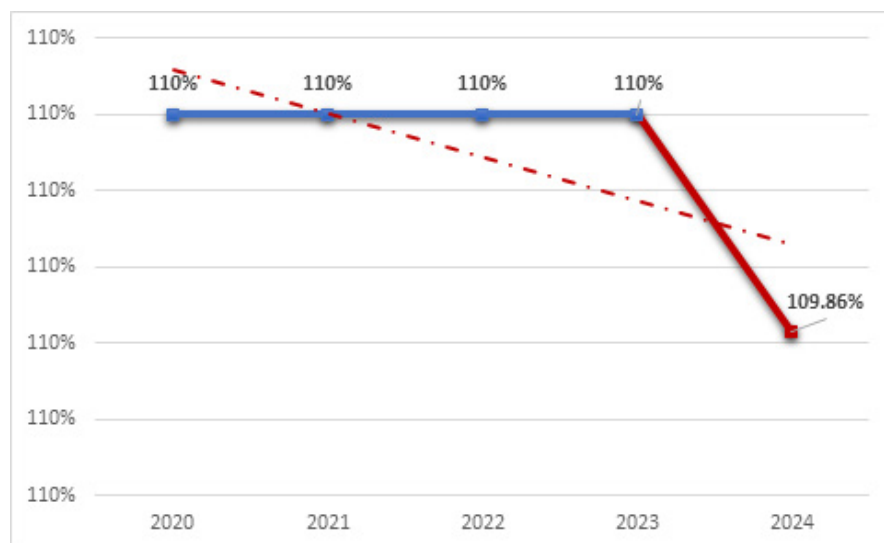
Indikator ini merepresentasikan bagaimana kemampuan pencegahan dan mitigasi pertanian nasional terhadap Dampak Perubahan Iklim (DPI). Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/PERMENTAN/HM.130/8/2018 tentang Sistem Peringatan Dini dan Penanganan Dampak Perubahan Iklim Pada Sektor Pertanian, Penanganan Dampak Perubahan Iklim adalah upaya untuk mengantisipasi akibat yang ditimbulkan oleh Perubahan Iklim terhadap sektor Pertanian. DPI dapat mengakibatkan penurunan produktivitas dan gagal panen sehingga mempengaruhi capaian produksi nasional. Perbandingan antara target dan realisasi penanganan DPI dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 26. Target dan Realisasi Rasio Luas Terkena DPI yang Dapat Ditangani Terhadap Luas Terkena DPI

Berdasarkan gambar di atas, selama periode 2020 – 2024 realisasi penanganan luas terkena DPI dapat mencapai target. Namun yang perlu menjadi perhatian adalah angka target

tertinggi yang masih berada di angka 70% dengan asumsi terdapat 30% DPI yang tidak dapat ditangani. Hal tersebut disebabkan dampak perubahan iklim merupakan fenomena yang sulit diprediksi sehingga diperlukan antisipasi dan mitigasi sejak awal. Analisis tren capaian kinerja dalam 5 (lima) tahun terakhir sebagai berikut.



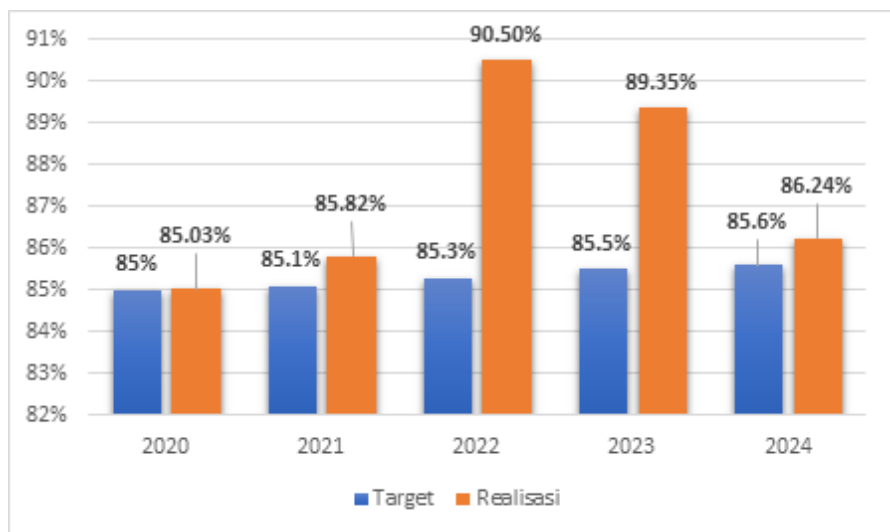
Gambar 27. Tren Capaian Kinerja Rasio Luas Terkena DPI yang Dapat Ditangani Terhadap Luas Terkena DPI

Berdasarkan gambar di atas, tren capaian kinerja penanganan DPI sudah mencapai target. Dalam mewujudkan kinerja penanganan DPI, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan melakukan beberapa upaya sebagai berikut.

1. Penerapan Penanganan Dampak Perubahan Iklim (PPDPI)
2. Gerakan Penanganan Banjir/ Kekeringan
3. Dem Area Penanganan Dampak Perubahan Iklim

1.1.8. IKP 4.1 TINGKAT KEMANFAATAN SARANA PASCAPANEN DAN PENGOLAHAN HASIL TANAMAN PANGAN

Indikator ini merepresentasikan tingkat kemanfaatan alsintan pascapanen dan alsintan pengolahan tanaman pangan yang dimanfaatkan untuk kegiatan pascapanen. Dengan pemanfaatan alsintan pascapanen dan pengolahan yang baik dapat mengurangi tingkat kehilangan hasil, peningkatan produktivitas, efisiensi kerja dan peningkatan kualitas hasil panen. Peningkatan kualitas komoditas pertanian dapat memberikan nilai tambah yang berdampak positif bagi petani. Perbandingan antara target dan realisasi kemanfaatan sarana pascapanen dan pengolahan hasil tanaman pangan dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 28. Target dan Realisasi Tingkat Kemanfaatan Sarana Pascapanen dan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan

Berdasarkan gambar di atas, tingkat kemanfaatan sarana pasca panen dan pengolahan hasil pertanian tanaman pangan menunjukkan tren yang positif. Analisis tren capaian kinerja dalam 5 (lima) tahun terakhir sebagai berikut.



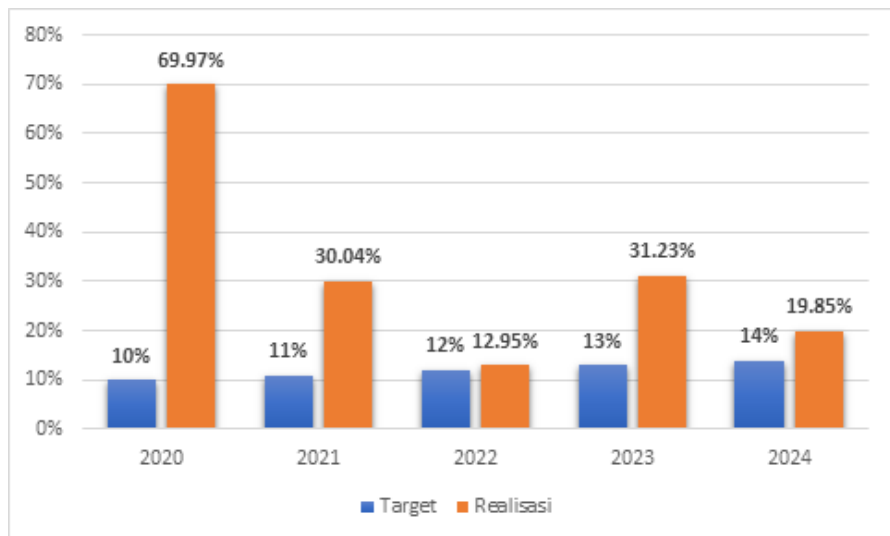
Gambar 29. Tren Capaian Kinerja Tingkat Kemanfaatan Sarana Pascapanen dan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan

Berdasarkan gambar di atas, tren kemanfaatan sarana pasca panen dan pengolahan hasil tanaman pangan mengalami peningkatan. Meski demikian, penurunan capaian dalam 2 (dua) tahun terakhir perlu menjadi perhatian agar ke depan penurunan tidak terus berlanjut. Berdasarkan LAKIN Direktorat Jenderal Tanaman Pangan 2024, beberapa faktor yang menjadi hambatan adalah lambatnya proses administrasi distribusi, pemanfaatan sarana pascapanen yang menunggu musim panen hingga keterlambatan pelaporan pemanfaatan oleh instansi di Pemerintah Daerah terkait. Dalam mewujudkan kinerja kemanfaatan sarana pascapanen dan produksi tanaman pangan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan melakukan beberapa upaya sebagai berikut.

1. Fasilitasi Sarana Pasca Panen Tanaman Pangan
2. Fasilitasi Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan

1.1.9. IKP 4.2 PERTUMBUHAN NILAI EKSPOR UNTUK PRODUK PERTANIAN TANAMAN PANGAN

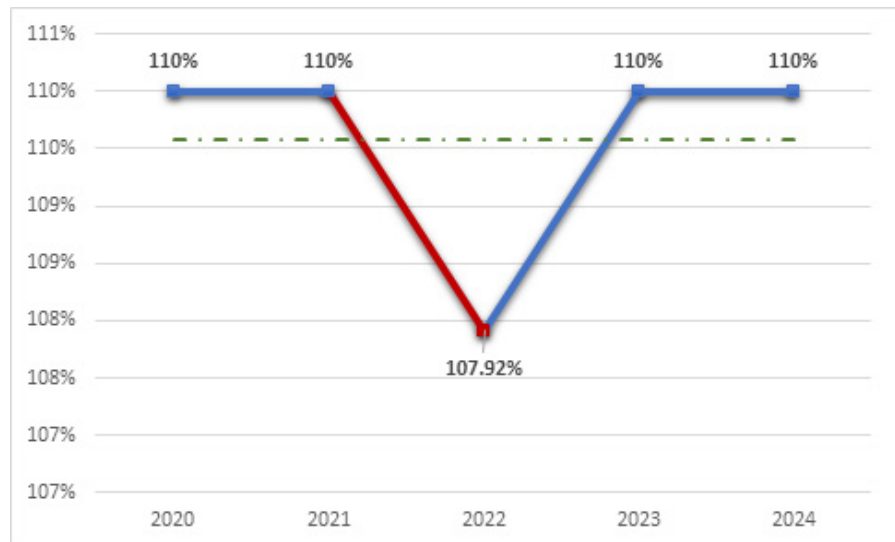
Indikator ini merepresentasikan tingkat keberhasilan hilirasi produk pertanian tanaman pangan dan kontribusi terhadap perekonomian nasional. Nilai ekspor produk pertanian tanaman pangan merupakan pendapatan yang diperoleh dari beberapa negara dari hasil penjualan komoditas pertanian tanaman pangan dalam satu tahun. Perbandingan antara target dan realisasi nilai ekspor produk pertanian tanaman pangan dapat dilihat pada gambar berikut



Gambar 30. Target dan Realisasi Pertumbuhan Nilai Ekspor Untuk Produk Pertanian Tanaman Pangan

Berdasarkan gambar di atas, realisasi nilai ekspor produk pertanian tanaman pangan selalu melebihi target. Realisasi tertinggi terjadi pada tahun 2020 dengan persentase pertumbuhan mencapai 69,97%. Berdasarkan LAKIN Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun 2020, pertumbuhan tersebut didorong oleh dukungan Kebijakan Menteri Pertanian memprioritaskan peningkatan volume ekspor dalam program

kerja pembangunan pertanian. Selanjutnya adalah analisis tren capaian kinerja yang bertujuan untuk melihat peningkatan/penurunan capaian kinerja dalam 5 (lima) tahun terakhir sebagai berikut.



Gambar 31. Tren Capaian Kinerja Pertumbuhan Nilai Ekspor Untuk Produk Pertanian Tanaman Pangan

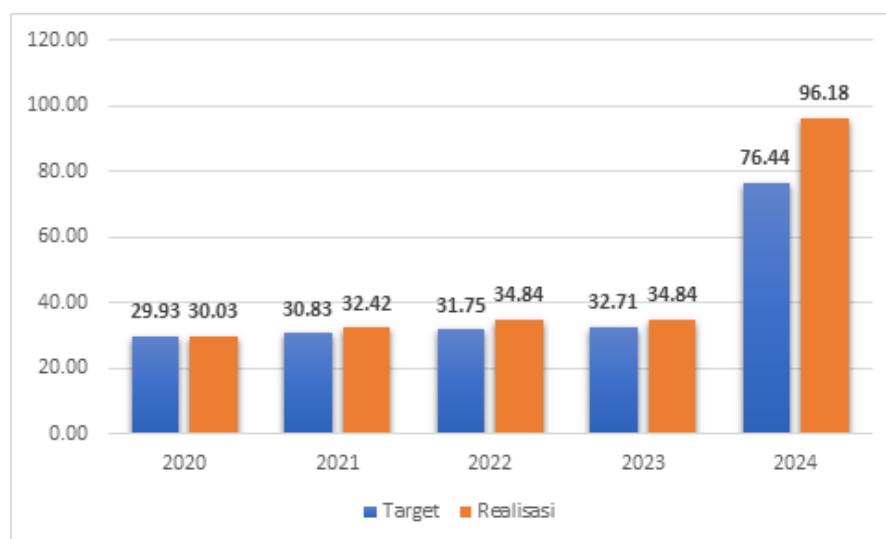
Berdasarkan gambar di atas, tren capaian kinerja pertumbuhan nilai ekspor produk pertanian tanaman pangan tidak terlalu fluktuatif. Penurunan terjadi pada tahun 2022 namun tidak berdampak signifikan karena masih berada di atas 100%. Dalam mewujudkan kinerja peningkatan nilai ekspor produk pertanian tanaman pangan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan melakukan beberapa upaya sebagai berikut.

1. Pengawasan dan pembinaan mutu komoditas tanaman pangan siap ekspor.
2. Fasilitasi sertifikasi produk melalui kegiatan sertifikasi, surveillance, sertifikasi organik, HACCP dan IndoGAP.
3. Pemantauan informasi harga komoditas tanaman pangan oleh Petugas Informasi Pasar (PIP).

4. Fasilitasi pembinaan, pengawalan dan pengembangan usaha produk tanaman pangan (promosi, *business matching*, akses pasar, dan lainnya).

1.1.10. IKP 5.1 PERSENTASE CAPAIAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN

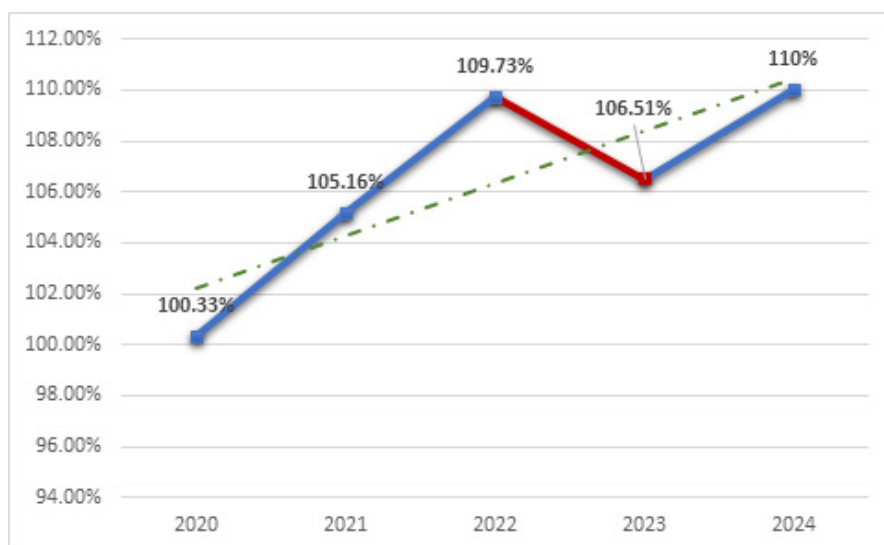
Indikator ini merepresentasikan upaya perbaikan tata kelola birokrasi lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan. Implementasi Reformasi Birokrasi (RB) merupakan komitmen yang dibangun dan disepakati bersama untuk menjadi ukuran kinerja. Pelaksanaan pengukuran capaian RB Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dilakukan oleh Unit Pengawas Internal (Sekretariat Jenderal dan Inspektorat Jenderal) dan Eksternal (Menpan RB, BPK, Kemenkeu, dan K/L lainnya). Perbandingan antara target dan realisasi capaian nilai RB Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dapat dilihat pada gambar berikut



Gambar 32. Target dan Realisasi Persentase Capaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan

Berdasarkan gambar di atas, realisasi kinerja pelaksanaan RB Direktorat Jenderal Tanaman Pangan selalu melampaui target. Perbedaan target yang signifikan antara periode 2020 – 2023 dengan target tahun 2024 dikarenakan adanya penyesuaian komponen pengukuran. Pada periode 2020 – 2023 nilai maksimal implementasi RB sebesar 40 sementara tahun 2024 sebesar 100. Berdasarkan LAKIN Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun 2024, implementasi RB UKE 1 dilakukan dengan mengukur 8 (delapan) indikator RB general meliputi: 1). Tingkat Maturitas SPIP; 2). Nilai SAKIP; 3). Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA); 4). Capaian IKU; 5). Tindak Lanjut Rekomendasi; 6). Indeks BerAkhlak; 7). Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK; dan 8). Survei Kepuasan Masyarakat, serta RB Tematik meliputi: 1). Pengentasan Kemiskinan; 2). Mendukung ketahanan pangan nasional; 3). Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Fokus Penanganan *Stunting*, dan Pengendalian.

Analisis tren capaian kinerja yang bertujuan untuk melihat peningkatan/penurunan capaian kinerja dalam 5 (lima) tahun terakhir sebagai berikut.



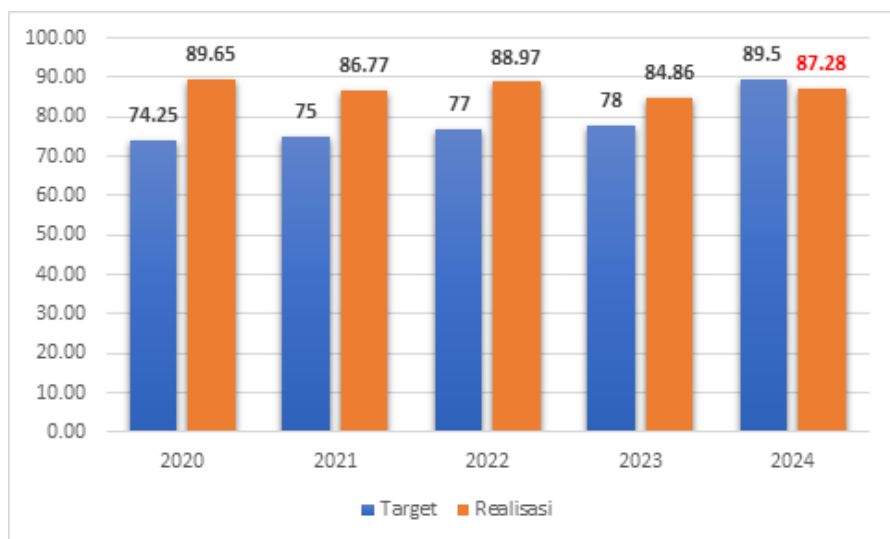
Gambar 33. Tren Capaian Kinerja Persentase Capaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan

Berdasarkan gambar di atas, tren capaian kinerja pelaksanaan RB Direktorat Jenderal Tanaman Pangan mengalami peningkatan. Meskipun capaian tahun 2023 sempat menurun dibanding tahun 2022, namun capaian kembali meningkat hingga titik maksimal sebesar 110%. Dalam mewujudkan pelaksanaan RB, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan melakukan beberapa upaya sebagai berikut.

1. Komitmen pimpinan dalam pelaksanaan RB.
2. Penyusun rencana aksi RB general dan tematik lingkup Ditjen TP.
3. Monitoring dan evaluasi rencana aksi RB general dan tematik lingkup Ditjen TP secara berkala.

1.1.11. IKP 6.1 INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN (IKPA) DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN

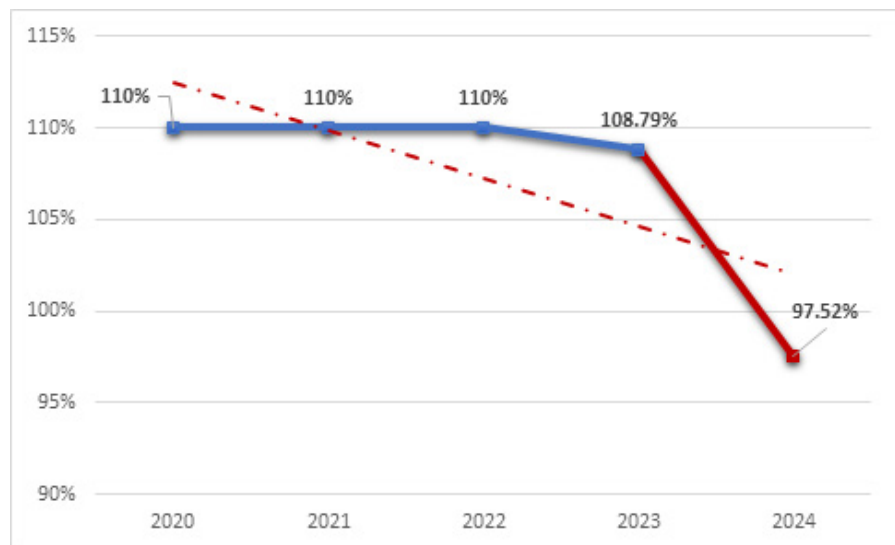
Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN dan/atau pengelola fiskal untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Penilaian dilakukan terhadap kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran dan kualitas evaluasi pelaksanaan anggaran. Perbandingan antara target dan realisasi capaian IKPA Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 34. Target dan Realisasi Nilai IKPA Direktorat Jenderal Tanaman Pangan

Berdasarkan gambar di atas, realisasi nilai IKPA selalu di atas target kecuali pada tahun 2024. Meski demikian, realisasi IKPA tahun 2024 masih lebih baik dibanding tahun sebelumnya.

Selanjutnya adalah analisis tren capaian kinerja yang bertujuan untuk melihat peningkatan/penurunan capaian kinerja dalam 5 (lima) tahun terakhir sebagai berikut.



Gambar 35. Tren Capaian Kinerja Nilai IKPA Direktorat Jenderal Tanaman Pangan

Berdasarkan gambar di atas, tren capaian nilai IKPA mengalami penurunan khususnya dalam 2 (dua) tahun terakhir. Tantangan bagi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ke depan adalah meningkatkan upaya untuk mendorong realisasi optimal sehingga dapat mengimbangi target. Dalam mewujudkan nilai IKPA, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan melakukan beberapa upaya sebagai berikut.

1. Penguatan perencanaan melalui pengendalian terhadap revisi DIPA dan deviasi halaman III DIPA (*updating* Rencana Penarikan Dana secara berkala).
2. Penguatan kualitas pelaksanaan anggaran dalam penyerapan anggaran, belanja kontraktual, penyelesaian tagihan dan pengelolaan UP&TUP.

3. Pengualan kualitas hasil pelaksanaan anggaran dengan monitoring dan pelaporan capaian output.

BAB II

VISI MISI TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM

2.1 VISI, MISI, TUJUAN KEMENTERIAN PERTANIAN 2025 – 2029

Visi Kementerian Pertanian tahun 2025 – 2029 merupakan cita-cita yang ingin diwujudkan pada tahun 2029. Visi tersebut telah dipastikan keselarasannya dengan visi Presiden. Berikut visi Kementerian Pertanian 2025 – 2029.

“Pertanian Maju Berkelanjutan serta Bermanfaat bagi Rakyat Indonesia dalam rangka Mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”

Visi Kementerian Pertanian diharapkan adaptif dan relevan dalam menjawab perubahan lingkungan strategis 5 (lima) tahun mendatang. Lebih rinci, Visi Kementerian Pertanian 2025 – 2029 memiliki 4 (empat) kata kunci sebagai berikut:

- **Pertanian**

Berdasarkan Bab I, Pasal 1, angka 2 UU Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan, **Pertanian** bermakna kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem.

- **Pertanian Maju**

Pertanian maju bermakna bahwa pertanian Indonesia akan mengikuti perkembangan zaman, mengadopsi teknologi dan praktik pertanian terkini pada seluruh rantai proses utama pertanian, meliputi penyiapan prasarana dan sarana pertanian,

budidaya pertanian, pasca panen komoditas pertanian, pengolahan komoditas pertanian, serta pemasaran komoditas pertanian.

■ **Pertanian Berkelanjutan**

Pertanian berkelanjutan berdasarkan Bab I, Pasal 1, angka 1 UU Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan adalah pengelolaan sumber daya alam hayati dalam memproduksi komoditas pertanian guna memenuhi kebutuhan manusia secara lebih baik dan berkesinambungan dengan menjaga kelestarian lingkungan hidup. Dalam praktik pertanian berkelanjutan, sumber daya pertanian yang dimiliki saat ini harus dapat dinikmati sampai generasi berikutnya. Selain itu, pelaksanaan sistem budidaya pertanian berkelanjutan sekaligus mendukung pelaksanaan kebijakan ekonomi sirkular pada pembangunan nasional, dimana peran sektor pertanian adalah melalui penerapan pertanian berkelanjutan.

■ **Pertanian yang Bermanfaat bagi Rakyat Indonesia**

Pertanian yang Bermanfaat bagi Rakyat Indonesia bermakna bahwa pembangunan pertanian juga harus dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan rakyat, dimana melalui pembangunan pertanian tersebut, manfaat yang didapat rakyat dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Komoditas pertanian yang dihasilkan dapat memenuhi kebutuhan rakyat terhadap pangan asal pertanian.
2. Pertanian bermanfaat dalam meningkatkan kesejahteraan petani.
3. Komoditas pertanian dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku Energi Baru Terbarukan (EBT) untuk rakyat.
4. Kesehatan rakyat (one health) dapat terwujud, khususnya dari pencegahan dan penanganan penyakit yang ditularkan melalui hewan.

Untuk mewujudkan visi tersebut, Kementerian Pertanian merumuskan misi 2025 – 2029 sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kesejahteraan Petani

Kesejahteraan petani merupakan kondisi di mana petani dapat hidup layak dan memiliki akses terhadap sumber daya, pendidikan, kesehatan, dan fasilitas dasar lainnya. Meningkatkan kesejahteraan petani dilakukan melalui upaya strategis agar petani mendapatkan harga yang layak, melindungi usaha petani, mendorong kemandirian petani serta memberikan bantuan pemerintah dalam rantai nilai pertanian, meliputi penyiapan prasarana dan sarana pertanian, budidaya pertanian, pasca panen komoditas pertanian, pengolahan komoditas pertanian, serta pemasaran komoditas pertanian.

2. Mendorong Kemandirian Pangan Asal Pertanian

Kemandirian pangan merupakan kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat. Hal ini berarti bahwa kemandirian pangan dapat diwujudkan melalui swasembada pangan pada beberapa komoditas pertanian strategis yang menjadi prioritas nasional, maupun prioritas Kementerian Pertanian.

1. Meningkatkan Nilai Manfaat Produk Pertanian bagi Rakyat Indonesia.

Produk pertanian memberikan nilai manfaat bagi rakyat Indonesia, yaitu:

- Manfaat dalam memenuhi kebutuhan rakyat terhadap pangan asal pertanian.
- Manfaat dalam meningkatkan kesejahteraan petani.

- Manfaat sebagai bahan baku Energi Baru Terbarukan (EBT).

2. Mencegah dan Menangani Penularan Penyakit Hewan kepada Manusia

Misi ini menekankan pada pencegahan dan penanganan penularan Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) kepada manusia, sehingga berkontribusi dalam peningkatan kesehatan masyarakat. Beberapa penyakit yang ditularkan melalui hewan dan/atau produk hewan dapat mempengaruhi tingkat kesehatan manusia, bahkan beberapa dapat menyebabkan kematian. Penyakit tersebut diantaranya adalah Monkeypox (Mpox), Rabies, Anthrax, Flu Burung dan lain sebagainya. Penerapan sistem kesehatan hewan nasional secara komprehensif diiringi dengan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap penyakit yang ditularkan melalui hewan dan/atau produk hewan, dapat meminimalisasi dampak dari penularan penyakit dari hewan dan/atau produk hewan ini.

3. Meningkatkan Penajaman Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian yang Berdampak Langsung kepada Masyarakat

Misi ini merupakan kontribusi Kementerian Pertanian dalam mewujudkan Reformasi Birokrasi Nasional (RBN) berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024. Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Pertanian dibagi atas 2 (dua), yaitu RB General dan RB Tematik. Fokus RBN yang diterjemahkan menjadi Reformasi Birokrasi (RB) level mikro (K/L) adalah RB Kementerian Pertanian dapat memberikan dampak langsung kepada masyarakat.

Berdasarkan visi dan misi tersebut, tujuan sebagai bentuk operasionalisasi visi dan misi Kementerian Pertanian 2025 – 2029 sebagai berikut.

■ **Tujuan 1: Meningkatnya Volume Usaha Pertanian dan Kapasitas SDM Pertanian.**

Tujuan 1 Meningkatnya volume usaha pertanian dan kapasitas SDM Pertanian merupakan peran Kementerian Pertanian dalam meningkatkan pendapatan petani. Peningkatan volume usaha pertanian dan SDM pertanian diharapkan dapat memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan petani dari tahun ke tahun, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan petani secara bertahap. Tujuan 1 ini memiliki 2 (dua) Indikator Tujuan (IT), yaitu:

- IT.1: Pertumbuhan volume usaha pertanian
- IT.2: Pertumbuhan pelaku usaha pertanian yang naik kelas

■ **Tujuan 2: Terwujudnya kemandirian pangan berkelanjutan berdasarkan prioritas**

Tujuan 2 ini adalah terwujudnya kemandirian pangan berkelanjutan dimana sebagian besar produksi dapat memenuhi kebutuhan konsumsi pangan masyarakat. Penerapan sistem budidaya pertanian berkelanjutan memastikan produksi tidak hanya memenuhi kebutuhan pangan jangka pendek, namun juga harus dapat memenuhi kebutuhan pangan di masa yang akan datang, khususnya dalam mengantisipasi krisis pangan yang diperkirakan akan melanda dunia, termasuk Indonesia. Pelaksanaan sistem budidaya pertanian berkelanjutan sekaligus menjadi bentuk kontribusi Kementerian Pertanian dalam mendukung pelaksanaan kebijakan nasional ekonomi sirkuler dalam mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045. Tujuan ini memiliki 3 (tiga) Indikator Tujuan (IT), yaitu:

- IT.3: Indeks swasembada pangan prioritas
 - IT.4: Indeks penerapan sistem budi daya pertanian berkelanjutan
 - IT.5: Indeks cadangan pangan asal pertanian nasional
- **Tujuan 3: Meningkatnya nilai tambah dan daya saing produk pertanian bagi rakyat**

Tujuan 3 adalah meningkatnya nilai tambah dan daya saing produk pertanian bagi rakyat. Komoditas pertanian yang dihasilkan harus bernilai tambah dan berdaya saing sehingga dapat meningkatkan nilai ekonomi komoditas pertanian tersebut dan meningkatkan pendapatan petani. Peningkatan nilai tambah dilakukan melalui hilirisasi rantai nilai pertanian, dimana orientasi penjualan tidak lagi berbasiskan produk mentah, namun sudah masuk pada produk setengah jadi dan produk jadi. Tujuan ini memiliki 3 (tiga) Indikator Tujuan (IT), yaitu:

- IT.6: Persentase pemenuhan produksi pertanian terhadap kebutuhan bahan baku bioenergi
 - IT.7: Pertumbuhan volume ekspor komoditas pertanian
 - IT.8: Persentase peningkatan hilirisasi komoditas pertanian
- **Tujuan 4: Menurunnya kasus penularan penyakit hewan kepada manusia**

Tujuan 4 Menurunnya kasus penularan penyakit hewan kepada manusia, sehingga dapat meningkatkan kesehatan masyarakat. Munculnya berbagai penyakit hewan yang berdampak kepada manusia beberapa waktu belakangan ini, seperti Monkeypox, Anthrax, Flu Burung, dan lain sebagainya, mempengaruhi kesehatan manusia khususnya di wilayah penularan penyakit. Untuk itu maka dibutuhkan penerapan sistem kesehatan hewan nasional dalam meningkatkan kesehatan hewan, mencegah dampak

penyakit hewan kepada manusia serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya penyakit hewan bagi kesehatan. Tujuan ini diukur melalui Indikator Tujuan, yaitu:

- IT. 9: Persentase penurunan kasus penyakit hewan yang menular kepada manusia.
- **Tujuan 5: Terwujudnya pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Pertanian yang transparan, akuntabel dan profesional.**

Reformasi Birokrasi Nasional (RBN) merupakan upaya penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (*good government governance*) yang telah berlangsung sejak tahun 2010. Reformasi Birokrasi (RB) dilakukan secara berjenjang, baik di tingkat makro, meso maupun mikro. Tujuan 5 Terwujudnya pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Pertanian yang transparan, akuntabel dan profesional, merupakan upaya reformasi birokrasi tingkat mikro (K/L) dalam membentuk birokrasi Kementerian Pertanian yang transparan, akuntabel dan profesional serta meningkatkan kualitas pelayanan publik Kementerian Pertanian yang berdampak langsung bagi masyarakat. Tujuan ini diukur melalui Indikator Tujuan, yaitu:

- IT. 10: Nilai RB Kementerian Pertanian.

2.2 VISI DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN 2025 – 2029

Direktorat Jenderal Tanaman Pangan merupakan salah satu Unit Kerja Eselon (UKE) I di lingkungan Kementerian Pertanian. Sebagai salah satu unsur pelaksana yang menjalankan strategi utama dan proses inti Kementerian Pertanian tahun 2025-2029, maka sudah sewajarnya Direktorat Jenderal Tanaman Pangan mendukung pencapaian Visi Kementerian Pertanian. Untuk itu, maka Visi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan tahun 2025-2029 yang selaras dengan Visi Kementerian Pertanian adalah:

“Tanaman Pangan Maju, Berkelanjutan serta bermanfaat bagi Rakyat Indonesia Dalam rangka mewujudkan Pertanian Maju Berkelanjutan serta Bermanfaat bagi Rakyat Indonesia”

Pernyataan Visi ini merupakan pernyataan Visi yang dipersempit dari Visi Kementerian Pertanian, dimana pada Visi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan hanya spesifik terkait dengan salah satu sub sektor pertanian, yaitu Tanaman Pangan, sesuai dengan tugas dan fungsi yang sudah ditetapkan pada Perpres 912 tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian. Visi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan tahun 2025-2029 ini mengandung beberapa makna strategis, yaitu:

- **Tanaman Pangan Maju** bermakna bahwa Budidaya Tanaman Pangan mengikuti perkembangan zaman, mengadopsi teknologi dan praktik pertanian terkini pada seluruh rantai proses utama pertanian, meliputi Budidaya, Pasca Panen, Hilirisasi serta Pemasaran produk Tanaman Pangan.
- **Tanaman Pangan Berkelanjutan** bermakna bahwa pengelolaan sumber daya alam hayati dalam memproduksi komoditas tanaman pangan guna memenuhi kebutuhan manusia secara lebih baik dan berkesinambungan dengan menjaga kelestarian lingkungan hidup. (Bab I, Pasal 1, angka 1 UU nomor 22 tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan). “Berkelanjutan” juga mengandung makna bahwa sumber daya pertanian tanaman pangan yang dimiliki saat ini harus dapat dinikmati sampai generasi berikutnya.
- **Tanaman Pangan Bermanfaat bagi Rakyat Indonesia** bermakna bahwa (i) komoditas Tanaman Pangan yang dihasilkan dapat memenuhi kebutuhan rakyat terhadap pangan asal Tanaman Pangan; dan (ii) Tanaman Pangan bermanfaat dalam meningkatkan kesejahteraan petani TP.

2.3 MISI DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN 2025 – 2029

Dalam mewujudkan Visi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan tahun 2025-2029, maka Direktorat Jenderal Tanaman Pangan membutuhkan upaya strategis yang harus dilakukan dalam mewujudkan Visi tersebut. Misi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan tahun 2025-2029 yang selaras dengan Misi Kementerian Pertanian dan mendukung terwujudnya Visi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan adalah:

- **Misi 1: Swasembada tanaman pangan dalam memenuhi kebutuhan rakyat terhadap pangan asal tanaman pangan**

Misi ini menekankan pada upaya untuk memenuhi kebutuhan pangan asal tanaman pangan saat ini maupun dimasa yang akan datang, melalui:

- Penyediaan benih bermutu.
- Budidaya tanaman pangan untuk konsumsi dan keberlanjutan ketersediaan tanaman pangan.
- Pelindungan tanaman pangan dari OPT dan DPI.
- Hilirisasi komoditas tanaman pangan.

- **Misi 2: Implementasi tata kelola birokrasi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan yang profesional dan akuntabel serta layanan dukungan manajemen yang optimal**

Misi ini menekankan pada pelaksanaan tata kelola birokrasi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian. Adapun pelaksanaan tata Kelola yang dimaksud meliputi pelaksanaan anggaran, tindak lanjut temuan auditor serta layanan dukungan manajemen.

2.4 TUJUAN DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN 2025 – 2029

Berdasarkan Visi dan Misi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat dirumuskan Tujuan dan Indikator Tujuan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan yang

merupakan turunan dari Misi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan lingkup yang dipersempit dari Visi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan. Tujuan dan Indikator Tujuan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan tahun 2025-2029 adalah:

■ **Tujuan 1: Terwujudnya kemandirian tanaman pangan berkelanjutan**

Tujuan ini menekankan pada kemandirian tanaman pangan berkelanjutan, dimana sebagian besar produksi dapat memenuhi kebutuhan konsumsi pangan masyarakat asal tanaman pangan. Penerapan sistem budidaya tanaman pangan berkelanjutan memastikan produksi tidak hanya memenuhi kebutuhan pangan jangka pendek, namun juga harus dapat memenuhi kebutuhan pangan asal tanaman pangan di masa yang akan datang, khususnya dalam mengantisipasi krisis pangan yang diperkirakan akan melanda dunia, termasuk Indonesia. Tujuan ini memiliki 2 (dua) Indikator Tujuan (IT), yaitu:

- IT.1.1: Indeks swasembada pangan asal tanaman pangan
- IT.1.2: Pertumbuhan produksi KSPP Tanaman Pangan

■ **Tujuan 2: Terwujudnya hilirisasi dan ekspor produk tanaman pangan**

Tujuan ini menekankan pada 2 hal penting, yaitu hilirisasi produk hasil tanaman pangan serta ekspor produk hasil tanaman pangan. Hilirisasi atas produk hasil tanaman pangan dilakukan untuk meningkatkan nilai jual produk tersebut, dengan menjual *end product* dibanding dengan *raw product*. Peningkatan nilai jual produk tentunya akan dapat berdampak langsung terhadap pendapatan petani tanaman pangan yang pada akhirnya akan mampu mendorong kesejahteraan petani tersebut. Sedangkan peningkatan ekspor produk hasil tanaman pangan dilakukan dalam meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dari sisi ekspor. Peningkatan ekspor dilakukan melalui upaya penyediaan

produk berpotensi ekspor, pemenuhan persyaratan ekspor negara tujuan hingga pencarian potensi negara tujuan ekspor yang dapat dipenuhi oleh Indonesia. Kontribusi ekspor tanaman pangan terhadap PDB tidak hanya berdampak terhadap peningkatan nilai transaksinya saja, namun juga sebaran produk ekspor tanaman Indonesia pada beberapa negara di dunia. Indikator ini memiliki 2 (dua) Indikator Tujuan (IT), yaitu:

- IT 2.1 Nilai ekspor komoditas tanaman pangan (US\$)
- IT 2.2 Persentase hilirisasi komoditas pertanian

■ **Tujuan 3: Meningkatnya tata Kelola birokrasi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan yang profesional dan akuntabel**

Tujuan ini merupakan upaya dalam meningkatkan kualitas tata kelola birokrasi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan yang profesional dan akuntabel, sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi birokrasi serta meningkatkan kualitas pelayanan publik Direktorat Jenderal Tanaman Pangan. Tujuan ini memiliki 1 (satu) Indikator Tujuan (IT), yaitu IT 3.1 Peningkatan Indeks tata Kelola birokrasi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.

Berdasarkan data di atas, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan memiliki 3 (tiga) tujuan yang capaiannya diukur melalui 5 (lima) indikator tujuan. Berikut rangkumannya.

Tabel 4. Tujuan dan Indikator Tujuan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan 2025 - 2029

Tujuan	Indikator Tujuan	Sat	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
Tujuan 1 Terwujudnya kemandirian tanaman pangan berkelanjutan	IT 1.1 Indeks swasembada pangan asal tanaman pangan	Indeks	0,683	0,686	0,687	0,692	0,696

Tujuan	Indikator Tujuan	Sat	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
	IT 1.2 Pertumbuhan produksi KSPP Tanaman Pangan	%	-	588,70	111,24	50,79	27,53
Tujuan 2 Terwujudnya hilirisasi dan ekspor produk tanaman pangan	IT 2.1 Nilai ekspor komoditas tanaman pangan (US\$)	US\$	175.451,15	176.488,78	177.532,54	178.582,48	179.638,62
	IT 2.2 Persentase hilirisasi komoditas pertanian	%	43	57	71	86	100
Tujuan 3 Meningkatnya tata Kelola birokrasi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan yang profesional dan akuntabel	IKP 3.1 Peningkatan Indeks tata Kelola birokrasi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan	%	-	0,5	0,5	0,5	0,5

2.5 POHON KINERJA TERKAIT DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN 2025 – 2029

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021, Pohon kinerja merupakan alat bantu bagi organisasi untuk mengawal struktur logika sebab-akibat atas berbagai kondisi yang diperlukan organisasi dalam menghasilkan *outcome* yang diinginkan. Penyusunan pohon kinerja bertujuan untuk memastikan setiap aparatur negara yang ada di dalam organisasi memiliki kontribusi yang jelas dan terukur dalam upaya pencapaian kinerja organisasi. Dengan demikian, setiap individu di dalam organisasi harus mengambil peranan dan tanggung jawab dalam mendukung pencapaian kinerja organisasi. Oleh sebab itu, kinerja organisasi harus dijabarkan dan selaras dengan kinerja unit kerja dan kinerja individu.

Penerjemahan pohon kinerja dalam penjenjangan kinerja dilakukan dengan melengkapi indikator pada setiap level dengan komponen

perencanaan. Hal ini mencakup penentuan variabel yang berperan sebagai tujuan, sasaran strategis, sasaran program, maupun sasaran kegiatan.

Adapun penerjemahan pohon kinerja ke dalam komponen perencanaan dilakukan dengan mengklasifikasikan *final outcome* sebagai Tujuan, *intermediate outcome 1* sebagai Sasaran Strategis, *intermediate outcome 2* sebagai Sasaran Program, serta *immediate outcome* sebagai Sasaran Kegiatan.

Berdasarkan hasil diskusi, terdapat 6 (Enam) *final outcome* yang ingin diwujudkan Kementerian Pertanian, meliputi:

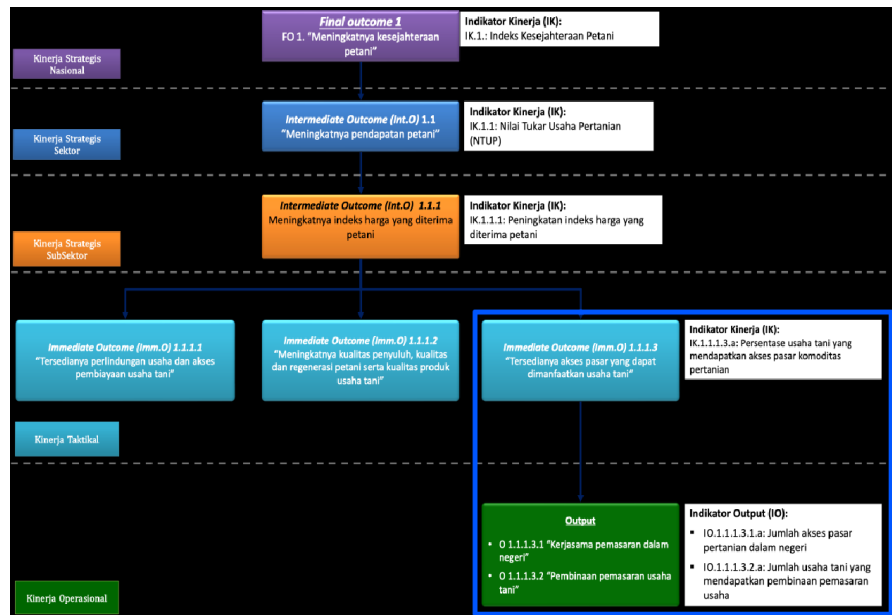
- *Final Outcome 1 (FO.1)* "Meningkatnya Kesejahteraan Petani."
- *Final Outcome 2 (FO.2)* "Terwujudnya Kemandirian Pangan Asal Pertanian."
- *Final Outcome 3 (FO.3)* "Terwujudnya kontribusi ekspor sektor pertanian terhadap PDB Indonesia."
- *Final Outcome 4 (FO.4)*: "Terwujudnya ketahanan energi nasional."
- *Final Outcome 5 (FO.5)*: "Meningkatnya kesehatan masyarakat Indonesia."
- *Final Outcome 6 (FO.6)*: "Terwujudnya Reformasi Birokrasi Nasional."

Kontribusi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan pada FO.1, FO.2, FO.3, dan FO.6. Masing-masing kontribusi tersebut akan dijelaskan lebih rinci pada subbab berikut.

2.5.1 FINAL OUTCOME 1

Kontribusi pertama Direktorat Jenderal Tanaman Pangan pada FO.1 "Meningkatnya kesejahteraan petani" yang diukur dengan Indikator Kinerja (IK) "Indeks Kesejahteraan Petani". Kesejahteraan petani merupakan kondisi di mana petani dapat hidup layak dan memiliki akses terhadap sumber daya, pendidikan, kesehatan, dan fasilitas dasar lainnya. Pohon

kinerja terkait FO.1 ini dapat dijabarkan pada gambar berikut ini.



Gambar 36. Final Outcome 1

Gambar di atas menjelaskan bahwa kesejahteraan petani berbanding lurus dengan pendapatan petani. Dengan kata lain, jika pendapatan petani terus meningkat, maka kesejahteraan dapat terwujud. Oleh karena itu, rumusan *Intermediate Outcome* (Int.O) 1.1 berbunyi "Meningkatnya pendapatan petani" yang diukur dengan IK 1.1.a "Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP)." Pendapatan merujuk pada selisih yang didapatkan antara penerimaan terhadap biaya yang dikeluarkan. Pendapatan pada sektor pertanian tertuang dalam NTUP untuk melihat selisih antara indeks harga yang diterima petani terhadap indeks harga yang dibayar petani.

Peningkatan pendapatan dapat terjadi jika indeks harga yang diterima petani bertumbuh. Indeks harga tersebut mengacu pada perubahan tingkat harga rata-rata produk pertanian yang dijual oleh petani pada suatu periode tertentu dibandingkan

dengan periode dasar. Indeks harga yang diterima petani diterjemahkan menjadi *Intermediate Outcome (Int.O) 1.1.1* yang diukur dengan IK.1.1.1 "Peningkatan indeks harga yang diterima petani." Mengacu pada Peraturan Menteri PANRB nomor 89 tahun 2021, *Intermediate Outcome (Int.O) 1.1.1* diterjemahkan menjadi Sasaran Program (SP) dan Indikator Kinerja Program (IKP) untuk level Unit Kerja Eselon I (UKE I), termasuk Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.

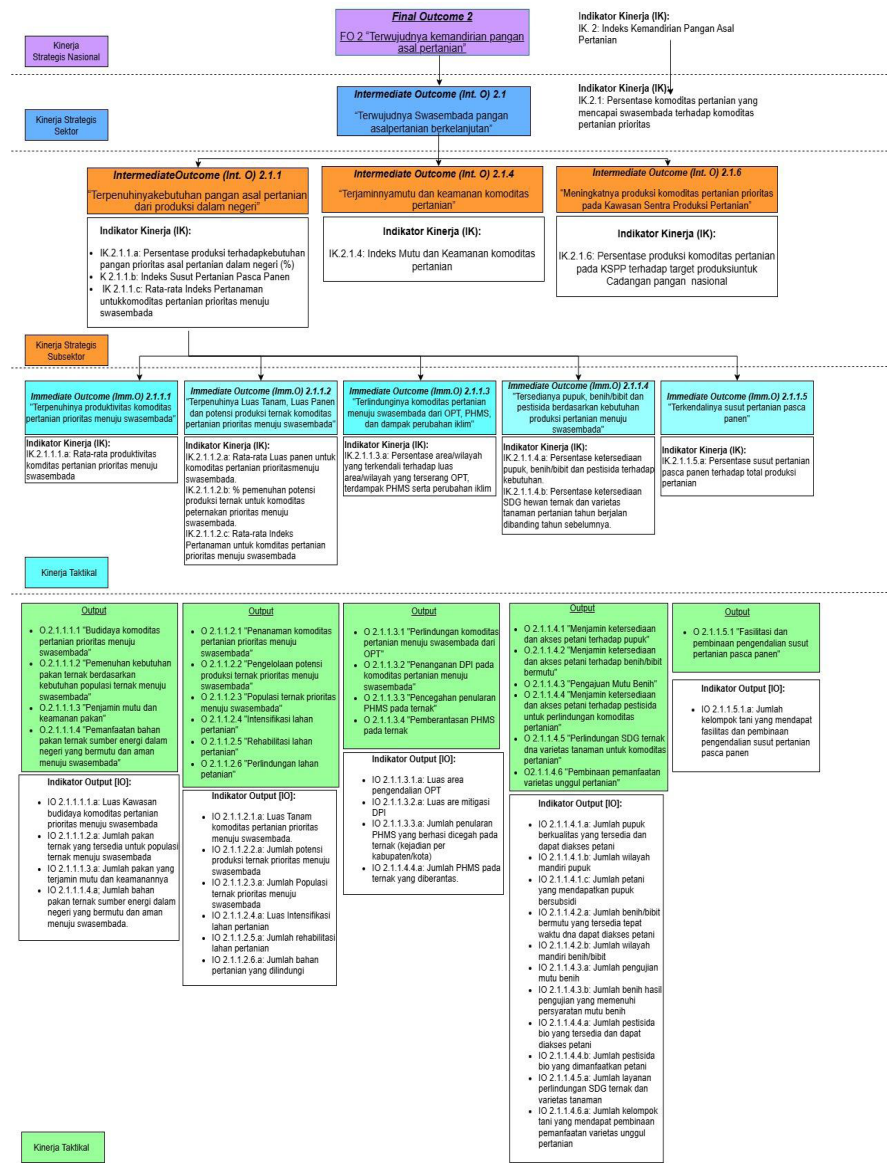
Peningkatan indeks harga yang diterima petani setidaknya dipengaruhi oleh 3 (tiga) faktor. Pertama, perlindungan usaha dan akses pembiayaan usaha tani (*Immediate Outcome 1.1.1.1*). Kedua, kualitas SDM (Petani, Penyuluh) dan regenerasi petani (*Immediate Outcome 1.1.1.2*). Ketiga, ketersediaan akses pasar yang dapat dimanfaatkan oleh usaha petani (*Immediate Outcome 1.1.1.3*). UKE I Kementerian Pertanian dengan fungsi komoditas (Jenderal Hortikultura, Direktorat Jenderal Perkebunan serta Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan) bersama-sama bertanggung jawab mewujudkan *Immediate Outcome 1.1.1.3* sesuai dengan tugas dan fungsinya. Agar *Immediate Outcome 1.1.1.3* dapat terwujud, terdapat beberapa *output* harus dihasilkan, sebagai berikut

- O 1.1.1.3.1 "Kerja sama pemasaran dalam negeri", dengan indikator *output* "IO.1.1.1.3.1.a: Jumlah akses pasar pertanian dalam negeri"
- O 1.1.1.3.2 "Pembinaan pemasaran usaha tani", dengan indikator *output* "IO.1.1.1.3.2.a: Jumlah usaha tani yang mendapatkan pembinaan pemasaran usaha".

2.5.2 FINAL OUTCOME 2 - INTERMEDIATE OUTCOME 2.1.1

Final outcome kedua yang terkait dengan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan adalah FO 2. "Terwujudnya kemandirian

pangan asal pertanian", dengan Indikator Kinerja (IK) IK.2. Indeks Kemandirian pangan asal pertanian. Pohon kinerja FO 2 diterjemahkan menjadi 6 (enam) *Intermediate Outcome* (Int.O) sebagai salah satu faktor yang mendukung terwujudnya kemandirian pangan asal pertanian. Penerjemahan pertama yang terkait dengan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan yaitu pada Int.O 2.1.1 sebagai berikut.



Gambar 37. FO.2 - Intermediate Outcome 2.1.1

Berdasarkan gambar di atas, Int.O 2.1.1 “pemenuhan kebutuhan pangan asal pertanian dari produksi dalam negeri.” Pemenuhan kebutuhan pangan asal pertanian dari produksi dalam negeri merepresentasikan kemampuan atau kapasitas produksi pangan asal pertanian nasional dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri. Int.O 2.1.1 diukur dengan 3 (tiga) indikator sebagai berikut.

- IK.2.1.1.a: Persentase produksi terhadap kebutuhan pangan prioritas asal pertanian dalam negeri (%)
- IK 2.1.1.b: Indeks Susut Pertanian Pasca Panen
- IK 2.1.1.c: Rata-rata Indeks Pertanaman untuk komoditas pertanian prioritas menuju swasembada

Terdapat beberapa faktor yang memengaruhi pemenuhan kebutuhan pangan asal pertanian dari produksi dalam negeri. Faktor pertama yaitu terpenuhinya produktivitas pertanian prioritas (Imm.O 2.1.1.1). Faktor kedua yaitu terpenuhinya luas tanam, luas panen dan potensi produksi ternak komoditas pertanian (Imm.O 2.1.1.2). Faktor ketiga yaitu terlindunginya komoditas pertanian menuju swasembada dari OPT, PHMS dan dampak perubahan iklim (Imm.O 2.1.1.3). Faktor keempat yaitu terpenuhinya pupuk, benih/bibit dan pestisida berdasarkan kebutuhan produksi pertanian menuju swasembada (Imm.O 2.1.1.4). Faktor kelima yaitu pengendalian terkendalnya susut pertanian pasca panen (Imm.O 2.1.1.5). Kontribusi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan pada keempat *intermediate outcome*, kecuali Imm.O 2.1.1.5.

Faktor pertama, “Terpenuhinya produktivitas komoditas pertanian prioritas menuju swasembada” (Imm.O 2.1.1.1). Pemenuhan produktivitas pertanian sendiri merupakan upaya untuk meningkatkan efisiensi dan hasil produksi di sektor

pertanian dengan memaksimalkan penggunaan sumber daya seperti lahan, air, tenaga kerja, teknologi, dan *input* pertanian lainnya yang bertujuan untuk optimalisasi hasil panen. Imm.O 2.1.1.1 diukur dengan IK.2.1.1.1.a “rata-rata produktivitas komoditas pertanian prioritas menuju swasembada.” Peningkatan produktivitas komoditas pertanian dapat dicapai jika beberapa *output* dibawah ini dapat dihasilkan.

- O2.1.1.1.1 “Budidaya komoditas pertanian prioritas menuju swasembada” dengan indikator IO.2.1.1.1.1.a: Luas Kawasan budidaya komoditas pertanian prioritas menuju swasembada.
- O.2.1.1.1.2 “Pemenuhan kebutuhan pakan ternak berdasarkan kebutuhan populasi ternak menuju swasembada” dengan indikator IO.2.1.1.1.2.a: Jumlah pakan ternak yang tersedia untuk populasi ternak menuju swasembada.
- O.2.1.1.1.3 “Penjaminan mutu dan keamanan pakan” dengan indikator IO.2.1.1.1.3.a: Jumlah pakan yang terjamin mutu dan keamanannya.
- O.2.1.1.1.4 “Pemanfaatan bahan pakan ternak sumber energi dalam negeri yang bermutu dan aman menuju swasembada” dengan indikator IO.2.1.1.1.4.a: Jumlah bahan pakan ternak sumber energi dalam negeri yang bermutu dan aman menuju swasembada.

Faktor kedua “Terpenuhinya luas tanam, luas panen dan potensi produksi ternak komoditas pertanian prioritas menuju swasembada” (Imm.O 2.1.1.2). Pemenuhan luas panen mengacu pada ukuran atau total area lahan yang digunakan untuk memanen suatu jenis komoditas pertanian dalam satu musim atau satu tahun. Luas panen berbeda dengan luas

tanam karena untuk beberapa komoditas, terdapat variabel yang memengaruhi luas panen seperti gangguan OPT dan DPI. Imm.O 2.1.1.2 diukur dengan 3 (tiga) indikator sebagai berikut.

- O2.1.1.1.1 “Budidaya komoditas pertanian prioritas menuju swasembada” dengan indikator IO.2.1.1.1.1.a: Luas Kawasan budidaya komoditas pertanian prioritas menuju swasembada.
- O.2.1.1.1.2 “Pemenuhan kebutuhan pakan ternak berdasarkan kebutuhan populasi ternak menuju swasembada” dengan indikator IO.2.1.1.1.2.a: Jumlah pakan ternak yang tersedia untuk populasi ternak menuju swasembada.
- O.2.1.1.1.3 “Penjaminan mutu dan keamanan pakan” dengan indikator IO.2.1.1.1.3.a: Jumlah pakan yang terjamin mutu dan keamanannya.
- O.2.1.1.1.4 “Pemanfaatan bahan pakan ternak sumber energi dalam negeri yang bermutu dan aman menuju swasembada dengan indikator IO.2.1.1.1.4.a: Jumlah bahan pakan ternak sumber energi dalam negeri yang bermutu dan aman menuju swasembada

Faktor ketiga “Terlindunginya komoditas pertanian menuju swasembada dari OPT, PHMS dan dampak perubahan iklim” (Imm.O 2.1.1.3). Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) adalah semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau mengakibatkan kematian tumbuhan. Dampak perubahan iklim (DPI) adalah kerugian yang diakibatkan oleh terjadinya perubahan iklim yang dapat dihitung secara langsung terhadap penyelenggaraan pertanian. Gangguan OPT dan DPI menjadi faktor koreksi yang dapat mengganggu pemenuhan kebutuhan pangan karena mengurangi angka

produksi. Serangan OPT perlu dikendalikan, salah satunya menggunakan pestisida sementara pengendalian tidak bisa dilakukan terhadap DPI, namun lebih kepada manajemen risiko untuk memitigasi DPI. Imm.O 2.1.1.3 diukur dengan indikator Persentase area/wilayah yang terkendali terhadap luas area/wilayah yang terserang OPT, terdampak PHMS serta perubahan iklim.

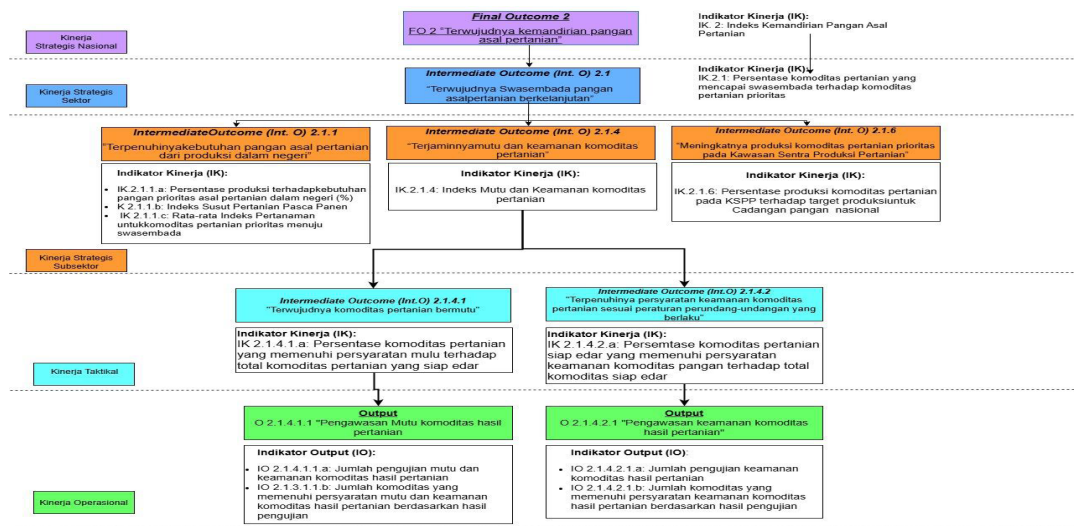
Faktor keempat “ Tersedianya pupuk, benih/bibit dan pestisida berdasarkan kebutuhan produksi pertanian menuju swasembada” (Imm.O 2.1.1.4). Faktor yang berada dalam lingkup tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan adalah benih. Definisi benih mengacu pada tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan/atau mengembangkan tanaman. Ketersediaan benih berkualitas dan kemudahan akses petani terhadap benih akan memengaruhi kemampuan tanam petani. Intervensi negara diperlukan untuk memastikan petani mendapatkan akses terhadap benih tepat waktu sehingga musim tanam komoditas pertanian dapat diselenggarakan tepat waktu. Untuk menjamin ketersediaan benih, terdapat beberapa *output* yang dihasilkan sebagai berikut.

1. Jumlah benih/bibit bermutu yang tersedia tepat waktu dan dapat diakses petani untuk komoditas pertanian menuju swasembada dengan indikator sebagai berikut:
 - a. IO.2.1.1.4.1.a: Jumlah pupuk berkualitas yang tersedia dan dapat diakses petani.
 - b. IO.2.1.1.4.1.b: Jumlah wilayah mandiri pupuk.
 - c. IO.2.1.1.4.1.c: Jumlah petani yang mendapatkan pupuk bersubsidi.

2. Jumlah wilayah mandiri benih/bibit untuk komoditas pertanian menuju swasembada dengan indikator sebagai berikut:
 - a. IO.2.1.1.4.2.a: Jumlah benih/bibit bermutu yang tersedia tepat waktu dan dapat diakses petani.
 - b. IO.2.1.1.4.2.b: Jumlah wilayah mandiri benih/bibit.
3. Jumlah petani yang mendapatkan bantuan benih/bibit untuk komoditas pertanian menuju swasembada dengan indikator sebagai berikut:
 - a. IO.2.1.1.4.3.a: Jumlah pengujian mutu benih.
 - b. IO.2.1.1.4.3.b: Jumlah benih hasil pengujian yang memenuhi persyaratan mutu benih.
4. Jumlah pengujian mutu benih dengan indikator sebagai berikut:
 - a. IO.2.1.1.4.4.a: Jumlah pestisida bio yang tersedia dan dapat diakses petani.
 - b. IO.2.1.1.4.4.b: Jumlah pestisida bio yang dimanfaatkan petani.
5. Jumlah benih hasil pengujian yang memenuhi persyaratan mutu benih dengan indikator IO.2.1.1.4.5.a: Jumlah layanan perlindungan SDG ternak dan varietas tanaman.
6. Pembinaan pemanfaatan varietas unggul pertanian dengan indikator IO.2.1.1.4.6.a: Jumlah kelompok tani yang mendapat pembinaan pemanfaatan varietas unggul pertanian.

2.5.3 FINAL OUTCOME 2 – INTERMEDIATE OUTCOME 2.1.4

Final outcome berikutnya yang memengaruhi terwujudnya swasembada pangan asal pertanian berkelanjutan adalah mutu dan keamanan komoditas pertanian. Hal tersebut dituangkan dalam *intermediate outcome* 2.1.4 “Terjaminnya mutu dan keamanan komoditas pertanian.” Penjaminan mutu dan keamanan dilakukan dengan indikator “Indeks Mutu dan Keamanan komoditas pertanian.”



Gambar 38. FO.2 - Intermediate Outcome 2.1.4

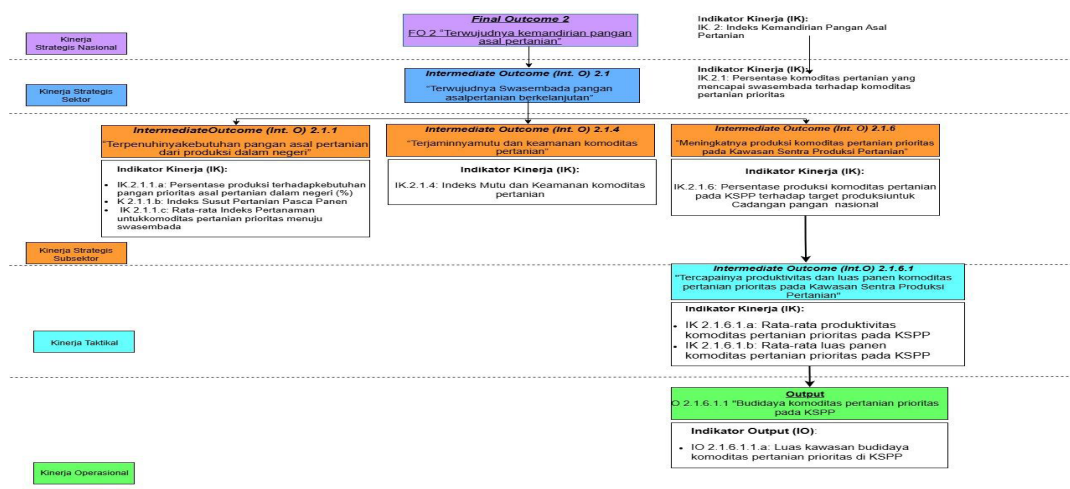
Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 20/Permentan/Ot.140/2/2010, Sistem Jaminan Mutu Pangan Hasil Pertanian selanjutnya disebut sistem jaminan mutu adalah tatanan dan upaya untuk menghasilkan produk yang aman dan bermutu sesuai standar atau persyaratan teknis minimal. Mutu komoditas pertanian dituangkan dalam *Intermediate Outcome (Int.O)* 2.1.4.1 “Terwujudnya komoditas pertanian bermutu” yang diukur dengan indikator “Persentase komoditas pertanian yang memenuhi persyaratan mutu terhadap total komoditas pertanian yang siap edar.” Untuk

dapat memenuhi mutu komoditas pertanian dibutuhkan *output* pengawasan mutu komoditas hasil pertanian. Pengukuran terhadap pengawasan mutu pertanian yaitu “Jumlah pengujian mutu komoditas hasil pertanian” dan “Jumlah komoditas yang memenuhi persyaratan mutu komoditas hasil pertanian berdasarkan hasil pengujian.”

Keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia. Keamanan pangan sangat penting untuk kesehatan masyarakat, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas sosial. Ketika pangan aman dan tersedia dengan baik, masyarakat lebih sehat, produktif, dan memiliki ketahanan dalam menghadapi tantangan ekonomi atau lingkungan. Pengawasan keamanan komoditas hasil pertanian merupakan salah satu jawaban untuk menjawab tantangan keamanan komoditas hasil pertanian. Pengawasan bertujuan untuk memastikan komoditas pertanian yang beredar memenuhi persyaratan keamanan melalui mekanisme pengujian.

2.5.4 FINAL OUTCOME 2 – INTERMEDIATE OUTCOME 2.1.6

Final outcome kedua adalah “Terwujudnya kemandirian pangan asal pertanian” yang diukur dengan indikator “indeks kemandirian pangan asal pertanian.” Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012, kemandirian pangan adalah kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi Pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan Pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat.



Gambar 39. FO.2 - Intermediate Outcome 2.1.6

Kemandirian pangan dapat terwujud jika cadangan pangan meningkat. Peningkatan cadangan pangan diukur dengan indikator "Persentase Peningkatan cadangan pangan." Cadangan pangan nasional terdiri dari cadangan pangan Pemerintah dan cadangan pangan masyarakat. Cadangan pangan Pemerintah terdiri dari cadangan pangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, cadangan pangan Pemerintah Kabupaten/Kota dan cadangan pangan Pemerintah Desa. Peningkatan cadangan pangan nasional didukung oleh peningkatan produksi komoditas pertanian pada Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP) dan peningkatan ketersediaan lumbung pangan nasional. Dari dua hal tersebut, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan berkontribusi pada peningkatan produksi komoditas pertanian pada KSPP.

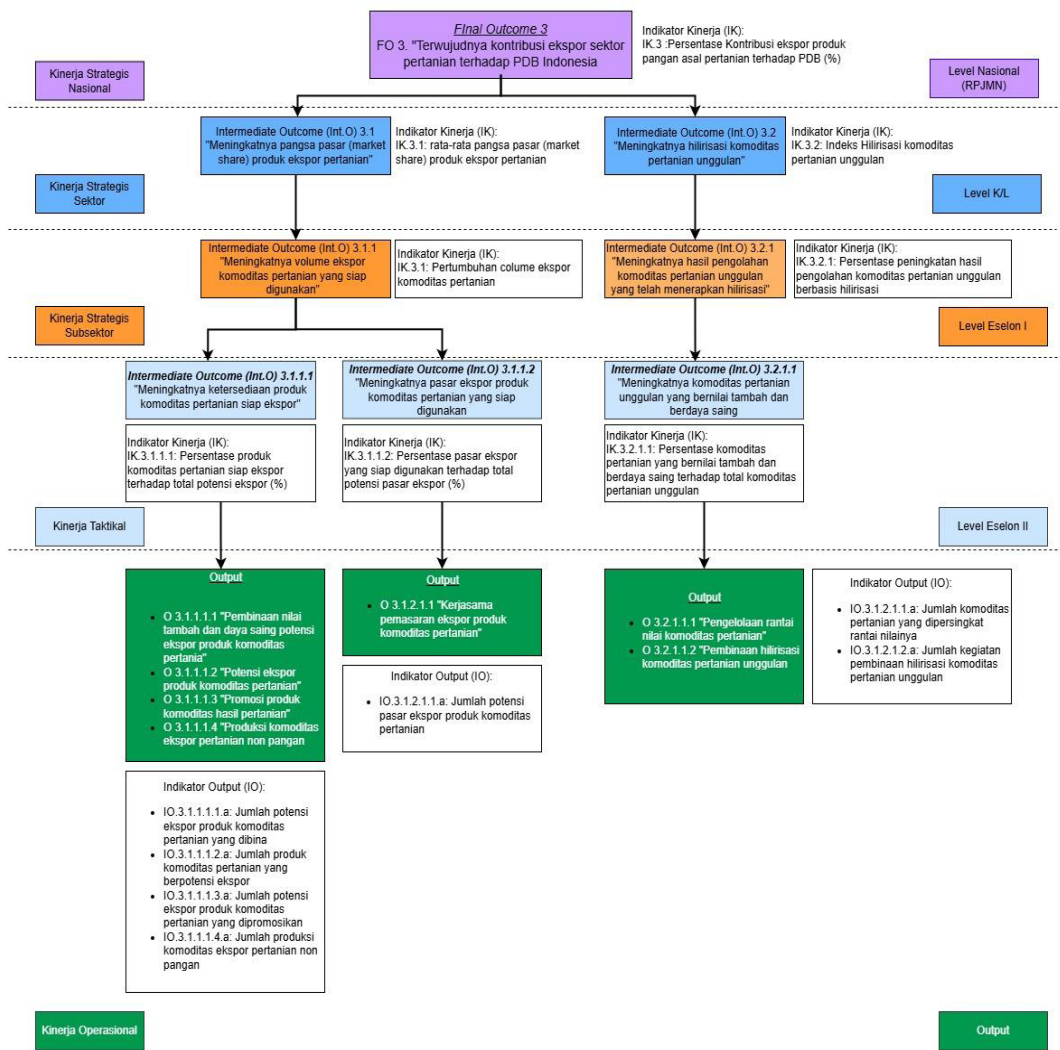
KSPP merupakan konsep pengembangan pangan yang dilakukan secara terintegrasi yang mencakup pertanian pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan di suatu kawasan berskala luas dengan menggunakan sistem Industrial

yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna, organisasi dan manajemen modern dengan memanfaatkan sumber daya secara optimal dan lestari yang berwawasan lingkungan dan kelembagaan yang kuat, serta dikelola secara profesional, didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas. Peningkatan produksi komoditas pangan prioritas pada KSPP diukur dengan indikator “persentase produksi komoditas pertanian pada KSPP terhadap target produksi untuk cadangan pangan nasional.”

Untuk dapat meningkatkan produksi pertanian pada KSPP, maka produktivitas dan luas panen komoditas harus tercapai. Capaian diukur melalui indikator “rata-rata produktivitas komoditas pertanian prioritas pada KSPP” dan “rata-rata luas panen komoditas pertanian prioritas pada KSPP.” Untuk dapat menghasilkan produktivitas dan luas panen komoditas pertanian pada KSPP, dibutuhkan *output* berupa Budidaya komoditas pertanian prioritas pada KSPP yang diukur dengan indikator “Luas Kawasan budidaya komoditas pertanian prioritas di KSPP.”

2.5.5 FINAL OUTCOME 3 – INTERMEDIATE OUTCOME 3.1.1 DAN 3.2.1

Final outcome ketiga yaitu “Terwujudnya kontribusi ekspor sektor pertanian terhadap PDB Indonesia.” Kontribusi ekspor di tingkat nasional diukur dengan indikator “Persentase Kontribusi ekspor produk pangan asal pertanian terhadap PDB (%)” Peningkatan ekspor dapat mendorong peningkatan permintaan produk yang berpengaruh pada peningkatan produktivitas sehingga PDB dapat meningkat.



Gambar 40. FO.3 - Intermediate Outcome 3.1.1 dan 3.2.1

Berdasarkan gambar di atas, peningkatan kontribusi ekspor terhadap PDB dapat terwujud dengan peningkatan pangsa pasar produk ekspor pertanian dan peningkatan hilirisasi produk komoditas pertanian unggulan. Peningkatan pangsa pasar produk ekspor pertanian yang dimaksud merujuk pada bagian atau persentase produk pertanian suatu negara yang diekspor ke pasar internasional dibandingkan dengan total

produksi pertanian negara tersebut atau total ekspor pertanian global. Pangsa pasar ini menunjukkan seberapa besar kontribusi sektor pertanian suatu negara dalam perdagangan internasional, baik secara keseluruhan maupun di pasar-pasar tertentu.

Perluasan pangsa pasar perlu didukung oleh peningkatan volume ekspor produk pertanian sebagai representasi dari jumlah total komoditas pertanian yang dikirim atau diekspor dari suatu negara ke negara lain dalam periode waktu tertentu. Volume ekspor komoditas pertanian mencerminkan tingkat aktivitas perdagangan luar negeri dalam sektor pertanian nasional. Peningkatan volume ekspor pertanian diukur dengan "Pertumbuhan volume ekspor komoditas pertanian."

Peningkatan volume ekspor didukung dengan ketersediaan produk komoditas pertanian siap ekspor dan peningkatan pasar ekspor produk pertanian yang siap digunakan. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa peningkatan volume ekspor produk pertanian dapat meningkat jika komoditas pertanian siap di ekspor dan pangsa pasar produk pertanian dapat dimanfaatkan dengan baik. Untuk dapat meningkatkan pangsa pasar dibutuhkan kerja sama pemasaran ekspor produk pertanian yang diukur dengan indikator "Jumlah potensi pasar ekspor produk komoditas pertanian." Agar dapat meningkatkan ketersediaan produk komoditas pertanian siap ekspor, maka dibutuhkan beberapa *output* sebagai berikut.

1. Pembinaan nilai tambah dan daya saing potensi ekspor produk komoditas pertanian yang diukur dengan indikator jumlah potensi ekspor produk komoditas pertanian yang dibina.

2. Potensi ekspor produk komoditas pertanian yang diukur dengan indikator jumlah produk komoditas pertanian yang berpotensi ekspor.
3. Promosi produk komoditas hasil pertanian yang diukur dengan indikator Jumlah potensi ekspor produk komoditas pertanian yang dipromosikan.
4. Produksi komoditas ekspor pertanian non pangan yang diukur dengan Produksi komoditas ekspor pertanian non pangan.

Peningkatan hilirisasi produk komoditas pertanian unggulan bertujuan untuk mengubah produk mentah (*raw material*) menjadi produk setengah jadi atau produk jadi yang memiliki nilai ekonomis lebih tinggi, sehingga dapat meningkatkan pendapatan petani dan industri serta memperluas akses pasar. Peningkatan hilirisasi dapat terjadi jika komoditas pertanian unggulan yang bernilai tambah dan berdaya saing meningkat. Keduanya dapat terwujud jika rantai nilai pertanian dapat dikelola dengan efisien serta pembinaan hilirisasi komoditas pertanian unggulan berjalan. Efisiensi rantai nilai yang dimaksud adalah memperpendek rantai nilai sehingga dapat mendorong peningkatan nilai bagi petani, bukan perantara.

2.5.6 FINAL OUTCOME 6

Final outcome keenam yaitu "Terwujudnya Reformasi Birokrasi Nasional." Perbaikan tata kelola menuju pemerintahan yang bersih, akuntabel dan modern dilakukan melalui implementasi Reformasi Birokrasi. Keberhasilan implementasi Reformasi Birokrasi Nasional merupakan upaya kolektif dan capaian agregat dari Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Implementasi Reformasi Birokrasi. Fokus penajaman implementasi RB terbagi menjadi 2 (dua), yaitu RB General

dan RB Tematik. RB General bertujuan untuk memperbaiki manajemen internal seluruh instansi pemerintah. RB Tematik mempercepat pelaksanaan agenda pembangunan nasional.

Dalam upaya perbaikan tata kelola, Kementerian Pertanian mengimplementasikan RB yang diterjemahkan menjadi *Intermediate Outcome 6.1* "Terwujudnya Reformasi Birokrasi Kementan dalam mendukung pencapaian Reformasi Birokrasi." Sesuai dengan fokus penajaman, implementasi RB General dan RB tematik, dilakukan secara kolektif melibatkan Unit Teknis dan Kesekretariatan sehingga perbaikan tata kelola dapat terlaksana secara menyeluruh.

Intermediate Outcome 6.1 "Terwujudnya Reformasi Birokrasi Kementan dalam mendukung pencapaian Reformasi Birokrasi" merupakan Indikator Kinerja Utama Sekretariat Jenderal namun dalam proses implementasinya dipengaruhi oleh implementasi RB di tingkat Unit Kerja (UKE) eselon I, sehingga implementasi RB di Tingkat UKE I diterjemahkan dalam Sasaran Program "Indeks Tata Kelola Birokrasi," masing-masing UKE I yang kemudian diterjemahkan lagi menjadi Indikator Kinerja Utama Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan yang terbagi dalam empat sasaran dan lima indikator kegiatan.

2.6 SASARAN PROGRAM DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN 2025 – 2029

Berdasarkan pohon kinerja yang telah diuraikan pada sub bab sebelumnya, maka Sasaran Program (SP) dan Indikator Kinerja Program (IKP) Direktorat Jenderal Tanaman Pangan tahun 2025-2029 dapat ditunjukkan pada tabel berikut ini.

Tabel 5. Sasaran Program Direktorat Jenderal Tanaman Pangan 2025 - 2029

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM
SP.1 Terpenuhinya Produksi Komoditas Tanaman Pangan dalam negeri	IKP 1.1 Produksi Padi
	IKP 1.2 Produksi Jagung
	IKP 1.3 Produksi Aneka Kacang
	IKP 1.4 Produksi Sorgum
	IKP 1.5 Produksi Ubi Jalar
	IKP 1.6 Produksi Kedelai
	IKP 1.7 Produksi Ubi Kayu
SP.2 Meningkatnya produksi komoditas Tanaman Pangan prioritas pada Kawasan Sentra Produksi Pertanian (KSPP)	IKP 2.1 Peningkatan produksi beras KSPP Kalimantan Tengah
	IKP 2.2 Peningkatan produksi beras KSPP Sumatera Selatan
	IKP 2.3 Peningkatan produksi beras KSPP Nusa Tenggara Timur
	IKP 2.4 Peningkatan produksi jagung KSPP Nusa Tenggara Timur
	IKP 2.5 Peningkatan produksi jagung KSPP Papua
	IKP 2.6 Peningkatan produksi beras KSPP Papua Selatan
SP.3 Meningkatnya indeks harga yang diterima petani Tanaman Pangan	IKP 3.1 Indeks harga yang diterima petani Tanaman Pangan
SP.4 Meningkatnya volume ekspor komoditas tanaman pangan	IKP 4.1 Volume ekspor komoditas tanaman pangan
SP.5 Terjaminnya mutu dan keamanan komoditas pertanian tanaman pangan	IKP 5.1 Indeks Mutu dan Keamanan komoditas pertanian tanaman pangan
SP.6 Meningkatnya hasil pengolahan komoditas tanaman pangan unggulan yang telah menerapkan hilirisasi	IKP 6.1 Indeks hilirisasi komoditas tanaman pangan unggulan

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM
SP.7 Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Lingkup Ditjen Tanaman Pangan yang baik, transparan dan akuntabel	IKP 7.1 Indeks tata kelola birokrasi Ditjen. Tanaman Pangan

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEMENTERIAN PERTANIAN 2025 – 2029

Arah kebijakan dan strategi Kementerian Pertanian 2025 – 2029 merupakan *strategic direction* dan upaya yang dilakukan agar visi dapat terwujud. Pendekatan yang digunakan dalam perumusan arah kebijakan dan strategi Kementerian Pertanian 2025 – 2029 yaitu rumah strategi. Pendekatan rumah strategi dimulai dengan merumuskan atap sebagai tujuan akhir yang ingin diwujudkan (kuning) jika tujuan antara (merah) tercapai. Agar tujuan antara dapat tercapai, maka 8 (delapan) pilar dari rumah tersebut harus dapat berdiri tegak atau terlaksana (hijau). Pilar yang kuat dapat berdiri tegak dengan dukungan fondasi atau aset organisasi (biru) yang kuat. Berikut penjabaran lebih rinci dari rumah strategi Kementerian Pertanian 2025 – 2029.



Gambar 41. Kerangka Strategis Kementerian Pertanian 2025 - 2029

Berdasarkan gambar di atas, tujuan akhir yang ingin diwujudkan Kementerian Pertanian periode 2025 – 2029 adalah “Pertanian maju

berkelanjutan serta bermanfaat bagi Indonesia." Untuk mewujudkan tujuan akhir tersebut, maka kelima tujuan antara harus terwujud sebagai berikut.

- **Pertumbuhan volume usaha pertanian**

Pertumbuhan volume usaha berkorelasi positif dengan pendapatan petani sebagai salah satu komponen yang memengaruhi kesejahteraan petani. Petani yang sejahtera menjamin pertanian yang berkelanjutan pertanian nasional.

- **Kemandirian pangan asal pertanian**

Kemandirian yang dimaksud adalah pemilihan dan pengambilan kebijakan pangan nasional yang independen tanpa intervensi asing dan tidak tergantung pada impor. Kemandirian diwujudkan dengan swasembada pangan asal pertanian dan peningkatan ketersediaan cadangan pangan.

- **Bahan baku bio energi**

Bahan baku bio energi adalah bentuk kontribusi baru dari sektor pertanian terhadap ketahanan energi nasional. Dalam pandangan yang lebih luas, bahan baku bio energi merupakan upaya untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil sekaligus bentuk implementasi ekonomi hijau nasional.

- **Nilai tambah dan daya saing produk pertanian**

Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk merupakan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan nilai ekonomis komoditas pertanian. Peningkatan nilai tambah dilakukan dengan hilirisasi produk yang mendekatkan petani kepada pasar. Peningkatan daya saing produk daya saing merupakan implementasi standar mutu komoditas pertanian sehingga dapat bersaing dengan produk asing.

- **Kesehatan masyarakat dari penyakit hewan menular**

Pemerintah wajib melindungi masyarakat dari wabah atau penyakit menular melalui kegiatan Kewaspadaan Wabah, penanggulangan Wabah, dan pasca-Wabah. Salah satu penyakit yang berpotensi menimbulkan wabah adalah penyakit yang dapat menular dari manusia ke manusia dan/atau dari hewan ke manusia

Berdasarkan lima tujuan antara tersebut, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan berkontribusi pada 3 (tiga) tujuan antara. Kontribusi pertama pada “Kemandirian pangan asal pertanian.” Kontribusi kedua pada “Bahan baku bioenergi.” Kontribusi ketiga pada “.Nilai tambah dan daya saing produk pertanian.” Kelima tujuan antara dapat terwujud jika 8 (delapan) pilar berikut dapat berdiri kokoh. Lebih rinci mengenai pilar dalam rumah strategi Kementerian Pertanian 2025 – 2029 dapat dilihat sebagai berikut.

- **Pilar 1: Prasarana dan sarana pertanian sesuai kebutuhan produksi**

Kementerian Pertanian dalam menyediakan, mendistribusikan serta menjamin kualitas prasarana dan sarana pertanian sesuai kebutuhan produksi nasional. Orientasi pemenuhan prasarana dan sarana berdasarkan kebutuhan produksi berarti penyediaan dilakukan dengan akurat baik secara kuantitas maupun waktu penyaluran sesuai musim tanam.

- **Pilar 2: Produksi dan produktivitas pertanian secara modern dan berkelanjutan**

Modern dalam produksi dan produktivitas adalah perubahan paradigma penyelenggaraan pertanian dalam menggunakan sumber daya sebagai *input* (baik hayati dan non hayati) yang tepat sesuai kebutuhan. Dalam metode pertanian saat ini, sering disebut dengan pertanian presisi, yaitu metode pertanian yang menghasilkan *output* maksimal dengan *input* yang minimal serta mengurangi dampak terhadap lingkungan. Hal tersebut mustahil

terwujud tanpa pemanfaatan teknologi pertanian termutakhir di setiap proses penyelenggaraan pertanian.

- **Pilar 3: Hilirisasi komoditas pertanian strategis nasional**

Hilirisasi komoditas meningkatkan nilai ekonomis komoditas pertanian strategis melalui sistem pengolahan dan pemasaran yang efektif dan efisien. Kementerian Pertanian mendorong para petani untuk tidak lagi menjual bahan baku maupun produk setengah jadi, namun menjual produk yang siap konsumsi untuk meningkatkan pendapatan petani maupun usaha tani.

- **Pilar 4: Kawasan Sentra Produksi Pangan menuju lumbung pangan nasional**

Orientasi produksi tidak hanya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan saat ini namun jugaantisipasi kebutuhan pangan di masa mendatang. Pemerintah Indonesia meluncurkan program KSPP yaitu sentra produksi terintegrasi pangan untuk mendorong terciptanya lumbung pangan nasional untuk menghindari masyarakat dari kerawanan pangan yang disebabkan baik faktor dalam negeri maupun faktor global.

- **Pilar 5: Pelindungan usaha dan akses pembiayaan pertanian**

Pelindungan usaha merupakan upaya yang dilakukan untuk membantu petani menghadapi kesulitan dalam penyelenggaraan usaha tani. Pelindungan dilakukan dengan memberikan asuransi tani yang dapat mengurangi risiko gagal panen akibat perubahan iklim maupun gangguan OPT. Akses pembiayaan sendiri merupakan stimulus yang diberikan kepada petani untuk pengembangan usaha pertanian.

- **Pilar 6: Pengawasan kepatuhan tata kelola pertanian berkelanjutan**

Tata kelola pertanian berkelanjutan adalah bagaimana penyelenggaraan pertanian yang menyejahterakan petani (*profit*)

dan memberikan dampak seluas-luasnya kepada masyarakat (*people*) tanpa merusak lingkungan (*planet*). Kementerian Pertanian mengambil peran untuk mengawasi kepatuhan terhadap standar tata kelola pertanian berkelanjutan nasional.

- **Pilar 7: Regenerasi petani dan pengembangan usaha tani**

Pertumbuhan volume usaha tani dipengaruhi oleh 2 (dua) hal yaitu SDM pertanian dan produk pertanian. Profesi petani bukan pilihan mayoritas generasi muda sehingga di masa mendatang, ancaman kurangnya kuantitas petani berpotensi terjadi. Tentunya hal tersebut dapat memberikan dampak masif karena kebutuhan produk komoditas pertanian yang berbanding lurus dengan peningkatan populasi global maupun nasional, membutuhkan lebih banyak modal, termasuk modal manusia. Kualitas usaha tani yang dipengaruhi oleh pengetahuan dan kemampuan petani.

- **Pilar 8: Sistem kesehatan hewan nasional**

Penyelenggaraan Siskeswanas merupakan salah satu upaya kesehatan melalui Kementerian Pertanian untuk berkontribusi menjaga kesehatan masyarakat dari penyakit hewan melalui edukasi dan pengendalian penyakit menular. Fungsi edukasi yang dimaksud adalah memberikan pemahaman masyarakat mengenai jenis penyakit hewan yang dapat menular kepada masyarakat. Pelaksanaan edukasi mengisi kekosongan yang selama ini terjadi dikarenakan ketiadaan fungsi dari penyelenggara negara, dalam hal ini Kementerian/Lembaga.

Berdasarkan 8 (delapan) pilar di atas, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan berkontribusi pada 3 (tiga) tujuan antara. Kontribusi pertama pada "**Pilar 2:** Produksi dan produktivitas pertanian secara modern dan berkelanjutan." Kontribusi kedua pada "**Pilar 3:** Hilirisasi komoditas pertanian strategis nasional." Kontribusi ketiga pada "**Pilar 4:** Kawasan Sentra Produksi Pangan menuju lumbung pangan nasional." Pilar-

pilar di atas dapat berdiri kokoh dengan fondasi yang kuat. Tidak hanya sebagai aset strategis, pilar merupakan aspek penting yang perlu dimiliki Kementerian Pertanian sebagai berikut.

- **Sumber daya manusia dan kelembagaan pertanian**

Ketersediaan SDM yang kompeten sebagai pelaku pertanian berkelanjutan merupakan aset yang dapat memengaruhi perkembangan Lembaga pertanian. Kementerian Pertanian berperan dalam memfasilitasi pengembangan SDM dan pembentukan kelembagaan pertanian.

- **Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Pertanian**

Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian untuk mewujudkan tata kelola yang berkualitas melalui implementasi RB Generik dan RB Tematik untuk percepatan dampak konkret pembangunan sektor pertanian kepada masyarakat.

- **Standardisasi dan sertifikasi produk dan praktik pertanian**

Standardisasi produk dan praktik pertanian merupakan penyeragaman spesifikasi berdasarkan standar baku yang ditetapkan melalui regulasi. Standar baku merupakan kebutuhan minimum yang harus dipenuhi serta panduan untuk melaksanakan setiap tahapan dalam praktik pertanian nasional. Sertifikasi merupakan bagian dari penjaminan kualitas produk pertanian melalui Kementerian Pertanian.

- **Pemanfaatan teknologi pertanian modern**

Penyediaan teknologi pertanian modern melalui prasarana dan sarana pertanian dan mendorong penggunaan teknologi tersebut oleh para petani dengan memberikan pemahaman dan pendampingan.

- **Tata kelola pertanian berkelanjutan (*Good Agricultural Practices, Good Handling Practices, Good Farming Practices, dll*)**

Tata kelola pertanian berkelanjutan merupakan pendekatan pertanian modern yang berupaya menjamin akses generasi mendatang terhadap komoditas pertanian serta peningkatan kualitas, mutu dan keamanan komoditas pertanian. Kementerian Pertanian berkewajiban untuk menciptakan instrumen, memberikan edukasi kepada petani maupun kelompok tani mengenai sistem pertanian berkelanjutan, hingga mendorong implementasi pertanian berkelanjutan

Berdasarkan tujuan akhir, tujuan antara, upaya dan modal strategis di atas, dirumuskan arah kebijakan dan strategi Kementerian Pertanian 2025 – 2029 sebagai berikut.

- **Arah Kebijakan 1 “Peningkatan pendapatan petani dalam mewujudkan kesejahteraan petani Indonesia.”** Arah kebijakan tersebut dilaksanakan dengan strategi:

- **Strategi 1:** Meningkatkan akses pembiayaan petani serta perlindungan usaha pertanian.
- **Strategi 2:** Regenerasi petani dan pengembangan usaha tani melalui penyuluhan dan pengembangan modal manusia (*human capital*) pertanian berbasis kompetensi.
- **Strategi 3:** Meningkatnya kualitas dan pangsa pasar produk pertanian nasional.
- **Strategi 4:** Pembinaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara bidang pertanian dan peningkatan kapasitas kelembagaan pertanian nasional yang produktif

- **Arah Kebijakan 2 “Kemandirian pangan nasional dalam memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri.”** Arah kebijakan tersebut dilaksanakan dengan strategi:
 - **Strategi 5:** Swasembada pangan untuk komoditas pangan strategis nasional berdasarkan kebutuhan pangan masyarakat dengan meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian secara berkelanjutan
 - **Strategi 6:** Menerapkan tata Kelola sistem budi daya pertanian berkelanjutan sesuai amanat peraturan perundang-undangan
 - **Strategi 7:** Membangun Kawasan Sentra Produksi Pertanian untuk memastikan cadangan pangan nasional dapat memenuhi kebutuhan pangan masyarakat serta mengantisipasi krisis pangan dunia berdasarkan produksi dalam negeri.
 - **Strategi 8:** Standardisasi dan sertifikasi produk dan praktik pertanian.
 - **Strategi 9:** Pemanfaatan teknologi pertanian modern.
- **Arah Kebijakan 3 “Memastikan ketersediaan bahan baku bio energi dalam mendukung terwujudnya ketahanan energi nasional.”** Arah kebijakan tersebut dilaksanakan dengan **strategi 10** “Memenuhi kebutuhan bahan baku bio energi yang berasal dari komoditas hasil pertanian”
- **Arah Kebijakan 4 “Peningkatan nilai tambah dan daya saing komoditas pertanian Indonesia.”** Arah kebijakan tersebut dilaksanakan dengan **strategi 11** “Hilirisasi komoditas pertanian strategis nasional.”
- **Arah Kebijakan 5 “Peningkatan Kesehatan Masyarakat dari penyakit hewan menular.”** Arah kebijakan tersebut dilaksanakan dengan **strategi 12** “Penerapan sistem kesehatan hewan nasional.”

- **Arah Kebijakan 6 “Tata kelola birokrasi Kementerian Pertanian yang transparan, akuntabel dan profesional.”** Arah kebijakan tersebut dilaksanakan dengan **strategi 13** “Implementasi Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian dalam mewujudkan *good government governance*”.

3.2 ARAH KEBIJAKAN, PROGRAM DAN KEGIATAN DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN 2025 – 2029

Metode perumusan arah kebijakan, program dan kegiatan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan mengadopsi pendekatan Kementerian Pertanian. Didahului dengan visualisasi rumah strategi yang menggambarkan keterkaitan antara tujuan akhir dan tujuan antara yang ingin diwujudkan, pilar yang mendukung tercapainya tujuan tersebut hingga fondasi yang wajib tersedia agar pilar dapat tegak berdiri. Berikut rumah strategi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan 2025 - 2029.



Gambar 42. Rumah Strategi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan 2025 - 2029

Berdasarkan rumah strategi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan di atas, tujuan akhir yang ingin diwujudkan adalah Visi 2025 - 2029 yaitu **"Tanaman Pangan Maju, Berkelanjutan serta bermanfaat bagi Rakyat Indonesia."** Untuk mewujudkan kondisi akhir tersebut maka kemandirian tanaman pangan harus terwujud. Mandiri berarti tanaman pangan dapat diproduksi dan dikembangkan oleh masyarakat Indonesia tanpa ketergantungan tinggi pada impor. Kondisi tanaman pangan mandiri dapat terwujud jika benih bermutu tanaman pangan tersedia; budi daya tanaman pangan yang produktif dan berkelanjutan; terselenggaranya perlindungan tanaman pangan dari OPT dan DPI; serta terselenggaranya hilirisasi komoditas tanaman pangan bernilai tambah.

Ketersediaan benih bermutu menggambarkan keberadaan dan akses terhadap benih yang memenuhi standar mutu, disertifikasi, dan diberi label. Budi daya tanaman pangan yang produktif merepresentasikan keberhasilan sistem budi daya dengan produktivitas yang terus meningkat sementara berkelanjutan mengacu pada pengelolaan sumber daya alam hayati dalam memproduksi komoditas tanaman pangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara lebih baik dan berkesinambungan dengan memerhatikan dan menjaga kelestarian lingkungan hidup. Pelindungan terhadap OPT/DPI adalah upaya untuk mengurangi kemungkinan gagal panen yang dapat mengganggu pasokan kebutuhan tanaman pangan kepada masyarakat. Hilirisasi komoditas tanaman pangan bernilai tambah berarti peningkatan nilai ekonomis melalui proses pengolahan dan pemasaran sehingga dapat memberikan dampak pada keberlangsungan usaha tani.

Pilar dapat berdiri tegak dengan dukungan SDM Direktorat Jenderal Tanaman Pangan yang produktif. Hal tersebut mengacu pada peningkatan kapabilitas dan kualitas SDM Direktorat Jenderal Tanaman Pangan untuk mencapai setiap target kinerja dan kemampuan untuk mengeksekusi setiap inisiatif dalam rangka mewujudkan visi 2025 - 2029. Tata kelola birokrasi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan

mengacu pada cara dan mekanisme birokrasi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan yang akuntabel dan berorientasi pada layanan sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi. Berdasarkan kerangka strategis tersebut, dirumuskan arah kebijakan dan inisiatif strategis (IS) Direktorat Jenderal Tanaman Pangan. Inisiatif strategis merupakan pendekatan/metode/terobosan yang menjadi prioritas untuk dilakukan. Pelaksanaan prioritas merepresentasikan urgensi sebuah inisiatif tanpa menghilangkan kewajiban pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan. Berikut arah kebijakan dan IS Direktorat Jenderal Tanaman Pangan 2025 - 2029.

Arah Kebijakan 1 “Peningkatan Pendapatan Petani Tanaman Pangan dalam Mewujudkan Kesejahteraan Petani Indonesia.” Arah kebijakan 1 dilakukan melalui inisiatif sebagai berikut.

- IS 1.1 Meningkatkan kualitas produk tanaman pangan berbasis hilirisasi, dan
- IS 1.2 Meningkatkan pemanfaatan akses pasar produk pertanian

Arah Kebijakan 2 “Mendorong Kemandirian Tanaman pangan dalam Memenuhi Kebutuhan Pangan Dalam Negeri.” Arah kebijakan 2 dilakukan melalui inisiatif sebagai berikut.

- IS 2.1 Penyediaan benih tanaman pangan secara berkelanjutan.
- IS 2.2 Optimasi Budi Daya Tanaman Pangan berkelanjutan sesuai standar.
- IS 2.3 Membangun dan mengelola KSPP Padi dan Jagung sesuai prioritas, dan
- IS 2.4 Pelindungan tanaman pangan dari OPT dan DPI.

Arah Kebijakan 3 “Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Komoditas Tanaman Pangan.”

- IS 3.1 Meningkatkan kualitas dan keamanan produk tanaman pangan, dan
- IS 3.2 Hilirisasi komoditas tanaman pangan.

Arah Kebijakan 4 “Tata kelola birokrasi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan yang transparan, akuntabel dan profesional.”

- IS 4.1 Tindak Lanjut temuan auditor internal dan eksternal.
- IS 4.2 Optimasi pengelolaan Pelaksanaan Anggaran.
- IS 4.3 Pelayanan publik berorientasi kebutuhan masyarakat, dan
- IS 4.4 Layanan internal dukungan manajemen lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 TARGET KINERJA

Target kinerja menjelaskan mengenai hasil dan satuan hasil yang akan dicapai dari setiap IKP Direktorat Jenderal Tanaman Pangan. Perumusan target kinerja Direktorat Jenderal Tanaman Pangan merupakan hasil pendelegasian Kementerian Pertanian. Berikut target kinerja Direktorat Jenderal Tanaman Pangan 2025 – 2029.

Gambar 43. Target Kinerja Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
2025 - 2029

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Sat	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SP.1 Terpenuhi-nya kebutuhan pangan asal tanaman pangan dari produksi dalam negeri	IKP 1.1 Produksi Padi	Juta Ton	54,45	54,85	55,27	55,68	56,05
	IKP 1.2 Produksi Jagung	Juta Ton	21,48	22,51	23,58	24,71	25,89
	IKP 1.3 Produksi Aneka Ka- cang	Ribu Ton	540,28	552,84	565,70	578,86	592,32
	IKP 1.4 Produksi Sorghum	Ribu Ton	18,21	18,40	18,58	18,77	18,95
	IKP 1.6 Produksi Ubi Jalar	Ton	1.517.449	1.562.972	1.609.861	1.658.157	1.707.902
	IKP 1.7 Produksi Kedelai	Ton	370.359	381.470	392.914	404.701	416.842
	IKP 1.7 Produksi Ubi Kayu	Ribu Ton	17.270,93	17.529,99	17.792,94	18.059,83	18.330,73

Sasaran Pro-gram	Indikator Kinerja Program	Sat	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SP.2 Meningkatkan produksi komoditas Tanaman Pangan prioritas pada Kawasan Sentra Produksi Pertanian (KSPP)	IKP 2.1 Peningkatan produksi beras KSPP Kalimantan Tengah	Ton	196.984	844.362	1.332.808	1.821.255	2.309.701
	IKP 2.2 Peningkatan produksi beras KSPP Sumatera Selatan	Ton	65.724	443.784	1.375.883	2.307.982	3.240.081
	IKP 2.3 Peningkatan produksi beras KSPP Nusa Tenggara Timur	Ton	33.624	71.324	126.889	182.454	238.020
	IKP 2.4 Peningkatan produksi jagung KSPP Nusa Tenggara Timur	Ton	49.100	60.687	81.260	117.177	181.038
	IKP 2.5 Peningkatan produksi jagung KSPP Papua	Ton	1.310	3.847	6.535	9.382	12.393
	IKP 2.6 Peningkatan produksi beras KSPP Papua Selatan	Ton	0	964.000	2.121.000	3.168.000	3.719.000
SP.3 Meningkatkan indeks harga yang diterima petani Tanaman Pangan	IKP 3.1 Indeks harga yang diterima petani Tanaman Pangan	%	135,19	136,57	137,96	139,36	140,78

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Sat	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SP.4 Meningkatkan volume ekspor komoditas tanaman pangan	IKP 4.1 Rata-rata volume ekspor komoditas tanaman pangan	Ton	264.509	266.073	267.647	269.229	270.822
SP.5 Terjaminnya mutu dan keamanan komoditas pertanian tanaman pangan	IKP 5.1 Indeks Mutu dan Keamanan komoditas pertanian tanaman pangan	Nilai	0,67	0,68	0,69	0,7	0,71
SP.6 Meningkatnya hasil pengolahan komoditas tanaman pangan unggulan yang telah menerapkan hilirisasi	IKP 6.1 Indeks hilirisasi komoditas tanaman pangan unggulan	Nilai	0,43	0,57	0,71	0,86	1
SP.7 Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Lingkup Ditjen Tanaman Pangan yang baik, transparan dan akuntabel	IKP 7.1 Indeks tata kelola birokrasi Ditjen. Tanaman Pangan	Indeks	0,86	0,87	0,87	0,88	0,88

Berdasarkan tabel di atas, kinerja Direktorat Jenderal Tanaman Pangan diukur melalui 7 (tujuh) SP dan 18 IKP. Masing-masing IKP akan menjadi acuan dalam perumusan Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) untuk UKE II lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan. Sebagai referensi dalam penerjemahan, berikut penjelasan masing-masing IKP Direktorat Jenderal Tanaman Pangan 2025 – 2029.

- **IKP 1.1 Produksi Padi**

Produksi padi mengukur kapasitas dan kemampuan Indonesia dalam rangka memenuhi kebutuhan beras dalam negeri. Indikator produksi padi diukur dalam satuan juta ton. Indikator ini merupakan indikator dengan polaritas *maximize*. Semakin tinggi realisasi terhadap target, capaian semakin baik.

- **IKP 1.2 Produksi Jagung**

Produksi jagung mengukur kapasitas dan kemampuan Indonesia dalam rangka memenuhi kebutuhan jagung dalam negeri. Indikator produksi jagung yang diukur dalam satuan juta ton. Indikator ini merupakan indikator dengan polaritas *maximize*. Semakin tinggi realisasi terhadap target, capaian semakin baik.

- **IKP 1.3 Produksi Aneka Kacang**

Produksi aneka kacang mengukur kapasitas dan kemampuan Indonesia dalam rangka memenuhi kebutuhan aneka kacang dalam negeri. Indikator produksi aneka kacang yang diukur dalam satuan ribu ton. Indikator ini merupakan indikator dengan polaritas *maximize*. Semakin tinggi realisasi terhadap target, capaian semakin baik.

- **IKP 1.4 Produksi Aneka Sorghum**

Produksi sorghum mengukur kapasitas dan kemampuan Indonesia dalam rangka memenuhi kebutuhan Sorghum dalam negeri. Indikator produksi sorghum yang diukur dalam satuan ribu ton. Indikator ini merupakan indikator dengan polaritas *maximize*. Semakin tinggi realisasi terhadap target, capaian semakin baik.

- **IKP 1.5 Produksi Ubi Jalar**

Produksi ubi jalar mengukur kapasitas dan kemampuan Indonesia dalam rangka memenuhi kebutuhan ubi jalar dalam negeri.

Indikator produksi ubi jalar yang diukur dalam satuan ton. Indikator ini merupakan indikator dengan polaritas *maximize*. Semakin tinggi realisasi terhadap target, capaian semakin baik.

- **IKP 1.6 Produksi Kedelai**

Produksi kedelai mengukur kapasitas dan kemampuan Indonesia dalam rangka memenuhi kebutuhan kedelai dalam negeri. Indikator produksi kedelai yang diukur dalam satuan ton. Indikator ini merupakan indikator dengan polaritas *maximize*. Semakin tinggi realisasi terhadap target, capaian semakin baik.

- **IKP 1.7 Produksi Ubi Kayu**

Produksi ubi kayu mengukur kapasitas dan kemampuan Indonesia dalam rangka memenuhi kebutuhan ubi kayu dalam negeri. Indikator produksi ubi kayu yang diukur dalam satuan ton. Indikator ini merupakan indikator dengan polaritas *maximize*. Semakin tinggi realisasi terhadap target, capaian semakin baik.

- **IKP 2.1 Peningkatan produksi beras KSPP Kalimantan Tengah**

Peningkatan produksi beras pada Kawasan Sentra Produksi Pertanian (KSPP) mengukur sejauh mana kemampuan KSPP Kalimantan Tengah menghasilkan beras. Indikator produksi beras pada KSPP Kalimantan Tengah yang diukur dalam satuan ton. Indikator ini merupakan indikator dengan polaritas *maximize*. Semakin tinggi realisasi terhadap target, capaian semakin baik.

- **IKP 2.2 Peningkatan produksi beras KSPP Sumatera Selatan**

Peningkatan produksi beras pada Kawasan Sentra Produksi Pertanian (KSPP) mengukur sejauh mana kemampuan KSPP Sumatera Selatan menghasilkan beras. Indikator produksi beras pada KSPP Sumatera Selatan yang diukur dalam satuan ton. Indikator ini merupakan indikator dengan polaritas *maximize*. Semakin tinggi realisasi terhadap target, capaian semakin baik.

■ **IKP 2.3 Peningkatan produksi beras KSPP Nusa Tenggara Timur**

Peningkatan produksi beras pada Kawasan Sentra Produksi Pertanian (KSPP) mengukur sejauh mana kemampuan KSPP Nusa Tenggara Timur menghasilkan beras. Indikator produksi beras pada KSPP Nusa Tenggara Timur yang diukur dalam satuan ton. Indikator ini merupakan indikator dengan polaritas *maximize*. Semakin tinggi realisasi terhadap target, capaian semakin baik.

■ **IKP 2.4 Peningkatan produksi jagung KSPP Nusa Tenggara Timur**

Peningkatan produksi jagung pada Kawasan Sentra Produksi Pertanian (KSPP) mengukur sejauh mana kemampuan KSPP Nusa Tenggara Timur menghasilkan jagung. Indikator produksi jagung pada KSPP Nusa Tenggara Timur yang diukur dalam satuan ton. Indikator ini merupakan indikator dengan polaritas *maximize*. Semakin tinggi realisasi terhadap target, capaian semakin baik.

■ **IKP 2.5 Peningkatan produksi jagung KSPP Papua**

Peningkatan produksi jagung pada Kawasan Sentra Produksi Pertanian (KSPP) mengukur sejauh mana kemampuan KSPP Papua menghasilkan jagung. Indikator produksi jagung pada KSPP Papua yang diukur dalam satuan ton. Indikator ini merupakan indikator dengan polaritas *maximize*. Semakin tinggi realisasi terhadap target, capaian semakin baik.

■ **IKP 2.6 Peningkatan produksi beras KSPP Papua Selatan**

Peningkatan produksi beras pada Kawasan Sentra Produksi Pertanian (KSPP) mengukur sejauh mana kemampuan KSPP Papua Selatan menghasilkan beras. Indikator produksi beras pada KSPP Papua Selatan yang diukur dalam satuan ton. Indikator ini merupakan indikator dengan polaritas *maximize*. Semakin tinggi realisasi terhadap target, capaian semakin baik.

- **IKP 3.1 Indeks harga yang diterima petani Tanaman Pangan**

Indeks harga yang diterima petani tanaman pangan adalah indikator yang mengukur perubahan rata-rata harga yang diterima petani atas komoditas hasil produksi ditingkat produsen pada periode tertentu. Indikator indeks harga yang diterima petani tanaman pangan mencakup komoditas padi dan palawija. Indikator ini merupakan indikator dengan polaritas *maximize*. Semakin tinggi realisasi terhadap target, capaian semakin baik.

- **IKP 4.1 Rata-rata volume ekspor komoditas tanaman pangan**

Volume ekspor komoditas tanaman pangan merepresentasikan jumlah volume ekspor tanaman pangan pada tahun berjalan. Indikator ini merupakan indikator dengan polaritas *maximize*. Semakin tinggi realisasi terhadap target, capaian semakin baik.

- **IKP 5.1 Indeks Mutu dan Keamanan komoditas pertanian tanaman pangan**

Indeks mutu dan keamanan komoditas tanaman pangan merepresentasikan tingkat pemenuhan terhadap standar mutu dan keamanan pangan sesuai dengan SNI dan/atau regulasi teknis yang berlaku. Indikator ini merupakan indikator dengan polaritas *maximize*. Semakin tinggi realisasi terhadap target, capaian semakin baik.

- **IKP 6.1 Indeks hilirisasi komoditas tanaman pangan unggulan**

Indeks hilirisasi komoditas tanaman pangan merepresentasikan peningkatan nilai tambah komoditas tanaman pangan yang mendapatkan perlakuan penanganan pascapanen dan pengolahan sehingga menjadi produk berdaya saing. Indikator ini merupakan indikator dengan polaritas *maximize*. Semakin tinggi realisasi terhadap target, capaian semakin baik.

- **IKP 7.1 Indeks tata kelola pemerintahan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan**

Indeks tata kelola merepresentasikan upaya perbaikan dan peningkatan kualitas tata kelola birokrasi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan sehingga dapat lebih optimal dalam memberikan layanan internal dan eksternal. Indikator ini merupakan indikator dengan polaritas *maximize*. Semakin tinggi realisasi terhadap target, capaian semakin baik.

4.2 KERANGKA PENDANAAN

Kerangka pendanaan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan menjelaskan mengenai kebutuhan pendanaan secara keseluruhan untuk mencapai target IKP. Pemenuhan kebutuhan pendanaan dapat berasal dari Rupiah Murni, Pendapatan Nasional Bukan Pajak (PNBP), Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (PHLN) serta sumber/skema lainnya seperti Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan *Corporate Social Responsibility (CSR)*. Kerangka pendanaan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan mencerminkan implementasi penganggaran berbasis kinerja karena setiap kebutuhan anggaran harus dapat dipetakan kedalam target kinerja yang ingin dicapai.

Kerangka pendanaan adalah kebutuhan ideal untuk mencapai target kinerja dan bersifat tentative sesuai pagu alokasi anggaran yang ditetapkan dalam DIPA per Tahun. Lebih rinci mengenai kerangka pendanaan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, dapat dilihat pada **LAMPIRAN 1. MATRIKS KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN.**

BAB V

PENUTUP

Pangan merupakan kebutuhan primer masyarakat sehingga ketersediaan pangan dan keterjangkauan pangan memengaruhi stabilitas bangsa. Dalam pergaulan internasional, kekuatan sebuah negara terhadap intervensi kebijakan asing salah satunya ditentukan dari kemampuan sebuah negara memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri. Semakin lemah kemampuan tersebut maka ketergantungan impor semakin tinggi sehingga dapat menurunkan daya tawar politik dan perdagangan luar negeri dan intervensi asing tidak dapat dihindari.

Indonesia sebagai negara yang memiliki cita-cita untuk swasembada pangan menghadapi tantangan berat. Ditengah ketidakpastian rantai pasok global akibat konflik wilayah dan kebijakan perang dagang negara *super power*, harga pangan dunia berkontraksi. Peningkatan harga akan memberatkan beberapa negara importir pangan, salah satunya Indonesia. Kondisi tersebut diperparah dengan faktor cuaca yang dapat mengakibatkan gagal panen. Tercatat pada tahun 2023, fenomena El Niño dan La Niña terjadi di beberapa negara yang mengakibatkan gagal panen komoditas pertanian, termasuk tanaman pangan. Pasokan yang menurun dengan permintaan tetap dan cenderung meningkat berpengaruh signifikan terhadap harga pangan.

Hal tersebut tidak menyurutkan semangat Indonesia untuk mewujudkan swasembada pangan. Beberapa program optimis yang diselenggarakan pemerintah seperti Makan Siang Bergizi (MBG) berpotensi meningkatkan kebutuhan pangan. Namun demikian, terdapat fakta lain bahwa alih fungsi lahan terus terjadi menyebabkan ketersediaan lahan menurun ditambah penyusutan jumlah petani dan lambannya regenerasi petani menjadikan permasalahan semakin pelik. Pemanfaatan teknologi muncul sebagai salah satu solusi namun kesiapan baik secara kompetensi dan pola pikir adalah tantangan berbeda disamping investasi yang tidak murah.

Direktorat Jenderal Tanaman Pangan menyadari betul tantangan yang dihadapi untuk mewujudkan apa yang menjadi prioritas nasional sub sektor tanaman pangan. Oleh karena itu, perumusan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Tanaman Pangan 2025 – 2029 merupakan langkah awal untuk menjabarkan bagaimana menjawab tantangan sekaligus memaksimalkan potensi yang ada. Tidak hanya sebagai sebuah dokumen strategis namun dapat dimanfaatkan sebagai referensi untuk merumuskan setiap inisiatif yang bermuara pada perwujudan visi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan 2025 – 2029. Penetapan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Tanaman Pangan 2025 – 2029 merupakan fase awal dari rangkaian implementasi SAKIP. Ke depan, dokumen Rencana Strategis perlu dituangkan menjadi Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja pemangku kepentingan terkait sehingga apa yang direncanakan dapat dieksekusi dengan baik.

LAMPIRAN 1. MATRIKS KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

KODE	SASARAN PROGRAM (OUT-COME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ KRO/ RO	TARGET					ALOKASI (DALAM JUTA)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Intermediate Outcome (Int.O.) 1.1.1 Meningkatkan Indeks Harga yang Diterima Petani												
SP.3	Meningkatnya indeks harga yang diterima petani Tanaman Pangan											
IKP 3.1	Indeks harga yang diterima petani tanaman pangan	135,19	136,57	137,96	139,36	140,78	26.846	28.813	30.923	33.189	35.621	Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
Immediate Outcome (Imm.O) 1.1.1.3: Tersedianya akses pasar yang dapat dimanfaatkan usaha tani												
SK.1	Tersedianya akses pasar komoditas tanaman pangan yang dapat dimanfaatkan usaha tani											
IKK 1.1	Persentase akses pasar yang dimanfaatkan usaha tani Tanaman Pangan terhadap total akses pasar yang didapat usaha tani tanaman pangan	95	95	95	95	95	1.560	2.000	2.200	2.420	2.662	Direktorat Hilirirasi Hasil Tanaman pangan
Intermediate Outcome (Int.O.) 2.1.1 Terpenuhinya kebutuhan pangan asal pertanian dari produksi dalam negeri												
SP.1	Terpenuhinya kebutuhan pangan asal tanaman pangan dari produksi dalam negeri											
IKP 1.1	Produksi Padi	54,45	54,85	55,27	55,68	56,05	867.713	1.587.850	1.410.524	1.518.856	1.449.856	Direktorat Jenderal Tanaman pangan
IKP 1.2	Produksi Jagung	21,48	22,51	23,58	24,71	25,89	640.002,76	909.000,00	827.100	922.878	894.676	
IKP 1.3	Produksi Aneka Kacang	540,28	552,84	565,70	578,86	592,32	-	10.150	10.150	17.091	33.288	

KODE	SASARAN PROGRAM (OUTPUT)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ KRO/ RO	TARGET					ALOKASI (DALAM JUTA)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
IKP 1.4	Produksi Sorghum	18,21	18,40	18,58	18,77	18,95	103	1.263	2.388	3.013	3.763	
IKP 1.5	Produksi Ubi jalar	1.517.449	1.562.972	1.609.861	1.658.157	1.707.902	-	10.151	10.151	29.786	47.551	
IKP 1.6	Produksi Kedelai	370.359	381.470	392.914	404.701	416.842	154	91.350	111.350	121.350	121.350	
IKP 1.7	Produksi Ubi kayu	17.270,93	17.529,99	17.792,94	18.059,83	18.330,73	867.713	1.587.850	1.410.524	1.518.856	1.449.856	
Immediate Outcome (Imm.O) 2.1.1.1: Terpenuhi nya produktivitas komoditas pertanian prioritas												
SK.1	Terpenuhi nya produktivitas komoditas aneka kacang dan umbi prioritas											
IKK 1.1	Produktivitas Ubi Kayu	27,81	28,25	28,69	29,12	29,56	-	5.075	5.075	5.075	5.075	Direktorat Aneka Kacang dan Umbi
SK.1	Terwujudnya komoditas sereal yang terfortifikasi											
IKK 1.1	Jumlah komoditas yang wajib terfortifikasi	1	1	1	1	1	21.000	43.356	43.356	43.356	43.356	Direktorat Sereal
Immediate Outcome (Imm.O) 2.1.1.2: Terpenuhi nya Luas Panen dan potensi produksi ternak komoditas pertanian prioritas menuju swasembada												
SK.2	Terpenuhi nya luas panen komoditas aneka kacang dan umbi prioritas											
IKK 2.1	Luas Panen Kedelai	228.928	234.891	241.314	248.461	255.990	154	78.417	111.350	121.350	121.350	Direktorat Aneka Kacang dan Umbi
IKK 2.2	Luas Panen Ubi Kayu	588.719	592.235	595.771	599.329	602.907	-	4.767	40.075	73.325	110.075	
IKK 2.3	Luas Panen Ubi Jalar	66.484	67.069	67.659	68.254	68.855	-	10.910	10.151	29.786	47.551	

KODE	SASARAN PRO-GRAM (OUT-COME)/ SASA-RAN KEGIATAN (OUTPUT)/ KRO/ RO	TARGET					ALOKASI (DALAM JUTA)					UNIT ORGAN-ISASI PELAK-SANA
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
IKK 2.4	Luas Panen Aneka Kacang	403.234	409.500	415.865	422.331	428.900	-	10.042	10.150	17.091	33.288	
IKK 2.5	Luas Panen Talas Beneng	574	-	-	-	-	1.437	-	-	-	-	
SK.2	Terpenuhinya produktivitas komoditas serealitas											Direktorat Serealia
IKK 2.1	Luas Panen Padi	10.270.117	10.289.066	10.377.700	10.474.611	10.555.687	867.713	1.587.856	1.410.524	1.518.856	1.449.856	
IKK 2.2	Luas Panen Jagung	2.644.228	2.743.387	2.846.264	2.952.999	3.063.736	640.003	909.000	827.100	922.878	894.676	
IKK 2.3	Luas Panen Sorgum	7.049	7.162	7.274	7.387	7.500	103	1.263	2.388	3.013	3.763	
Immediate Outcome (Imm.O) 2.1.1.3: Terlindunginya komoditas pertanian menuju swasembada dari OPT, PHMS dan dampak perubahan iklim												
SK.1	Terlindunginya komoditas pertanian tanaman pangan dari OPT dan dampak perubahan iklim											Direktorat Pelindungan Tanaman Pangan
IKK 1.1	Persentase area/ wilayah tanaman pangan yang terkendali terh-adap luas area/ wilayah tanaman pangan yang terserang OPT dan DPI	88,19	88,44	88,68	88,93	89,18	21.499	44.500	44.500	44.500	44.500	
SK.2	Terwujudnya layanan pengujian mutu produk tanaman											Balai Pengujian Mutu Produk Tanaman
IKK 2.1	Jumlah layanan pengujian mutu produk tanaman	3	3	3	3	3	2.369	2.500	2.500	2.500	2.500	

KODE	SASARAN PROGRAM (OUT-COME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ KRO/ RO	TARGET					ALOKASI (DALAM JUTA)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
SK.3	Meningkatnya pemanfaatan informasi hasil peramalan OPT											
IKK 3.1	Persentase informasi hasil peramalan OPT yang dimanfaatkan	32	56	74	88	100	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Balai Besar Peramalan OPT
Immediate Outcome (Imm.O) 2.1.1.4: Tersedianya pupuk, benih/bibit dan pestisida berdasarkan kebutuhan produksi pertanian menuju swasembada												
SK.1	Tersedianya benih tanaman pangan berdasarkan kebutuhan produksi tanaman pangan											
IKK 1.1	Persentase ketersediaan benih tanaman pangan terhadap kebutuhan produksi tanaman pangan	84,59	85,71	86,82	87,94	89,05	7.250	10.823	9.254	9.254	9.254	Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan
IKK 1.2	Persentase Wilayah mandiri benih insitu terhadap total Wilayah tanaman pangan	13,16	15,79	18,42	21,05	23,68	6.668	12.421	10.330	10.330	10.330	

KODE	SASARAN PROGRAM (OUTPUT)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ KRO/ RO	TARGET					ALOKASI (DALAM JUTA)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA	
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
SK.2	Terwujudnya metode pengujian mutu benih tanaman pangan dan hortikultura												Balai Besar Pengembangan Pengujian Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura
IKK 2.1	Persentase metode pengujian mutu benih TP dan hortikultura yang diterapkan	50	55	60	65	70	2.000	2.540	2.540	2.540	2.540		
Intermediate Outcome (Int.O.) 2.1.4 Terjaminnya mutu dan keamanan komoditas pertanian													Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
SP.5	Terjaminnya mutu dan keamanan komoditas pertanian tanaman pangan												
IKP 5.1	Indeks mutu dan keamanan komoditas pertanian tanaman pangan	0,67	0,68	0,69	0,70	0,71	715	2.000	2.000	2.000	2.000		
Immediate Outcome (Imm.O) 2.1.3.1 Terwujudnya komoditas pertanian bermutu dan aman													Direktorat Hilirisasi Hasil Tanaman Pangan
SK.3	Terwujudnya komoditas pertanian tanaman pangan bermutu dan aman												
IKK 3.1	Persentase komoditas pertanian tanaman pangan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan terhadap total komoditas pertanian tanaman pangan	67	68	69	70	71	715	2.000	2.000	2.000	2.000		

KODE	SASARAN PROGRAM (OUT-COME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ KRO/ RO	TARGET					ALOKASI (DALAM JUTA)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Intermediate Outcome (Int.O.) 2.1.6 Meningkatkan Produksi Komoditas Pertanian Prioritas pada Kawasan Sentra Produksi Pertanian												
SP.2	Meningkatnya produksi komoditas Tanaman Pangan prioritas pada Kawasan Sentra Produksi Pertanian											
IKP 2.1	Peningkatan produksi beras KSPP Kalimantan Tengah	196.984	844.362	1.332.808	1.821.255	2.309.701	-	-	17.500	26.303	36.100	Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
IKP 2.2	Peningkatan produksi beras KSPP Sumatera Selatan	65.724	443.784	1.375.883	2.307.982	3.240.081	-	-	25.691	40.552	57.105	
IKP 2.3	Peningkatan produksi beras KSPP Nusa Tenggara Timur	33.624	71.324	126.889	182.454	238.020	-	-	1.897	2.903	4.023	
IKP 2.4	Peningkatan produksi jagung KSPP Nusa Tenggara Timur	49.100	60.687	81.260	117.177	181.038	-	-	119.678	124.277	129.077	
IKP 2.5	Peningkatan produksi jagung KSPP Papua	1.310	3.847	6.535	9.382	12.393	-	-	2.144	2.448	2.750	
IKP 2.6	Peningkatan produksi jagung KSPP Papua Selatan	0	964.000	2.121.000	3.168.000	3.719.000	-	-	18.575	29.535	41.743	

KODE	SASARAN PROGRAM (OUT-COME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ KRO/ RO	TARGET					ALOKASI (DALAM JUTA)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Immediate Outcome (Imm.O) 2.2.1.1 Tercapainya produktivitas dan luas panen komoditas pertanian prioritas pada Kawasan Sentra Produksi Pertanian												
SK.3	Tercapainya luas panen komoditas serealia prioritas pada Kawasan Sentra Produksi Pertanian											
IKK 3.1	Peningkatan Luas panen Padi KSPP Kalimantan Tengah	146.806	590.872	941.637	1.292.402	1.643.167	-	-	17.500	26.303	36.100	Direktorat Serealia
	IKK 3.2	Peningkatan Luas panen Padi KSPP Sumatera Selatan	28.568	309.179	1.072.532	1.835.886	2.599.240	-	-	25.691	40.552	
IKK 3.3	Peningkatan Luas panen Padi KSPP Nusa Tenggara Timur	10.930	38.435	86.660	134.886	183.111	-	-	1.897	2.903	4.023	
IKK 3.4	Peningkatan Luas panen jagung KSPP Nusa Tenggara Timur	9.048	10.857	14.114	19.760	29.640	-	-	119.678	124.277	129.077	
IKK 3.5	Peningkatan Luas panen jagung KSPP Papua	189	539	889	1.239	1.589	-	-	2.144	2.448	2.750	
IKK 3.6	Peningkatan Luas panen Padi KSPP Papua Selatan	0	665.000	1.330.000	1.900.000	1.900.000	-	-	18.575	29.535	41.743	

KODE	SASARAN PROGRAM (OUT-COME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ KRO/ RO	TARGET					ALOKASI (DALAM JUTA)					UNIT ORGAN- ISASI PELAK- SANA	
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
Intermediate Outcome (Int.O.) 3.1.1 Meningkatkan volume ekspor komoditas pertanian yang siap digunakan													
SP.4	Meningkatnya volume ekspor komoditas tanaman pangan yang siap digunakan												Direktorat Jen- deral Tanaman Pangan
IKP 4.1	Rata-rata volume ekspor komod-itas tanaman pangan	264.509	266.073	267.647	269.229	270.822	14.812	1.903	2.697	2.906	3.136		
Immediate Outcome (Imm.O) 3.1.1.1 Meningkatkan ketersediaan produk komoditas pertanian siap ekspor													Direktorat Hilirisasi Hasil Tanaman Pangan
SK.2	Meningkatnya ketersediaan produk komoditas pertanian tanaman pangan siap ekspor												
IKK 2.1	Persentase pro-duk komoditas tanaman pangan siap ekspor terhadap total potensi ekspor tanaman pangan	42,86	57,14	71,43	85,71	100	14.812	1.903	2.697	2.906	3.136		
Intermediate Outcome (Int.O.) 3.2.1 Meningkatkan hasil pengolahan komoditas pertanian unggulan yang telah menerapkan hilirisasi													Direktorat Jen- deral Tanaman Pangan
SP.5	Meningkatnya hasil pengolahan komoditas tanaman pangan unggulan yang telah menerapkan hilirisasi												
IKP 5.1	Indeks hilirisa-si komoditas tanaman pangan unggulan	0,43	0,57	0,71	0,86	1	1.274.026	97	450	450	450		

KODE	SASARAN PROGRAM (OUTPUT)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ KRO/ RO	TARGET					ALOKASI (DALAM JUTA)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Immediate Outcome (Imm.O) 3.2.1.1 Meningkatkan komoditas pertanian unggulan yang bernilai tambah dan berdaya saing												
SK.3	Meningkatnya komoditas tanaman pangan unggulan yang bernilai tambah dan berdaya saing											
IKK 3.1	Persentase komoditas tanaman pangan yang bernilai tambah dan berdaya saing terhadap total komoditas tanaman pangan unggulan	28,57	42,86	57,14	71,43	85,71	1.274.026	97	450	450	450	Direktorat Hilirisasi Hasil Tanaman Pangan
Intermediate Outcome (Int.O.) 6.1.1 erwujudnya Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian dalam mendukung pencapaian Reformasi Birokrasi												
SP.7	Terwujudnya birokrasi dan tata kelola organisasi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan yang baik, transparan dan akuntabel											
IKP 7.1	Indeks tata kelola pemerintahan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan	0,86	0,867	0,872	0,877	0,884	128.107	106.811	144.407	149.081	154.793	Direktorat Jenderal Tanaman Pangan

KODE	SASARAN PROGRAM (OUT-COME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ KRO/ RO	TARGET					ALOKASI (DALAM JUTA)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
SK. 1	Ditindaklanjutinya hasil temuan pengawasan internal dan eksternal terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan											
IKK 1.1	Persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan internal terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan	90	91	92	93	94	1.913	1.450	2.966	3.115	3.270	Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
IKK 1.2	Persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan	85	86	87	88	89	8.756	508	8.756	8.756	8.756	

KODE	SASARAN PROGRAM (OUT-COME)/ SASA-RAN KEGIATAN (OUTPUT)/ KRO/ RO	TARGET					ALOKASI (DALAM JUTA)					UNIT ORGAN-ISASI PELAK-SANA
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
SK.2	Meningkatnya kualitas pengelolaan anggaran Direktorat Jenderal Tanaman Pangan											
IKK 2.1	Nilai Indikator Kinerja Pelaksa-naan Anggaran (IKPA) Direktorat Jenderal Tana-man Pangan	87,70	88,15	88,60	89,05	89,50	14.826	13.332	21.816	22.722	23.673	Sekretariat Direktorat Jen-deral Tanaman Pangan
SK.3	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan publik di lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan											
IKK 3.1	Indeks Kepuasan Masyarakat ter-hadap layanan publik di lingkup Direktorat Jen-deral Tanaman Pangan	3,6	3,65	3,68	3,7	3,72	350	458	458	458	458	Sekretariat Direktorat Jen-deral Tanaman Pangan
SK.4	Meningkatnya kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan											
IKK 4.1	Indeks kepuasan unit eselon II ter-hadap layanan dukungan mana-ajemen Direktorat Jenderal Tana-man Pangan	3,28	3,29	3,30	3,31	3,32	102.262	91.064	110.411	114.030	118.636	Sekretariat Direktorat Jen-deral Tanaman Pangan

LAMPIRAN 2. MATRIK PENDANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DAN SUMBER
PENDANAAN LAINNYA YANG SAH TERHADAP KEGIATAN PRIORITAS/PROYEK PRIORITAS DIREKTORAT
JENDERAL TANAMAN PANGAN

No	Kegiatan pri- oritas/ proyek prioritas	Penugasan Indikator	Sat	Target RP-JMN					Sat	Target Renstra 2025 - 2029					Alokasi APBN (Dalam Juta Rupiah)				
				2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
1	KP 02.10.1 Peningkatan Produksi beras KSPK Kali- mantan Tengah	IKP 2.1 Pening- katan Produksi beras KSPK kali- mantan Tengah	Ton	196.984	844.362	1.332.808	1.821.255	2.309.701	ton	196.984	844.362	1.332.808	1.821.255	2.309.701	-	-	17.500	26.303	36.100
2	KP 02.10.1 Peningkatan Luas panen Padi KSPK Kalimantan Tengah	IKK 3.1 Pen- ingkatan Luas panen Padi KSPK Kalimantan Tengah	Ha	146.806	590.872	941.637	1.292.402	1.643.167	Ha	146.806	590.872	941.637	1.292.402	1.643.167	-	-	17.500	26.303	36.100
3	KP 02.10.3 Peningkatan Produksi beras KSPK Sumat- era Selatan	IKP 2.2 Pening- katan Produksi beras KSPK Su- matera Selatan	Ton	65.724	443.784	1.375.883	2.307.982	3.240.081	Ton	65.724	443.784	1.375.883	2.307.982	3.240.081	-	-	25.691	40.552	57.105
4	KP 02.10.3 Peningkatan Luas panen Padi KSPK Sumatera Selatan	IKK 3.2 Pening- katan Luas panen Padi KSPK Suma- tera Selatan	Ha	28.568	309.179	1.072.532	1.835.886	2.599.240	Ha	28.568	309.179	1.072.532	1.835.886	2.599.240	-	-	25.691	40.552	57.105
5	KP 02.10.4 Peningkatan Produksi beras KSPK Nusa Tenggara Timur	IKP 2.3 Pening- katan Produksi beras KSPK Nusa Tenggara Timur	Ton	33.624	71.324	126.889	182.454	238.020	Ton	33.624	71.324	126.889	182.454	238.020	-	-	1.897	2.903	4.023
6	KP 02.10.4 Peningkatan Luas panen Padi KSPK Nusa Tenggara Timur	IKK 3.3 Pening- katan Luas panen Padi KSPK Nusa Tenggara Timur	Ha	10.930	38.435	86.660	134.886	183.111	Ha	10.930	38.435	86.660	134.886	183.111	-	-	1.897	2.903	4.023

No	Kegiatan prioritas/ proyek	Penugasan Indikator	Target RPJMN					Sat	Target Renstra 2025 - 2029					Alokasi APBN (Dalam Juta Rupiah)				
			2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
7	KP 02.10.4 Peningkatan Produksi jagung KSPP Nusa Tenggara Timur	IKP 2.4. Peningkatan Produksi jagung KSPP Nusa Tenggara Timur	49.100	60.687	81.260	117.177	181.038	Ton	49.100	60.687	81.260	117.177	181.038	-	-	119.678	124.277	129.077
8	KP 02.10.4 Peningkatan Luas panen jagung KSPP Nusa Tenggara Timur	IKK 3.4 Peningkatan Luas panen jagung KSPP Nusa Tenggara Timur	9.048	10.857	14.114	19.760	29.640	Ha	9.048	10.857	14.114	19.760	29.640	-	-	119.678	124.277	129.077
9	KP 02.10.5 Peningkatan Produksi jagung KSPP Papua	IKP 2.5 Peningkatan Produksi jagung KSPP Papua	1.310	3.847	6.535	9.382	12.393	Ton	1.310	3.847	6.535	9.382	12.393	-	-	2.144	2.448	2.750
10	KP 02.10.5 Peningkatan Luas panen jagung KSPP Papua	IKK 3.5 Peningkatan Luas panen jagung KSPP Papua	189	539	889	1.239	1.589	Ha	189	539	889	1.239	1.589	-	-	2.144	2.448	2.750
11	KP 02.10.6 Peningkatan Produksi beras KSPP Papua Selatan	IKP 2.6 Peningkatan Produksi beras KSPP Papua Selatan	-	964.000	2.121.000	3.168.000	3.719.000	Ton	-	964.000	2.121.000	3.168.000	3.719.000	-	-	18.575	29.535	41.743
12	KP 02.10.6 Peningkatan Luas panen Padi KSPP Papua Selatan	IKK 3.6 Peningkatan Luas panen Padi KSPP Papua Selatan	-	665.000	1.330.000	1.900.000	1.900.000	Ha	-	665.000	1.330.000	1.900.000	1.900.000	-	-	18.575	29.535	41.743
15	KP 02.10.11 Produksi Padi	IKP 1.1 Produksi Padi	54,45	54,85	55,27	55,68	56,05	Juta Ton	54,45	54,85	55,27	55,68	56,05	867.713,13	1.587.850	1.410.524	1.518.856	1.449.856
16	KP 02.10.11 Produksi Jagung	IKP 1.2 Produksi Jagung	21,48	22,51	23,58	24,71	25,89	Juta Ton	21,48	22,51	23,58	24,71	25,89	640.002,76	909.000,00	827.100	922.878	894.676
17	KP 02.10.11 Produksi Aneka Kacang	IKP 1.3 Produksi Aneka Kacang	540,28	552,84	565,70	578,86	592,32	Ribu Ton	540,28	552,84	565,7	578,86	592,32	-	10.150	10.150	17.091	33.288
18	KP 02.10.11 Produksi Sorghum	IKP 1.4 Produksi Sorghum	18,21	18,4	18,58	18,77	18,95	Ribu Ton	18,21	18,4	18,58	18,77	18,95	103	1.263	2.388	3.013	3.763

No	Kegiatan prioritas/proyek prioritas	Penugasan Indikator	Sat	Target RPJMN					Sat	Target Renstra 2025 - 2029					Alokasi APBN (Dalam Juta Rupiah)				
				2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
19	KP 02.10.11 Produksi Ubi jalar	IKP 1.5 Produksi Ubi jalar	Ton	1.517.449	1.562.972	1.609.861	1.658.157	1.707.902	Ton	1.517.449	1.562.972	1.609.861	1.658.157	1.707.902	-	10.151	10.151	29.786	47.551
20	KP 02.10.11 Produksi Kedelai	IKP 1.6 Produksi Kedelai	Ton	370.359	381.470	392.914	404.701	416.842	Ton	370.359	381.470	392.914	404.701	416.842	154	91.350	111.350	121.350	121.350
21	KP 02.10.14 Jumlah komoditas yang wajib terfortifikasi	IKK 1.1 Jumlah komoditas yang wajib terfortifikasi	komoditas	3	3	3	4	4	Komoditas	1	1	1	1	1	21.000	43.356	43.356	43.356	43.356
22	KP 05.01.08 Produksi Ubi Kayu	IKP 1.7 Produksi Ubi Kayu	Ton	17.270.930	17.529.990	17.792.940	18.059.830	18.330.730	Ton	17.270.926	17.529.990	17.792.940	18.059.830	18.330.730	-	5.075	40.075	73.325	110.075
23	KP 05.01.08 Produktivitas Ubi Kayu	IKK 1.1 Produktivitas Ubi Kayu	Ton/Hektar	27,81	28,25	28,69	29,12	29,56	Ton/ha	27,81	28,25	28,69	29,12	29,56	3.293	3.499	3.499	3.499	3.499

LAMPIRAN 3. PENDELEGASIAN KINERJA DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN 2025 - 2029

Sasaran	Indikator Kinerja	Penanggung Jawab
SS.1 Meningkatnya Pendapatan Petani	IKS 1.1 Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP)	Kementerian Pertanian
	IKS 1.2 Pertumbuhan nilai tambah per tenaga kerja sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	Kementerian Pertanian
SP.3 Meningkatnya indeks harga yang diterima petani Tanaman Pangan	IKP 3.1 Indeks harga yang diterima petani Tanaman Pangan	Direktorat Jenderal Tanaman pangan
SK.1 Tersedianya akses pasar komoditas tanaman pangan yang dapat dimanfaatkan usaha tani	IKK 1.1 Persentase akses pasar yang dimanfaatkan usaha tani Tanaman Pangan terhadap total akses pasar yang didapat usaha tani tanaman pangan	Direktorat Hilirirasi Hasil Tanaman Pangan
SS.2 Terwujudnya swasembada pangan asal pertanian berkelanjutan	IKS 2.1 Persentase komoditas pertanian yang mencapai swasembada terhadap komoditas pertanian prioritas	Kementerian Pertanian
SP.1 Terpenuhinya kebutuhan pangan asal tanaman pangan dari produksi dalam negeri	IKP 1.1 Produksi Padi	Direktorat Jenderal Tanaman pangan
	IKP 1.2 Produksi Jagung	Direktorat Jenderal Tanaman pangan
	IKP 1.3 Produksi Aneka Kacang	Direktorat Jenderal Tanaman pangan
	IKP 1.4 Produksi Sorghum	Direktorat Jenderal Tanaman pangan
	IKP 1.6 Produksi Ubi Jalar	Direktorat Jenderal Tanaman pangan
	IKP 1.7 Produksi Kedelai	Direktorat Jenderal Tanaman pangan
	IKP 1.7 Produksi Ubi Kayu	Direktorat Jenderal Tanaman pangan
SK.1 Terpenuhinya produktivitas komoditas aneka kacang dan umbi prioritas	IKK 1.1 Produktivitas Ubi Kayu	Direktorat Aneka Kacang dan Umbi

Sasaran	Indikator Kinerja	Penanggung Jawab
SK.2 Terpenuhi luas panen komoditas aneka kacang dan umbi prioritas	IKK 2.1 Luas Panen Kedelai	Direktorat Aneka Kacang dan Umbi
	IKK 2.2 Luas Panen Ubi Kayu	Direktorat Aneka Kacang dan Umbi
	IKK 2.3 Luas Panen Ubi Jalar	Direktorat Aneka Kacang dan Umbi
	IKK 2.4 Luas Panen Aneka Kacang	Direktorat Aneka Kacang dan Umbi
	IKK 2.5 Luas Panen Talas Beneng	Direktorat Aneka Kacang dan Umbi
SK.1 Terwujudnya komoditas sereal yang terfortifikasi	IKK 1.1 Jumlah komoditas yang wajib terfortifikasi	Direktorat Sereal
SK.1 Terwujudnya komoditas sereal yang terfortifikasi	IKK 2.1 Luas Panen Padi	Direktorat Sereal
	IKK 2.2 Luas Panen Jagung	Direktorat Sereal
	IKK 2.3 Luas Panen Sorgum	Direktorat Sereal
SK.1 Terlindunginya komoditas pertanian tanaman pangan dari OPT dan dampak perubahan iklim	IKK 1.1 Persentase area/wilayah tanaman pangan yang terkendali terhadap luas area/wilayah tanaman pangan yang terserang OPT dan DPI	Direktorat Pelindungan Tanaman Pangan
SK.1 Tersedianya benih tanaman pangan berdasarkan kebutuhan produksi tanaman pangan	IKK 1.1 Persentase ketersediaan benih tanaman pangan terhadap kebutuhan produksi tanaman pangan	Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan
	IKK 1.2 Persentase Wilayah mandiri benih insitu terhadap total Wilayah tanaman pangan	Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan
SK.2 Terwujudnya layanan pengujian mutu produk tanaman	IKK 2.1 Jumlah layanan pengujian mutu produk tanaman	Balai Pengujian Mutu Produk Tanaman
SK.3 Meningkatkan pemanfaatan informasi hasil peramalan OPT	IKK 3.1 Persentase informasi hasil peramalan OPT yang dimanfaatkan	Balai Besar Peramalan OPT
SK.2 Terwujudnya metode pengujian mutu benih tanaman pangan dan hortikultura	IKK 2.1 Persentase metode pengujian mutu benih TP dan hortikultura yang diterapkan	Balai Besar Pengembangan Pengujian Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura

Sasaran	Indikator Kinerja	Penanggung Jawab
SP.2 Meningkatkan produksi komoditas Tanaman Pangan prioritas pada Kawasan Sentra Produksi Pertanian (KSPP)	IKP 2.1 Peningkatan produksi beras KSPP Kalimantan Tengah	Direktorat Jenderal Tanaman pangan
	IKP 2.2 Peningkatan produksi beras KSPP Sumatera Selatan	Direktorat Jenderal Tanaman pangan
	IKP 2.3 Peningkatan produksi beras KSPP Nusa Tenggara Timur	Direktorat Jenderal Tanaman pangan
	IKP 2.4 Peningkatan produksi jagung KSPP Nusa Tenggara Timur	Direktorat Jenderal Tanaman pangan
	IKP 2.5 Peningkatan produksi jagung KSPP Papua	Direktorat Jenderal Tanaman pangan
	IKP 2.6 Peningkatan produksi beras KSPP Papua Selatan	Direktorat Jenderal Tanaman pangan
SK.3 Tercapainya luas panen komoditas sereal-prioritas pada Kawasan Sentra Produksi Pertanian	IKK 3.1 Peningkatan Luas panen Padi KSPP Kalimantan Tengah	Direktorat Sereal-p
	IKK 3.2 Peningkatan Luas panen Padi KSPP Sumatera Selatan	Direktorat Sereal-p
	IKK 3.3 Peningkatan Luas panen Padi KSPP Nusa Tenggara Timur	Direktorat Sereal-p
	IKK 3.4 Peningkatan Luas panen jagung KSPP Nusa Tenggara Timur	Direktorat Sereal-p
	IKK 3.5 Peningkatan Luas panen jagung KSPP Papua	Direktorat Sereal-p
	IKK 3.6 Peningkatan Luas panen Padi KSPP Papua Selatan	Direktorat Sereal-p
SS.3 Meningkatnya pangsa pasar (market share) produk ekspor pertanian	IKS 3.1 Market share produk ekspor pertanian	Kementerian Pertanian
SP.4 Meningkatnya volume ekspor komoditas tanaman pangan	IKP 4.1 Rata-rata volume ekspor komoditas tanaman pangan	Direktorat Jenderal Tanaman pangan

Sasaran	Indikator Kinerja	Penanggung Jawab
SK.2 Meningkatkan ketersediaan produk komoditas pertanian tanaman pangan siap ekspor	IKK 2.1 Persentase produk komoditas tanaman pangan siap ekspor terhadap total potensi ekspor tanaman pangan	Direktorat Hilirisasi Hasil Tanaman Pangan
SP.5 Terjaminnya mutu dan keamanan komoditas pertanian tanaman pangan	IKP 5.1 Indeks Mutu dan Keamanan komoditas pertanian tanaman pangan	Direktorat Jenderal Tanaman pangan
SK.3 Terwujudnya komoditas pertanian tanaman pangan bermutu dan aman	IKK 3.1 Persentase komoditas pertanian tanaman pangan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan terhadap total komoditas pertanian tanaman pangan	Direktorat Hilirisasi Hasil Tanaman Pangan
SS.4 Meningkatkan hilirisasi komoditas pertanian unggulan	IKS 4.1 Indeks hilirisasi komoditas pertanian unggulan	Kementerian Pertanian
SP.6 Meningkatkan hasil pengolahan komoditas tanaman pangan unggulan yang telah menerapkan hilirisasi	IKP 6.1 Indeks hilirisasi komoditas tanaman pangan unggulan	Direktorat Jenderal Tanaman pangan
SK.4 Meningkatkan komoditas tanaman pangan unggulan yang bernilai tambah dan berdaya saing	IKK 4.1 Persentase komoditas tanaman pangan yang bernilai tambah dan berdaya saing terhadap total komoditas tanaman pangan unggulan	Direktorat Hilirisasi Hasil Tanaman Pangan
SS.7 Terwujudnya Reformasi Birokrasi Kementan dalam mendukung pencapaian Reformasi Birokrasi	IKS 7.1 Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian	Kementerian Pertanian
SP.7 Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Lingkup Ditjen Tanaman Pangan yang baik, transparan dan akuntabel	IKP 7.1 Indeks tata kelola birokrasi Ditjen. Tanaman Pangan	Direktorat Jenderal Tanaman pangan

Sasaran	Indikator Kinerja	Penanggung Jawab
SK.1 Ditindaklanjutinya hasil temuan pengawasan internal dan eksternal terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan	IKK 1.1 Persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan internal terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan IKK 1.2 Persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan	Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
SK.2 Meningkatnya kualitas pengelolaan anggaran Direktorat Jenderal Tanaman Pangan	IKK 2.1 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Direktorat Jenderal Tanaman Pangan	Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
SK.3 Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan publik di lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan	IKK 3.1 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik di lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan	Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
SK.4 Meningkatnya kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan	IKK 4.1 Indeks kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen Direktorat Jenderal Tanaman Pangan	Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan

